

Martha Nathasya Lotu

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH (SIPKD) TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH SETDA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Renta Yustie, Ricky Angga Ariska, Fadilla Purwitasari
**PERAN DAN PENGARUH DARI PEMBERDAYAAN DAN
PEMBANGUNAN GENDER TERHADAP PEREKONOMIAN
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Fabian Aldino Zecharian Jolong
**STRATEGI BANK NTT MELAYANI KREDIT DALAM MASA
PANDEMI COVID 19**

Maria Ursula Tani'i, Minarni Anaci Dethan
**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NIAT
PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKUKAN
TINDAKAN WHISTLEBLOWING STUDI PADA PEMERINTAH
DAERAH TIMOR TENGAH UTARA**

Erwinda Novelania Meo, Linda Lomi Ga, Herly M. Oematan
**SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)
PERSEDIAAN ALAT KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH (RSUD) KOTA BAJAWA**

Linus A. Ch Sakan
**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
MELALUI ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
TIMOR TENGAH SELATAN**

Adriana Teu, Petrus E. De Rozari, Sarlin P. Nawa Pau
**ANALISIS NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN
SUBSEKTOR TELEKOMUNIKASI YANG TERDAFTAR DI BURSA
EFEK INDONESIA (BEI) SELAMA PANDEMI COVID-19**

Jurnal Akuntansi

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

Diterbitkan oleh :

Universitas Nusa Cendana

Volume 10, No. 2, Oktober 2022

Hal. 79 - 153

ISSN : 2338-4468

E-ISSN : 2715-1158

Jurnal Akuntansi

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

PELINDUNG / PENASEHAT

Dekan FEB UNDANA

Dr. Apriana H. J. Fanggidae.,SE.,M.Si

PENANGGUNG JAWAB

Ketua Program Studi Akuntansi

Linda Lomi Ga, SE., MSA

PEMIMPIN REDAKSI

Sarinah Joyce M. Rafael, SE.,M.Acc.,Ak.,CA

EDITOR

Sarlin Nawa Pau, SE., M.Si., CFrA.

Adhitya Agri Putra, SE., M.Acc., Ak., CA

Angga P. Karpriana, SE., MAcc., Ak.,CA

Meliza Putrianti Zifi, SE., M.Acc.

Maria Elerina Douk Tunti, SE., M.Si.

Moni W. Muskanan, SE., MPA, CFrA.

Yohana Febiani Angi, SE., MAKS

Maria P. L. Muga, SE., M.Si., Ak.

I Komang Arthana, SE., M.Si., CFrA

REVIEWER

Prof. Eko Ganis Sukoharsono, SE,
M.Com. (Hons), CSRS, Ph.D

(Universitas Brawijaya);

Prof. Drs. Djoko Suhardjanto, M.Com
(Hons),Ph.D., Ak. (Universitas Negeri
Solo);

Prof. Intiyas Utami, M.Si., CA., CMA.,
QIA (Universitas Kristern Satya
Wacana)

Yuliansyah, SE., MSA., Ph.D., Akt., CA
(Universitas Lampung);

Dr. Anthon Simon Yohanis Kerih, SE,
MSi. (Universitas Nusa Cendana);

Halim Dedy Perdana, SE., MSM.,
M.Rech., Ak., CFrA (KAP DBSD)

Nuur Widiastono, SE., MSE., Ak., CFE.,
CA., ACPA (IAI Wilayah NTT)

ALAMAT REDAKSI

Jl. Adisucipto Penfui Kupang-NTT

Telp. (0380) 881183

Fax. (0380) 881183

Email: jak.feb@undana.ac.id

Terbit 2x: MARET dan OKTOBER

Jurnal Akuntansi:
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
diterbitkan oleh:
UNIVERSITAS NUSA CENDANA

JURNAL AKUNTANSI
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
Volume 10, No. 2, Oktober 2022 - ISSN: 2338-4468

DAFTAR ISI
JURNAL AKUNTANSI
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
Volume 10, No. 2, Oktober 2022 - ISSN: 2338-4468

DAFTAR ISI

79 - 88

- **PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH SETDA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**
Martha Nathasya Lotu

89 -98

- **PERAN DAN PENGARUH DARI PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN GENDER TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**
Renta Yustie
Ricky Angga Ariska
Fadilla Purwitasari

99 -107

- **STRATEGI BANK NTT MELAYANI KREDIT DALAM MASA PANDEMI COVID 19**
Fabian Aldino Zecharian Jolong

108 – 120

- **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NIAT PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKUKAN TINDAKAN WHISTLEBLOWING STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH TIMOR TENGAH UTARA**
Maria Ursula Tani'i
Minarni Anaci Dethan

121 - 128

■ **SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) PERSEDIAAN ALAT KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KOTA BAJAWA**

Erwinda Novelania Meo

Linda Lomi Ga

Herly M. Oematan

129 - 140

■ **ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

Linus A. Ch Sakan

141 - 153

■ **ANALISIS NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN SUBSEKTOR TELEKOMUNIKASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) SELAMA PANDEMI COVID-19**

Adriana Teu

Petrus E. De Rozari

Sarlin P. Nawa Pau

PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH SETDA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Martha Nathasya Lotu

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
lotuthasya76@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Keuangan Daerah Nusa Tenggara Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh antara penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara parsial. Jumlah sampel dalam penelitian ini ada 43 yang merupakan staf yang terlibat langsung dalam penerapan SIPKD, peneliti mengambil sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil analisis secara parsial diketahui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan koefisien determinasi sebesar 15% sedangkan 85% lainnya dipengaruhi faktor lain.

Kata kunci : Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD), Kualitas Laporan Keuangan.

ABSTRACT

This research was conducted at the Office of the Regional Finance Agency of East Nusa Tenggara. The purpose of this study was to determine the effect of the implementation of the Regional Financial Management Information System (SIPKD) on the quality of local government financial reports at the Regional Finance Agency of East Nusa Tenggara Province partially. The number of samples in this study were 43 who were staff who were directly involved in the implementation of SIPKD, the researchers took samples using the purposive sampling method. Data collection techniques in this study using a questionnaire. The data analysis technique in this study used simple linear regression analysis. Based on the results of the partial analysis, it is known that the Regional Financial Management Information System (SIPKD) affects the quality of financial reports with a coefficient of determination of 15% while the other 85% is influenced by other factors.

Keywords: Regional Financial Information System, Quality Of Financial Reports.

PENDAHULUAN

Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi informasi serta komunikasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hampir di seluruh bidang kehidupan manusia baik dalam kehidupan sehari-hari atau untuk organisasi, tidak lepas dari yang namanya teknologi dan informasi. Menurut *Information Technology Association of America (ITAA)* teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan dan manajemen sistem informasi berbasis komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindahkan, dan memperoleh informasi (Martasari, 2017).

Semakin pentingnya Teknologi Informasi (TI) bagi keberhasilan organisasi secara keseluruhan memperluas peran dan fungsi sistem informasi. Adanya penggunaan TI dalam pengelolaan pemerintah, otomatis juga menuntut para aparatur harus mengubah dalam menyelesaikan pekerjaannya dari semula manual menuju komputerisasi. Terjadi perubahan yang terkait dengan laporan-laporan yang harus dibuat para pengelola keuangan (bendahara, pejabat penatausahaan keuangan SKPD, pejabat pelaksana teknis kegiatan) serta diharuskannya proses akuntansi berupa jurnal dan buku besar dalam menghasilkan laporan keuangan masing-masing SKPD. Semakin banyak dan rumitnya tugas para pengelola keuangan daerah, kebutuhan akan penggunaan teknologi informasi adalah suatu keharusan. Maka dengan demikian dapat dipastikan bahwa tugas para pengelola keuangan jauh lebih banyak dan rumit dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Terlaksananya penggunaan teknologi informasi, tugas-tugas para pengelola keuangan daerah akan semakin terbantu dan dapat menghasilkan formulir-formulir maupun laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pimpinan SKPD secara akurat dan tepat waktu. Penggunaan teknologi informasi di dalam pengelolaan keuangan daerah telah diakomodir dalam (BPK, 2006) yang memperkenalkan dipergunakannya

aplikasi komputer dalam mengelola keuangan daerah sehingga dapat menghasilkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Rohiman et al., 2019) bahwa penerapan SIPKD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin efektif penerapan SIPKD maka lebih semakin berkualitas laporan keuangan. Demi mempermudah pengelolaan keuangan daerah, dibuatlah suatu sistem yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor SE.900/984/BAKD tanggal 21 September 2006, Provinsi Nusa Tenggara Timur ditunjuk sebagai salah satu Daerah Media Inkubator atas pelaksanaan SIPKD, dan penerapan sistem ini telah dilaksanakan sejak tahun 2011 pada Badan Keuangan Daerah SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri SE.900/122/BAKD perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan dengan Implementasi SIPKD Regional Sistem Informasi Keuangan Daerah, bahwa tujuan utama kegiatan SIPKD Regional SIKD adalah dalam rangka mengembangkan dan mengimplementasikan Aplikasi Keuangan Daerah berdasarkan kebutuhan dan kondisi daerah sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

Namun secara umum, Badan Keuangan Daerah Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan sesuai dengan prosedur, tetapi dalam kenyataannya SKPD belum bisa membuktikan kebenaran yaitu mampu untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang baik. Padahal dalam sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) merupakan suatu alat yang penting digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah dalam memberikan informasi keuangan yang merupakan bagian dari sistem informasi manajemen pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa masih belum dapat dipastikan penggunaan Aplikasi SIPKD memiliki pengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah atau tidak. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah SETDA Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur”.

KAJIAN TEORI

Technology Acceptance Model (TAM)

Model TAM adalah teori sistem informasi yang memuat model mengenai sikap individu untuk menerima dan menggunakan teknologi. Teori TAM diadopsi dari *Theory of Reasoned Action (TRA)*, yaitu teori yang menjelaskan bahwa persepsi seseorang terhadap sesuatu akan menentukan sikap dan perilaku orang tersebut. TAM pertama kali diperkenalkan oleh Davis pada tahun 1989. Teori ini menjelaskan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi perilaku personal untuk menerima dan menggunakan teknologi. Dua faktor tersebut adalah kemudahan penggunaan (*ease of use*) dan kebermanfaatan (*usefulness*).

1. Persepsi Kemudahan Penggunaan (*Ease of Use Perceived*)

Dalam Davis (1989) disebutkan bahwa “*ease*” artinya “*freedom from difficulty or great effort*”. Selanjutnya “*ease to use perceived*” didefinisikan “*the degree to which a person believes that using a particular system would be free of effort*”. Jika diaplikasikan untuk Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, maka maksudnya pengguna meyakini kalau Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut mudah dalam penggunaannya sehingga tidak memerlukan usaha keras dan akan terbebas dari kesulitan.

2. Persepsi Kebermanfaatan (*Usefulness Perceived*)

Dalam Davis (1989) disebutkan bahwa “*the degree to which a person believes that using a particular system would enhance his or her job performance*”. Hal ini dimaksudkan bahwa pengguna percaya bahwa dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah akan meningkatkan kinerjanya.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dibuat oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri) yang diatur dalam (Peraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2005) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan dilakukan perubahan dua kali, yaitu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Menteri, 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan, 2011 dengan tujuan agar dapat mempercepat transfer data dan efisiensi dalam menyatukan data keuangan daerah. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan seperangkat aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu dalam meningkatkan efektivitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.

Aplikasi SIPKD merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses-proses yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah pada tingkat SKPD.

Jika *heading* anda melebihi satu, gunakan level kedua heading seperti di bawah ini. Pengutipan dilakukan dengan mencantumkan. Nama penulis dan tahun penerbitan mengikuti kalimat. Penomoran harus diberikan pada gambar (gambar, grafik, foto dan peta), tabel dan persamaan matematika berdasarkan urutannya

Hipotesis

Ho: Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Ha: Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pegawai dalam pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT. Sampel diperoleh dengan *purposive sampling* yaitu teknik sampel dengan pertimbangan tertentu, dimana kriteria dalam penelitian ini antara lain: yaitu staf yang terlibat langsung dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Oleh karena jumlah populasi dalam penelitian ini diketahui jumlahnya, maka dalam menentukan sampel dapat digunakan rumus berikut:

$$y = \alpha + \beta x$$
$$\beta = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$
$$\alpha = \frac{\sum y \sum x^2 - \sum x \sum xy}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$R^2 = (0,387)^2 \times 100\%$$
$$= 0,149769 \times 100\%$$
$$= 14,97\% \text{ dibulatkan (15\%)}$$

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengajukan daftar pertanyaan berupa kuesioner kepada responden. Skala yang digunakan dalam pengukuran ini adalah skala likert.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, analisis regresi, uji kualitas, analisis regresi sederhana, dan pengujian hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Badan Keuangan didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Februari 1954 nomor: UP.50/I/39-544 dengan nama Kantor Pejabat Sementara (PS) Kepala Daerah Tingkat 1 NTT yang termasuk didalamnya Bagian Keuangan. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: UP.I/I/ ND tahun 1955 maka terbentuklah Badan Keuangan yang pada saat itu dipimpin oleh W. A. Tomodok Asisten Wedana Golongan E2/PGPN 1955 mantan pegawai keuangan dari kantor Gubernur di Singaraja. Pada saat peneliti melakukan penelitian ini, kepala Badan Keuangan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dipimpin oleh Drs. Zakarias Moruk, MM.

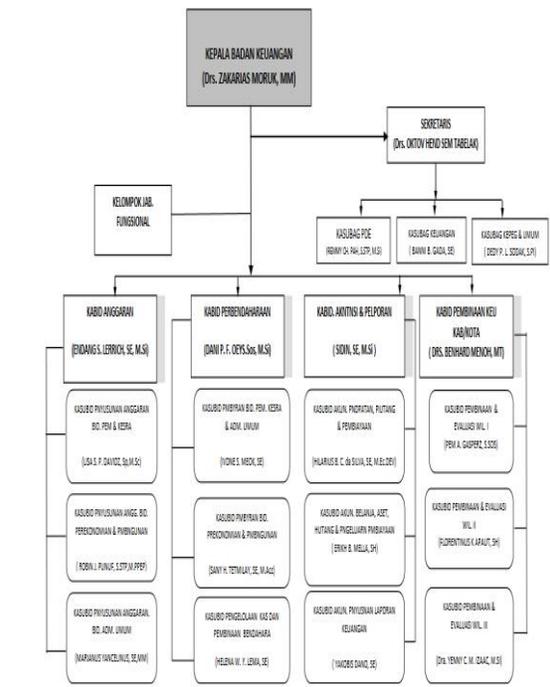
Gambaran Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah

Gambaran Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan,
2. Sekretariat,
3. Bidang Anggaran,
4. Bidang Perbendaharaan,
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan,
6. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten /Kota.

Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah

Adapun struktur organisasi maupun personalia Jabatan Struktural Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur digambarkan sesuai gambar berikut ini:



Gambar 1. Struktur organisasi dan personalia jabatan struktural badan keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Gambaran Umum Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada Kantor Badan Keuangan Daerah Nusa Tenggara Timur, beralamat di jalan El Tari. Jumlah kuesioner yang disebar 43 kuesioner. Jumlah responden ini dinilai cukup memadai sebagai sampel penelitian karena memenuhi persyaratan sampel besar, yaitu lebih dari tiga puluh subjek penelitian.

Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini dikategorikan berdasarkan jenis kelamin dan usia. Kuesioner penelitian ini dibuat dan disebar secara langsung oleh peneliti dan data kuesioner dapat diolah 100%. Demografi responden yang dibahas pada bagian ini mencakup jenis kelamin dan usia responden.

a) Karakteristik responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Pendeskripsian pertama yang dilakukan yaitu dari data jenis kelamin. Jenis kelamin dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 kategori yaitu perempuan dan laki-laki.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Pendeskripsian kedua yang dilakukan yaitu dari data usia. Usia muda berada pada 25 tahun dan usia tua berada pada 55 tahun. Data usia 43 orang responden.

Statistik deskriptif

Penerapan variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah memiliki nilai minimum 47, nilai maksimum sebesar 71 dan nilai rata-rata sebesar 61,28. Variabel kualitas laporan keuangan mempunyai nilai minimum 44, nilai maksimum sebesar 60 dan nilai rata-rata sebesar 56,51. Jawaban responden mengenai kualitas laporan keuangan lebih rendah rata-ratanya dibandingkan dengan penerapan SIPKD sehingga penerapan SIPKD memiliki nilai rata-rata tertinggi. Hal ini menggambarkan bahwa terdapat pengaruh mengenai penerapan sistem pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

hasil dari uji validitas variabel X Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa tidak terdapat butir pernyataan yang tidak valid karena item variabel telah memenuhi syarat validitas dengan memiliki signifikansi $< 0,005$.
2. a. Uji Reabilitas SIPKD

koefisien reliabilitas instrumen Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X) memenuhi syarat untuk reliabilitas karena memiliki korelasi $>$ dari 0,60 atau di atas 60% dengan menunjukkan *cronbach alpha* sebesar 0,894.

b. Uji Reabilitas Kualitas Laporan Keuangan

koefisien reliabilitas instrumen Kualitas Laporan Keuangan (Y) memenuhi syarat untuk reliabilitas karena memiliki korelasi $>$ dari 0,60 atau di atas 60% dengan menunjukkan *cronbach alpha* sebesar 0,956.
3. Uji t

Perumusan Hipotesis

Ho: Tidak Ada Pengaruh Antara Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ha: Ada Pengaruh Antara Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

a) Penetapan Kriteria

Besarnya nilai t tabel untuk taraf signifikan 5% db = 41 (db = N – 2 untuk N =43) yaitu 1,68288.

b). Hasil t hitung

Hasil t hitung diperoleh dengan menggunakan SPSS 26.0 *for windows* yaitu sebesar 2,686.

c) Pengambilan Keputusan

Jika t hitung lebih besar dari t table maka Ha diterima dan Ho ditolak. Dari hasil perhitungan t hitung sebesar 2,686 di atas dibandingkan dengan t tabel (db = 41) yaitu 1,68288 taraf signifikan 5%, jadi t hitung > t tabel maka Ha diterima dan Ho ditolak. Dengan kata lain menolak hipotesis nol (Ho) dan menerima hipotesis alternatif (Ha) untuk pengujian kedua variabel.

d) Kesimpulan

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X terdapat pengaruh terhadap variabel Y. Dari hasil pengujian hipotesis tersebut terbukti bahwa “Ada Pengaruh Antara Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur”.

4. Koefisien Determinan (R^2)

Setelah r hitung diketahui sebesar 0,387 maka selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y dengan menggunakan koefisien determinan r^2 yang dinyatakan dalam persentase.

Hasilnya sebagai berikut:

$$R^2 = (0,387)^2 \times 100\%$$

$$= 0,149769 \times 100\%$$

$$= 14,97\% \text{ dibulatkan (15\%)}$$

besarnya nilai korelasi atau hubungan (R) sebesar 0,387 dan dijelaskan besarnya

prosentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut dengan koefisien determinasi yang merupakan hasil pengkuadratan r, dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R^2 sebesar 0,150 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah) terhadap variabel terikat (Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur) adalah sebesar 15% dan selebihnya yang 85% dipengaruhi oleh faktor lain seperti Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertanggung jawab menjalankan sistem tersebut.

Pembahasan Hasil Penelitian

Tugas Pokok dari sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan selalu dimulai dari Perencanaan, mengorganisir sampai dengan memimpin dan mengendalikan. Asumsi selanjutnya adalah apabila fungsi-fungsi tersebut dijalankan dengan semestinya maka sasaran yang ingin dicapai SKPD tersebut akan tercapai tanpa banyak mengalami kesulitan. Dalam hubungan ini maka terdapat satu aspek yang penting yaitu perlunya suatu sistem pendukung yang memungkinkan semua fungsi pengelolaan khususnya perencanaan, pengendalian serta pertanggungjawaban berjalan dengan baik artinya tercipta sinkronisasi antara satu dengan yang lain. Sistem pendukung dimaksud adalah Sistem Informasi Manajemen (SIM). Semakin besar dan kompleks lingkup kerja suatu organisasi semakin dirasakan perlunya sistem pendukung tersebut agar pengelolaan dapat berlangsung secara efektif dan efisien Sistem dimaksud juga harus mampu memproses dan mengkomunikasikan berbagai informasi yang berkaitan dengan Perencanaan, Pengendalian, Implementasi di lapangan dan pertanggungjawaban kepada mereka yang berkepentingan yaitu untuk Pimpinan untuk bahan pengambilan keputusan. Dewasa ini, Pemerintah terus menerus memperbaharui diri terkait dengan pelayanan kepada masyarakat sehingga Sistem Informasi sangat diperlukan dan menjadi pertimbangan bagi Pimpinan

dalam pengambilan keputusan. Terkait dengan Sistem Informasi Manajemen yang menjadi topik pada SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menggunakan suatu sistem informasi yakni Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Sistem ini diadakan oleh Departemen Dalam Negeri untuk membantu Daerah dalam rangka penerapan BPK, 2006 yakni membangun dan mengembangkan perangkat lunak (*software*) Aplikasi dan perangkat pendukung lainnya yang memiliki akurasi yang tinggi dan mudah digunakan sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka Tugas Pokok Badan Keuangan adalah membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan Pemerintahan di bidang keuangan. Untuk membangun kinerja sebagaimana rumusan tugas pokok tersebut diatas maka kebijakan di bidang keuangan tersebut adalah Penyusunan Anggaran Daerah, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD di mana dalam pelaksanaannya bersifat Aspiratif, Transparan, Akuntabel dan Tepat Waktu serta Berdaya Guna dan Berhasil Guna. Kesemuanya itu diramu dalam kegiatan prioritas yang harus segera dilaksanakan yakni membangun kompetensi utama administrasi publik yang mampu menjawab tantangan isu-isu yang berkembang di masyarakat sehingga Terwujudnya tertib pengelolaan administrasi keuangan daerah yang transparan, akuntabel, represif dan berorientasi pada kepentingan publik guna peningkatan pelayanan prima yang didukung oleh aparat pengelola keuangan yang profesional agar dapat meningkatkan tertib administrasi keuangan, meningkatkan kualitas SDM, serta peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Seiring dengan penerapan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menuntut laporan keuangan daerah yang semakin variatif dan informatif yang bersifat desentralisasi ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), adapun kewajiban pelaporan yang harus disiapkan di daerah seperti APBD beserta Ringkasan dan Penjabaran. Dalam hal ini, guna mendukung

proses pengelolaan keuangan daerah yang baik dan efektif, peranan sistem informasi dan penataan manajemen perlu dilakukan. Peranan sistem informasi berbasis komputer didukung dengan pelatihan SDM yang terkait merupakan solusi permasalahan diatas. Selain menjadi solusi permasalahan, peranan teknologi informasi juga dapat mempersingkat waktu pekerjaan dengan hasil yang akurat atau valid. Oleh karena itu dibuat suatu sistem yaitu SIPKD yang merupakan seperangkat Sistem Aplikasi yang terintegrasi, yang digunakan sebagai alat bantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas implementasi berbagai regulasi bidang Pengelolaan Keuangan Daerah yang didasarkan asas Efisiensi, Ekonomis, Transparan, Efektivitas dan Akuntabilitas. Berdasarkan SE. Mendagri Nomor 900/984/BAKD Tanggal 21 September 2006, Provinsi NTT ditunjuk sebagai salah satu Daerah Media Inkubator atas pelaksanaan SIPKD, dan penerapan sistem ini telah dilaksanakan sejak tahun 2011 pada Badan Keuangan SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan seperangkat aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu dalam meningkatkan efektivitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Asas-asas ini sejalan dengan indikator kualitas laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan mudah dipahami. Adanya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah SETDA Pemerintah Provinsi NTT sudah dapat membantu dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. Berdasarkan pengujian hipotesis, hasil menunjukkan bahwa terdapat pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, SIPKD sangat mempengaruhi dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat.

SIPKD meningkatkan kualitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah maka sangat

ditunjang oleh faktor peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penyempurnaan sistem yang berjalan sehingga SIPKD berjalan secara efektif dan efisien serta menghasilkan laporan informasi keuangan dengan akurat dan tepat waktu. Berdasarkan teori TAM pada sikap individu terdapat dua faktor untuk menerima dan menggunakan teknologi, yang pertama kemudahan penggunaan (*easy of use*) dan kebermanfaatan (*usefulness*). Kemudahan penggunaan, maksudnya pengguna meyakini kalau sistem informasi pengelolaan keuangan daerah tersebut mudah dalam penggunaannya sehingga tidak memerlukan usaha keras dan akan terbebas dari kesulitan. Kebermanfaatan ini membentuk suatu kepercayaan untuk pengambilan keputusan apakah jadi menggunakan sistem informasi ini atau tidak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Subekti, dkk (2016), Yusup (2016), Widayanti (2019), Effendi (2019) dan Prabowo (2019) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh dari Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang menunjukkan jika program Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) telah diterapkan dengan baik maka akan dihasilkan laporan keuangan yang efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, auditabel, akurat dan tepat waktu. Oleh karena itu dibuat suatu sistem yaitu SIPKD yang merupakan seperangkat Sistem Aplikasi yang terintegrasi, yang digunakan sebagai alat bantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas implementasi berbagai regulasi bidang Pengelolaan Keuangan Daerah yang didasarkan asas Efisiensi, Ekonomis,

Transparan, Efektivitas dan Akuntabilitas. Berdasarkan SE. Mendagri Nomor 900/984/BAKD Tanggal 21 September 2006, Provinsi NTT ditunjuk sebagai salah satu Daerah Media Inkubator atas pelaksanaan SIPKD, dan penerapan sistem ini telah dilaksanakan sejak tahun 2011 pada Badan Keuangan SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan seperangkat aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu dalam meningkatkan efektivitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Asas-asas ini sejalan dengan indikator kualitas laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan mudah dipahami. Adanya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah SETDA Pemerintah Provinsi NTT sudah dapat membantu dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. Berdasarkan pengujian hipotesis, hasil menunjukkan bahwa terdapat pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, SIPKD sangat mempengaruhi dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat.

SIPKD meningkatkan kualitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah maka sangat ditunjang oleh faktor peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penyempurnaan sistem yang berjalan sehingga SIPKD berjalan secara efektif dan efisien serta menghasilkan laporan informasi keuangan dengan akurat dan tepat waktu. Berdasarkan teori TAM pada

Saran

1. Diharapkan bagi Badan Keuangan Daerah Setda Pemerintah Provinsi NTT lebih meningkatkan kinerja pegawai dengan memperkuat *computer attitude*, dengan memberikan pengarahan untuk pegawainya dapat menerima teknologi

- (menggunakan komputer) sehingga meningkatkan kemampuan pegawai dalam menggunakan komputer dan sistem yang ada dengan memberikan pelatihan-pelatihan, karena dengan penerimaan atau penggunaan teknologi dapat meningkatkan kemampuan agar dapat membantu dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan hasil kerja yang berkualitas, tepat waktu dan efektif dengan cara yang mudah dan tidak menemui kesulitan ataupun kendala.
2. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat menggunakan metode kualitatif agar dapat dengan jelas menggambarkan dengan lengkap menemukan informasi terkait pengaruh penerapan SIPKD dapat menggunakan variabel lain selain SIPKD seperti pengendalian intern, Sumber Daya Manusia (SDM), dan kinerja pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

- BPK. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 1–73. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006>
- Martasari, N. (2017). Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pegawai Pada Organisasi Perangkat Daerah (Pemerintah Kabupaten Gresik). *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember, Jawa Timur*.
- Mursyidi. (2009). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Menteri*. (2007). 1–13.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 *Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan*. (2011).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*. (N.D.). https://www.fairportlibrary.org/images/files/RenovationProject/Concept_cost_estimate_accepted_031914.pdf
- Peraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2005. (2005). *Tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah. 09 Desember*, 105. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49730/pp-no-58-tahun-2005>
- Rohiman, A., Prijanto, D., Prabowo, A., Ratdomopurbo, A., Setiawan, R., Effendi, M., & Wahyudi, E. (2019). Geochemical Characteristics of Volcanic Rocks from Mt. Masurai's Caldera, Jambi, Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series*, 1204(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1204/1/012070>
- Yusup Maulana. (2016). Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Bandung. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship*, 10(2), 149–160.

PERAN DAN PENGARUH DARI PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN GENDER TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Renta Yustie

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
rentayustie@uwks.ac.id

Ricky Angga Ariska

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
rickyanggaariska@uwks.ac.id

Fadilla Purwitasari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
fadilla_purwitasari@uwks.ac.id

ABSTRAK

Gender menjadi salah satu isu dan permasalahan terkini di Provinsi Kalimantan Utara. Menitikberatkan pada peran dan fungsi perempuan di masyarakat dan pemerintahan dalam kontribusinya ke perekonomian daerah. Peran dan fungsi perempuan diukur dengan keterlibatan di parlemen, tenaga profesional, pendapatan dan pengeluaran perempuan secara per kapita serta pembangunan gender yang seimbang terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder bersumber dari BPS Provinsi Kalimantan Utara. Sampel penelitian menggunakan 5 kabupaten / kota di Provinsi Kalimantan Utara yaitu Kab. Malinau, Kab. Bulungan, Kab. Tana Tidung, Kab. Nunukan, Kota Tarakan. Metode penelitian menggunakan metode panel dengan kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2020, dengan model regresi berganda. Alat analisis yang digunakan untuk menghitung data penelitian adalah Eviews 10 dan SPSS 25. Nilai alfa dalam penelitian sebesar 5 % atau 0,05 dan hasilnya semua variabel bebas dalam penelitian mampu mempengaruhi variabel terikat.

Kata kunci : pertumbuhan ekonomi, parlemen, tenaga profesional, pendapatan per kapita, pengeluaran per kapita, indeks pembangunan gender.

ABSTRACT

Gender is one of the current issues and problems in North Kalimantan Province. Focuses on the role and function of women in society and government in their contribution to the regional economy. The role and function of women is measured by involvement in parliament, professional staff, income and expenditure of women on a per capita basis as well as gender balanced development towards economic growth in North Kalimantan Province. This research is a quantitative research with secondary data sourced from BPS North Kalimantan Province. The research sample uses 5 districts / cities in North Kalimantan Province, namely Kab. Malinau, Kab. Bulungan, Kab. Tana Tidung, Kab. Nunukan, Tarakan City. The research method uses the panel method with a period of 2018 to 2020, with a multiple regression model. The analytical tools used to calculate the research data were Eviews 10 and SPSS 25. The alpha value in the study was 5% or 0.05 and the result was that all independent variables in the study were able to influence the dependent variable.

Keywords : Economic Growth, Parliament, Professional Staff, Income per Capita, Expenditure per Capita, Gender Development Index.

PENDAHULUAN

Pemberdayaan dan pembangunan gender diperlukan sebagai alat untuk evaluasi dan mengetahui kualitas sumberdaya manusia dan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pembangunan kualitas manusia dan pembangunan perekonomian daerah pada suatu wilayah (Setiati *et al.*, 2020). Nilai kualitas manusia dapat berubah terutama dengan proses yang berkembang pesat dari globalisasi dan kesetaraan yang melanda kehidupan dengan intensitas dan cakupan yang semakin meningkat (Azzahra and Aushafina, 2018) Nilai dalam perekonomian daerah dinyatakan dengan pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dengan peran aktif penduduk dan sektor perekonomian di daerah tersebut. Peran penduduk perempuan dalam perekonomian menjadi hal yang diprioritaskan karena minim keterlibatan perempuan dalam pembangunan perekonomian akibat dari adanya budaya dan diskriminasi gender (Setiati *et al.*, 2020) Peran perempuan dalam pembangunan dan pemberdayaan gender yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah berupa keterlibatan dalam parlemen, keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional, pendapatan dan pengeluaran per kapita perempuan khususnya di Kalimantan (BPS Kalimantan Utara, 2021).

Kalimantan Utara menata diri untuk membangun perekonomian secara kompetitif dan berkelanjutan, pembangunan ekonomi daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa diikuti oleh distribusi pendapatan yang merata dan adanya ketimpangan gender justru akan menimbulkan masalah sosial baru. Mencapai tujuan dan sasaran pembangunan perekonomian dan gender dibutuhkan suatu perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang terarah, terukur, dan efektif sesuai dengan kondisi, permasalahan, potensi dan kebutuhan daerah. Penelitian ini memiliki fokus daerah di Provinsi Kalimantan Utara meliputi 5 (lima) kabupaten dan kota yaitu Kab. Malinau, Kab. Bulungan, Kab. Tana Tidung, Kab. Nunukan, Kota Tarakan karena merupakan daerah perbatasan negara Indonesia dengan Malaysia dan sebagai provinsi termuda di Indonesia serta berkembangnya pola patriarki menyebabkan rawan terjadi ketimpangan gender dalam pembangunan perekonomian daerah.

Pengamatan yang lebih mendalam maka persoalan gender dalam dimensi pembangunan ekonomi adalah sinyal kuat bahwa masalah sosial yang berhubungan dengan gender tidak cukup dihadapkan pada penyelesaian secara struktural, namun perlu lebih diimbangi dengan pendekatan kultural (Hannan, 2018). Pandangan terhadap gender secara struktural berupa aktualisasi nilai demokrasi yang menjadi pintu gerbang terpenuhinya hak sosial masyarakat secara adil dan seimbang, lain halnya dengan pandangan terhadap gender secara kultural maka problem gender muncul dari dimensi sosial masyarakat lokal yang masih berdampak dengan nilai kebudayaan bias gender seperti patriarki, feodalisme dan pola hubungan sosial masyarakat yang menjunjung tinggi konsep hierarki (Hannan, 2018). Kesetaraan laki dan perempuan menjadi perdebatan, meskipun kerangka regulasi telah cukup mengalami perbaikan, namun kritik terhadap persoalan gender masih menguat, perempuan memang mengalami kemajuan dan perbaikan taraf hidup tetapi di banyak hal lain perempuan masih mengalami ketimpangan dan diskriminasi (Alfirdaus, 2019). Diskriminasi gender terjadi akibat adanya sistem sosial dimana salah satu jenis kelamin (laki-laki maupun perempuan) menjadi korbannya (BKKBN, 2007). Fakta diskriminasi gender sudah menjadi masalah klasik dan berkelanjutan hampir di seluruh belahan dunia (Setiati *et al.*, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh dari pemberdayaan dan pembangunan gender secara parsial dan simultan terhadap perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Utara.

KAJIAN TEORI

Teori Pemberdayaan Gender oleh BPS dan ILO

Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan, gender sebagai pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab dan pembagian kerja antara laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat (BPS Kalimantan Utara, 2021). Keadilan gender terjadi jika suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki setara, serasi, seimbang dan

harmonis maka menjadi suatu bentuk pemberdayaan gender di masyarakat, indikator pemberdayaan gender menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik (BPS Kalimantan Utara, 2021). Relasi gender di seluruh dunia dicirikan oleh relasi yang tidak setara dan tidak seimbang antara kedua jenis (Haspels and Suriyasari, 2005). Terdapat perbedaan dalam akses pendidikan dan pelatihan antara laki dan perempuan serta beban kerja antara laki dan perempuan dewasa, akses dan kontrol terhadap manfaat, keuntungan, sumberdaya serta dalam peran pengambilan keputusan (Haspels and Suriyasari, 2005)).

Teori Pembangunan Gender oleh BAPPENAS

Upaya pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) dalam setiap pengambilan keputusan merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar lagi. Usaha meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparat tentang kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi pengarusutamaan gender sangat penting dan mendesak. Strategi tersebut perlu diwujudkan ke dalam setiap pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan, termasuk dalam program-program pembangunan ekonomi, sehingga upaya pembangunan ekonomi dan sosial yang berperspektif gender dapat terwujud (Women's Support Project (Indonesia), 2001)

Terdapat 2 (dua) langkah intervensi untuk mengurangi kesenjangan gender dan pembangunan gender, pertama, pengembangan kebijakan yang spesifik perempuan (*women specific policies, laws and programs*), kedua, perencanaan yang responsif gender dengan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan umum yang telah ada (*gender responsive design of/or adjustment to general policies, laws and programs*) sehingga tidak menghasilkan diskriminasi (Indonesia 2001). Langkah yang diambil antara lain dengan melakukan pengarusutamaan gender melalui perumusan kebijakan yang sudah ada namun belum berperspektif gender, termasuk undang-undang dan peraturan-peraturan. Langkah lainnya adalah melakukan sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender, termasuk isu-isu yang perlu diperhatikan serta keahlian teknik analisis gender, perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan menghasilkan program pembangunan yang responsif gender (Women's Support Project (Indonesia), 2001)

Teori Pertumbuhan Ekonomi Endogen

Terdapat 3 model teori pertumbuhan endogen yaitu: (i). Model yang fokus pada modal fisik dan perubahan teknologi, (ii). Model yang fokus pada modal manusia (*human capital*) melalui pendidikan formal, (iii). Model yang fokus pada modal manusia (*human capital*) melalui pendidikan informal / *learning by doing* (torado 2006). Teori pertumbuhan endogen mempunyai beberapa pemikiran dasar yaitu: (i). Adanya perubahan teknologi yang bersifat endogen melalui sebuah proses akumulasi ilmu pengetahuan, (ii). Adanya penciptaan ide-ide baru oleh perusahaan sebagai akibat dari mekanisme luberan pengetahuan (*knowledge spillover*), (iii), Produksi barang-barang konsumsi yang dihasilkan oleh faktor produksi ilmu pengetahuan akan tumbuh tanpa batas (Arsyad, 2020).

Teori pertumbuhan endogen memperhatikan penduduk sebagai modal manusia (*human capital*), jumlah penduduk yang besar bisa dimanfaatkan untuk menjalankan proses perekonomian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kualitas penduduk mempengaruhi peran penduduk dalam perekonomian, kualitas penduduk bisa dianalisis melalui pendidikan dan kesehatan. Penduduk berperan sebagai tenaga kerja terampil dan ahli dalam perekonomian. Namun aspek paling menarik dari model pertumbuhan endogen adalah bahwa model membantu menjelaskan keanehan aliran modal internasional yang meningkatkan ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang (Todaro, 2006). Potensi tingkat pengembalian atas investasi yang tinggi yang ditawarkan oleh negara berkembang yang mempunyai rasio modal-tenaga kerja yang rendah berkurang dengan cepat dikarenakan rendahnya tingkat investasi komplementer (*complementary investments*) (Todaro, 2006). Dalam hal ini meliputi sumberdaya manusia (pendidikan dan kesehatan), infrastruktur, riset dan pengembangan (Riset dan Development/ RD).

Penelitian Sebelumnya

Kontur dan efektivitas mobilisasi feminis, di mana saja baik tingkat lokal, nasional, regional atau global bergantung pada tiga kunci pendorong: (1). isu dan lingkungan, (2). institusi dan (3). proses pembentukan gerakan (Sen, 2019). Perempuan memiliki akses pekerjaan dapat meningkatkan status sosial di masyarakat dan kekuatan tawar menawar dalam rumah tangga atas pengeluaran pendapatan tetapi tidak banyak mengubah norma gender yang membatasi, seperti kurangnya suara perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga adat atau keagamaan, beban perawatan rumah tangga perempuan, kerentanan perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (Carnegie, M., & Singh-Peterson, 2019). Sehubungan dengan ketidaksetaraan gender di seluruh kategori negara maka Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa dari waktu ke waktu adalah mengaitkan kesenjangan ketidaksetaraan gender dengan budaya dan konteks dalam menyoroti peran yang dimainkan oleh masalah sosial dan lingkungan dapat mempengaruhi ketidaksetaraan gender lintas negara dan lintas waktu (Eden, L., & Gupta, 2017). Terlepas dari komitmen internasional yang sudah berlangsung lama dan manfaat yang ditunjukkan dari mengatasi ketidaksetaraan gender, memberlakukan undang-undang dalam patriarki atau didominasi laki-laki, budaya tetap menjadi tantangan yang signifikan (Makinde *et al.*, 2017) . Nilai kualitas manusia dapat berubah terutama dengan proses yang berkembang pesat dari globalisasi dan kesetaraan yang melanda kehidupan dengan intensitas dan cakupan yang semakin meningkat (Azzahra and Aushafina, 2018)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data kuantitatif dengan jenis data sekunder. Sumber data yang digunakan di penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Utara. Populasi dalam

penelitian ini yaitu Provinsi Kalimantan Utara dengan sampel terdiri dari Kab. Malinau, Kab. Bulungan, Kab. Tana Tidung, Kab. Nunukan, Kota Tarakan yang semuanya sekaligus sebagai *cross section*. Tahun penelitian ini yaitu tahun 2018 sampai dengan 2020 sebagai *Time Serries*. Variabel penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel yaitu (1). Variabel bebas atau *independent variable* dan (2). Variabel terikat/tergantung/tidak bebas atau *dependent variable*. Variabel bebas atau *independent variable* terdiri dari keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, pendapatan perempuan, pengeluaran per kapita perempuan, indeks pembangunan gender. Variabel terikat/tergantung/tidak bebas atau *dependent variable* terdiri dari pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini menggunakan model ekonometrika regresi linier berganda model analisis data panel. Model analisis dalam penelitian ini adalah:

$$PE_{it} = \beta_0 + \beta_1 KPP_{it} + \beta_2 PTP_{it} + \beta_3 SPP_{it} + \beta_4 PPP_{it} + \beta_5 IPG_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots (1)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Model estimasi persamaan regresi data panel untuk penelitian ini menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) dengan hasil regresi pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Estimasi Persamaan Regresi Data Panel *Fixed Effect Model* (FEM)

Variabel	Koefisien	T-hitung	T-tabel	Probabilitas	A	Keterangan
KPP	-0.184535	-1.717770	1.81246	0.1465	0.05	Tidak Signifikan
PTP	0.003738	0.032905	1.81246	0.9750	0.05	Tidak Signifikan
SPP	-7.681531	-2.834871	1.81246	0.0365	0.05	Signifikan
PPP	0.016468	2.933659	1.81246	0.0325	0.05	Signifikan
IPG	-1.199203	-0.472953	1.81246	0.6562	0.05	Tidak Signifikan

Sumber: Diolah oleh penulis, *Eviews 10, 2022*

Variabel bebas terdiri dari keterlibatan perempuan di parlemen (KPP), perempuan sebagai tenaga profesional (PTP) dan indeks pembangunan gender (IPG) masing-masing tidak signifikan yang dinyatakan nilai probabilitas lebih besar dibandingkan dengan nilai alfa sebesar 5%

atau 0,05 sehingga menyatakan bahwa tidak memberikan pengaruh terhadap variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi. Sedangkan variabel bebas sumbangan pendapatan perempuan (SPP) dan pengeluaran per kapita perempuan (PPP) masing-masing signifikan yang dinyatakan nilai probabilitas lebih kecil dibandingkan dengan nilai alfa sebesar 5% atau 0,05 sehingga menyatakan memberikan pengaruh ke variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi.

Variabel bebas terdiri dari keterlibatan perempuan di parlemen (KPP), sumbangan pendapatan perempuan (SPP) dan indeks pembangunan gender (IPG) masing-masing memiliki nilai koefisien negatif artinya berbanding terbalik atau tidak berbanding searah dan tidak berbanding lurus terhadap variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi. Variabel bebas terdiri dari perempuan sebagai tenaga profesional (PTP) dan pengeluaran per kapita perempuan (PPP) masing-masing memiliki nilai koefisien positif yang artinya berbanding lurus atau berbanding searah terhadap variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2. Hasil Uji Adjusted R²

Kriteria	Nilai
<i>R-squared</i>	0.948860
<i>Adjusted R-squared</i>	0.856807

Sumber: Diolah oleh penulis, Eviews 10, 2022

Nilai *Adjusted R²* sebesar 0.856807 memiliki arti variabel bebas (*independent*) terdiri keterlibatan perempuan di parlemen (KPP), perempuan sebagai tenaga profesional (PTP), sumbangan pendapatan perempuan (SPP), pengeluaran per kapita perempuan (PPP) dan indeks pembangunan gender (IPG) secara bersama (*simultan*) mampu menjelaskan terhadap variabel terikat (*dependent*) yaitu pertumbuhan ekonomi dan sisanya sebesar 0,143193 dijelaskan oleh faktor lain di luar variabel dalam model persamaan regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini. Nilai *Adjusted R²* berada pada kisaran angka 0 (nol) sampai dengan 1 (satu), jika nilainya semakin mendekati angka 1 maka semakin baik dan sebaliknya.

Hasil uji F-Statistik model persamaan regresi data panel dalam penelitian ini terdapat di Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji F-Statistik

Kriteria	Nilai
----------	-------

F-statistic	10.30778
F-tabel	3.33
Prob. F-statistic	0.009676
α 5%	0.05

Sumber: Diolah oleh penulis, Eviews 10, 2022

Hasil uji F-Statistik memiliki nilai probabilitas *F-statistic* sebesar 0,009676 yang nilainya lebih kecil dari nilai alfa 5% atau 0,05. Menjelaskan bahwa secara simultan semua variabel bebas (*independent*) yaitu keterlibatan perempuan di parlemen (KPP), perempuan sebagai tenaga profesional (PTP), sumbangan pendapatan perempuan (SPP), pengeluaran per kapita perempuan (PPP) dan indeks pembangunan gender (IPG) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (*dependent*) yaitu pertumbuhan ekonomi. Hal ini diperkuat dengan nilai *F-statistic* hitung sebesar 10,30778 yang lebih besar dari nilai F-tabel sebesar 3,33.

Hasil uji T-Statistik model persamaan regresi data panel dalam penelitian ini.

Tabel 4. Hasil Uji T-Statistik

Variabel	Koefisien	T-hitung	T-tabel
KPP	-0.184535	-1.717770	1.81246
PTP	0.003738	0.032905	1.81246
SPP	-7.681531	-2.834871	1.81246
PPP	0.016468	2.933659	1.81246
IPG	-1.199203	-0.472953	1.81246

Sumber: Diolah oleh penulis, Eviews 10, 2022

Hasil uji T-Statistic untuk variabel bebas (*independent*) yaitu keterlibatan perempuan di parlemen (KPP), perempuan sebagai tenaga profesional (PTP), sumbangan pendapatan perempuan (SPP) dan indeks pembangunan gender (IPG) adalah signifikan karena nilai T-hitung kurang dari alfa 5% atau 0,05.

Hal ini menyatakan secara parsial masing-masing dari variabel bebas (*independent*) yaitu keterlibatan perempuan di parlemen (KPP), perempuan sebagai tenaga profesional (PTP), sumbangan pendapatan perempuan (SPP) dan indeks pembangunan gender (IPG) dengan nilai yang signifikan ini berpengaruh terhadap variabel terikat (*dependent*) yaitu pertumbuhan ekonomi.

Hasil uji T-Statistic untuk variabel bebas (*independent*) yaitu pengeluaran per kapita perempuan (PPP) tidak signifikan karena nilai T-hitung lebih besar dari alfa 5% atau 0,05. Variabel

bebas (*independent*) pengeluaran per kapita perempuan (PPP) secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (*dependent*) yaitu pertumbuhan ekonomi.

Hasil uji asumsi klasik dalam penelitian ini adalah.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Kriteria	Nilai
Durbin-Watson	3.232116
Nilai d_L	0.5620
Nilai d_U	2.2198

Sumber: Diolah oleh penulis, Eviews 10, 2022

Tabel 5 di atas menunjukkan tidak terjadi gejala autokorelasi karena nilai Durbin-Watson lebih besar dari nilai d_U , sehingga bebas dari gejala autokorelasi.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas

	PE	KPP	PTP	SPP	PPP	IPG
PE	1	-0.2831892...	0.18752745...	0.12888618...	0.21160658...	0.19676715...
KPP	-0.2831892...	1	0.04856834...	0.42588010...	-0.5028601...	-0.4744629...
PTP	0.18752745...	0.04856834...	1	0.07548418...	0.51212599...	0.51404280...
SPP	0.12888618...	0.42588010...	0.07548418...	1	0.03600547...	0.09125023...
PPP	0.21160658...	-0.5028601...	0.51212599...	0.03600547...	1	0.98979453...
IPG	0.19676715...	-0.4744629...	0.51404280...	0.09125023...	0.98979453...	1

Sumber: Diolah oleh penulis, Eviews 10, 2022

Tabel 6 menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala Multikolinieritas karena semua variabel bebas (*independent*) terdiri dari keterlibatan perempuan di parlemen (KPP), perempuan sebagai tenaga profesional (PTP), sumbangan pendapatan perempuan (SPP), pengeluaran per kapita perempuan (PPP) dan indeks pembangunan gender (IPG) serta variabel terikat (*dependent*) yaitu pertumbuhan ekonomi memiliki nilai dibawah 0,8 sehingga bebas dari gejala Multikolonieritas.

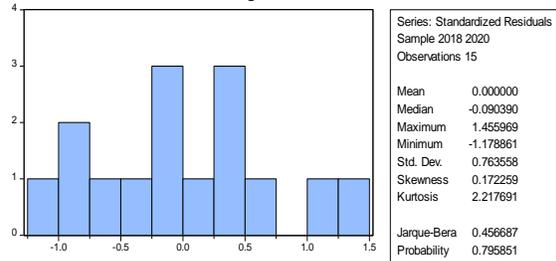
Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	9.112	22.225		.410	.691
	KPP	.158	.072	.824	2.202	.055
	PTP	-.089	.073	-.397	-1.225	.252
	SPP	-.010	.195	-.016	-.051	.960
	PPP	.001	.001	1.535	.806	.441
	IPG	-.188	.496	-.721	-.379	.713

Sumber: Diolah oleh penulis, SPSS 25, 2022

Tabel 7 diatas Uji Heteroskedastisitas menggunakan SPSS dengan hasil yang didapatkan adalah nilai signifikansi (Sig.), jika nilai Sig. lebih besar dari 0.05, maka kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas



Sumber: Diolah oleh penulis, Eviews 10, 2022

Tabel 8 menunjukkan nilai probability hitung sebesar 0,795851 lebih besar dari nilai alfa sebesar 5% atau 0,05, sehingga menjelaskan bahwa data terdistribusi normal sehingga memiliki sifat normalitas.

Hasil model estimasi regresi data panel dalam penelitian ini adalah.

$$PE_{it} = 178.5043 - 0.184535KPP_{it} + 0.003738PTP_{it} - 7.681531SPP_{it} + 0.016468PPP_{it} - 1.199203IPG_{it} + \epsilon_{it} \dots\dots\dots (2)$$

Pembahasan

Variabel bebas (*independent*) keterlibatan perempuan di parlemen (KPP) berpengaruh tidak signifikan dengan nilai probabilitas hitung sebesar 0.1465 pada tingkat alfa 5% atau 0,05 serta memiliki nilai koefisien sebesar -0.184535 sehingga memiliki hubungan yang tidak searah. Kondisi tidak signifikan ini menjelaskan bahwa bertambahnya 1 orang perempuan yang terlibat di parlemen maka tidak menyebabkan kenaikan dan tidak bertambahnya pengaruh ke pertumbuhan ekonomi. Hubungan koefisien negatif yang menyatakan hubungan tidak searah justru berseberangan dengan teori yang digunakan. Berdasarkan teori justru bertambahnya keterlibatan aktif perempuan di parlemen maka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membantu perekonomian daerah menjadi maju.

Partisipasi perempuan Indonesia dalam parlemen masih sangat rendah. Data dari World

Bank (2019) , negara Indonesia menduduki peringkat ke-7 se-Asia Tenggara untuk keterwakilan perempuan di parlemen. Secara khusus di Provinsi Kalimantan Utara peran serta perempuan dalam pembangunan, partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan dan lembaga legislatif masih perlu ditingkatkan. Sebagai wujud keterlibatan perempuan dalam pembangunan perekonomian dan sebagai sarana untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Keterwakilan perempuan serta partisipasi dan kualitas perempuan dalam bidang politik dapat meningkat untuk mendukung pembangunan dan perekonomian Provinsi Kalimantan Utara agar meningkatkan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender di kabupaten dan kota.

Variabel bebas (*independent*) perempuan tenaga profesional (PTP) berpengaruh tidak signifikan dengan nilai probabilitas hitung sebesar 0.9750 pada tingkat alfa 5% atau 0,05 serta memiliki nilai koefisien sebesar 0.003738 sehingga memiliki hubungan yang searah. Kondisi tidak signifikan ini menjelaskan bahwa bertambahnya 1 orang perempuan yang bekerja sebagai tenaga profesional maka tidak menyebabkan kenaikan dan tidak bertambahnya pengaruh ke pertumbuhan ekonomi. Hubungan koefisien positif yang menyatakan hubungan searah justru mendukung dengan teori yang digunakan. Berdasarkan teori maka bertambahnya perempuan yang bekerja sebagai tenaga profesional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membantu perkembangan perekonomian daerah.

Sebanyak 110.213 orang penduduk perempuan di Provinsi Kalimantan Utara tercatat dalam kondisi bekerja pada berbagai sektor ekonomi. Jumlah penduduk perempuan yang bekerja sebesar 45,37 % dari total penduduk perempuan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Penduduk perempuan yang bekerja rata-rata berusia 25 sampai 59 tahun di angka 54,40 %, sedangkan 30,47 % penduduk perempuan yang bekerja berasal dari usia 15 sampai 24 tahun, sisanya 25,43 % lainnya berusia 60 tahun ke atas. Secara umum pekerja muda merupakan pekerja yang masih dalam usia sekolah atau baru saja menyelesaikan pendidikan, sehingga pekerja muda masih membutuhkan banyak pengalaman di dunia kerja. Faktor ekonomi dan sosial menjadi penyebab pekerja muda untuk memasuki dunia kerja. Berasal

dari faktor ekonomi maka keluarga yang berasal dari golongan ekonomi ke bawah bisa menjadi dorongan seseorang untuk langsung bekerja di usia muda.

Variabel bebas (*independent*) sumbangan pendapatan perempuan (SPP) berpengaruh signifikan dengan nilai probabilitas hitung sebesar 0.0365 pada tingkat alfa 5% atau 0,05 serta memiliki nilai koefisien sebesar -7.681531 sehingga memiliki hubungan yang tidak searah. Kondisi signifikan ini menjelaskan bahwa bertambahnya 1 rupiah sumbangan pendapatan perempuan yang bekerja maka menyebabkan kenaikan dan bertambahnya pengaruh ke pertumbuhan ekonomi. Hubungan koefisien negatif yang menyatakan hubungan tidak searah tidak sejalan dengan teori yang digunakan. Berdasarkan teori maka bertambahnya perempuan yang bekerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempercepat perkembangan perekonomian daerah.

Partisipasi perempuan bekerja di bidang ekonomi dan sektor lapangan usaha lainnya adalah salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan perempuan. Perempuan merupakan *agent of development* yang perannya sangat dibutuhkan dalam perkembangan perekonomian dan pembangunan daerah. Perempuan yang terdidik memiliki hak-hak yang sama dengan lelaki, bebas untuk bekerja selain sebagai ibu rumah tangga serta menghasilkan pendapatan yang mandiri, hal ini merupakan tanda dari kesejahteraan rumah tangga lebih meningkat. Peran perempuan di dalam membangun ketahanan ekonomi akan terasa dampaknya terutama dalam sektor formal dan sektor informal. Kontribusi perempuan dalam pertumbuhan ekonomi adalah dengan cara keterlibatan ekonomi yang akan memungkinkan untuk bekerja dan berkembang serta berpenghasilan. Peningkatan *lifeskill* (kecakapan) serta kompetensi (keahlian) perempuan yang pada gilirannya memiliki kepribadian hidup, sikap hidup, dan kemampuan hidup yang meningkat.

Variabel bebas (*independent*) pengeluaran per kapita perempuan (PPP) berpengaruh signifikan dengan nilai probabilitas hitung sebesar 0.0325 pada tingkat alfa 5% atau 0,05 serta memiliki nilai koefisien sebesar 0.016468 sehingga memiliki hubungan yang searah. Kondisi signifikan ini menjelaskan bahwa bertambahnya 1 rupiah pengeluaran per kapita perempuan yang bekerja

maka menyebabkan kenaikan dan bertambahnya pengaruh ke pertumbuhan ekonomi. Hubungan koefisien positif yang menyatakan hubungan searah maka sejalan dengan teori yang digunakan. Berdasarkan teori maka bertambahnya pengeluaran per kapita perempuan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong perkembangan perekonomian daerah.

Perempuan yang bekerja akan menghasilkan pendapatan dan memberikan sumbangan pendapatan dalam penggunaan atau konsumsi output PDRB. Pendapatan perempuan per kapita yang habis untuk dikonsumsi merupakan bentuk pengeluaran per kapita perempuan. Semakin besar pengeluaran per kapita perempuan maka akan menunjukkan indikator peningkatan pendapatan perempuan dan peningkatan sumbangan pendapatan perempuan pada perekonomian serta merupakan bentuk meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan gender perempuan.

Variabel bebas (*independent*) indeks pembangunan gender (IPG) berpengaruh tidak signifikan dengan nilai probabilitas hitung sebesar 0.6562 pada tingkat alfa 5% atau 0,05 serta memiliki nilai koefisien sebesar -1.199203 sehingga memiliki hubungan yang tidak searah. Kondisi tidak signifikan ini menjelaskan bahwa bertambahnya 1 persen pada IPG maka tidak menyebabkan kenaikan dan tidak bertambahnya pengaruh ke pertumbuhan ekonomi. Hubungan koefisien negatif yang menyatakan hubungan tidak searah justru berseberangan dengan teori yang digunakan. Berdasarkan teori justru bertambahnya angka persentase pada IPG maka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membantu perekonomian daerah menjadi berkembang dan maju.

Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender di Kalimantan Utara (Kaltara) masih jauh dari angka nasional. Hal ini disebabkan karena minimnya keterlibatan perempuan di parlemen dan politik serta peran perempuan sebagai tenaga kerja profesional masih kecil atau sedikit. Hal ini berarti masih ada ketimpangan antara laki-laki dengan perempuan dalam hal politik dan ekonomi. Sehingga program pemberdayaan perempuan di Provinsi Kalimantan Utara lebih kepada memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan dan pemerintah agar banyak melibatkan perempuan di setiap kegiatannya untuk menunjang

perekonomian dan pembangunan gender serta pembangunan daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Keterlibatan perempuan di parlemen (KPP) tidak berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Hal ini dibuktikan dari nilai t hitung sebesar -1.717770 dengan nilai signifikansi sebesar 0.1465 lebih besar dari 0.05 ($0.1465 > 0.05$). Dan koefisien regresi mempunyai nilai negatif sebesar -0.184535.
2. Perempuan sebagai tenaga profesional (PTP) tidak berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Hal ini dibuktikan dari nilai t hitung sebesar 0.032905 dengan nilai signifikansi sebesar 0.9750 lebih besar dari 0.05 ($0.9750 > 0.05$). Dan koefisien regresi mempunyai nilai positif sebesar 0.003738.
3. Sumbangan pendapatan perempuan (SPP) berpengaruh signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Hal ini dibuktikan dari nilai t hitung sebesar -2.834871 dengan nilai signifikansi sebesar 0.0365 lebih kecil dari 0.05 ($0.0365 < 0.05$). Dan koefisien regresi mempunyai nilai negatif sebesar -7.681531.
4. Pengeluaran per kapita perempuan (PPP) berpengaruh signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Hal ini dibuktikan dari nilai t hitung sebesar 2.933659 dengan nilai signifikansi sebesar 0.0325 lebih kecil dari 0.05 ($0.0325 < 0.05$). Dan koefisien regresi mempunyai nilai positif sebesar 0.016468.
5. Indeks pembangunan gender (IPG) tidak berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Hal ini dibuktikan dari nilai t hitung sebesar -0.472953 dengan nilai signifikansi sebesar 0.6562 lebih besar dari 0.05 ($0.6562 > 0.05$). Dan koefisien regresi mempunyai nilai negatif sebesar -1.199203.

Saran

1. Perlu dikembangkan jaringan-jaringan kerja yang saling mendukung, yang dapat dijadikan basis kolaborasi kaum perempuan di dalam masyarakat Indonesia. Ini dapat dilakukan oleh sebuah kaukus perempuan, atau jaringan kaukus-kaukus sejenis, yang dapat

- menyuarakan pentingnya pengakuan atas peranan kaum perempuan di arena politik.
2. Dalam angkatan kerja baik perempuan dan laki-laki harus meningkatkan perannya di segala sektor pembangunan sehingga tenaga kerja tidak hanya lebih layak bekerja di sektor formal saja tetapi bisa juga di sektor informal guna untuk mencapai kesetaraan gender dalam angkatan kerja di provinsi Kalimantan Utara.
 3. Sebagai upaya pemberdayaan ekonomi rakyat khususnya pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, sehingga kedepannya dapat disusun rencana tindak lanjut dan intervensi pemerintah untuk mengatasi kemiskinan.
 4. Dalam bidang ekonomi pemerintah diharapkan dapat membuka peluang perempuan untuk turut berpartisipasi pada lapangan pekerjaan yang memiliki produktivitas lebih tinggi, hal ini dikarenakan lapangan pekerjaan yang memiliki produktivitas tinggi, sehingga menyebabkan terjadinya pendapatan yang diterima perempuan. Ketika lapangan pekerjaan dengan produktivitas tinggi lebih banyak tersedia untuk perempuan maka pendapatan yang diterima akan meningkat maka pengeluaran per kapita perempuan meningkat.
 5. Untuk mewujudkan kesetaraan gender secara menyeluruh, pentingnya peran pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan yang tegas. Peranan ini mengarah kepada sasaran pemerintah untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan perempuan mencapai pada tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakatnya serta mengurangi angka kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfirdaus, L. K. (2019) 'MENAJAMKAN PERSPEKTIF GENDER, MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN DAN MENCAPAI SDGs (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS)', *Egalita*, 13(1), pp. 24–40. doi: 10.18860/egalita.v13i1.8076.
- Arsyad, L. (2020) *Ekonomi Pembangunan*. Ed. 5. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Azzahra, F. S. and Aushafina, A. (2018) 'Gender Equality through Sustainable Development Goals : The Case of Timor Leste', *Global and Strategies*, 12(2), pp. 81–90.
- BKKBN (2007) 'BKKBN'.
- BPS Kalimantan Utara (2021) 'B, K, U. BPS Kalimantan Utara.' Available at: <https://kaltara.bps.go.id/>.
- Carnegie, M., & Singh-Peterson, L. (2019) 'The International "Gender Agenda" in the Context of the South Pacific and Agricultural Livelihoods. In L. Singh-Peterson & M. Carnegie (Eds.)', in *Integrating Gender in Agricultural Development*. Emerald Publishing Limited., pp. 33–35. Available at: <https://doi.org/10.1108/978-1-78973-055-520191005>.
- Eden, L., & Gupta, S. F. (2017) 'Culture And Context Matter: Gender In International Business and Management', *Cross Cultural & Strategic Management*, 24(2), pp. 194–210.
- Hannan, A. (2018) 'Perempuan Madura Dan Pembangunan Daerah Berbasis Berkelanjutan (SDGs) Analisis SWOT Eksistensi Perempuan Madura Menuju Pembangunan Berbasis Berkelanjutan (SDGs)', *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 3(1), pp. 19–41.
- Haspels, N. and Suriyasarn, B. (2005) *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak : Panduan Praktis bagi Organisasi*. ILO-IPEC. ILO International Programme on the Elimination of Child Labour, International Labour Organisation, & Sub-regional Office for East Asia.
- Makinde, O. A. et al. (2017) 'Rejection of the Gender and Equal Opportunities Bill in Nigeria: A Setback for Sustainable Development Goal

- Five', *Gender in Management: An International Journal*, 32(3), pp. 234–240.
- Sen, G. (2019) 'Gender Equality and Women's Empowerment: Feminist Mobilization for the SDGs', *Global Policy*, 10(Supplement 1), pp. 28–38. doi: 10.1111/1758-5899.12593.
- Setiati, F. et al. (2020) *Analisis Indeks Pembangunan Gender di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019*. Universitas Gadjah Mada. doi: 10.13140/RG.2.2.18374.09284.
- Todaro, M. P. (2006) *Pembangunan Ekonomi*. Ed. 9. Erlangga.
- Widada, M. P. (2001) *Analisis Gender Dalam Pembangunan Hukum: Aplikasi Gender Analysis Pathway (GAP) (Ed. 1)*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) bekerjasama dengan Women's Support Project II-CIDA. Indonesia.

STRATEGI BANK NTT MELAYANI KREDIT DALAM MASA PANDEMI COVID 19

Fabian Aldino Zecharian Jolong

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana

fabianjolong@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi Bank NTT melayani kredit dalam masa pandemi covid 19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknis analisis data pada penelitian menggunakan analisis data triangulasi dan analisis data interaktif Miles dan Huberman guna merumuskan strategi yang ingin dicapai. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dibutuhkan strategi bagi Bank NTT untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan pendapatan kredit di masa pandemi covid 19 yaitu melalui mapping pada para debiturnya yang dalam masa restrukturisasi, memfokuskan/memprioritaskan kredit pada sektor low risk serta menghindari sektor red line business, menggunakan digital banking untuk pelayanannya, mewajibkan debitur pada masa restrukturisasi untuk tetap melakukan angsuran agar pada jatuh tempo debitur tidak diberatkan dengan tunggakan kredit dan pada bulan Juli 2020 Bank NTT mengeluarkan program skim kredit mikro merdeka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pendapatan Bank NTT.

Kata kunci : Strategi, Pelayanan Kredit, Pandemi Covid 19

ABSTRACT

This study aims to formulate a strategy for Bank NTT to provide credit services during the covid 19 pandemic. This study uses a descriptive approach. The data used in this study are primary data and secondary data obtained through interviews, observation, and documentation. Technical analysis of data in this study uses triangulation data analysis and interactive data analysis by Miles and Huberman to formulate the strategy to be achieved. The results of this study indicate that the strategy needed for Bank NTT to maintain or even increase credit income during the COVID-19 pandemic is through mapping its debtors who are in the restructuring period, focusing/prioritizing credit in low-risk sectors and avoiding the red line sector business, using digital banking for its services, requires debtors during the restructuring period to continue to make installments at the maturity date of the debtor not to be burdened with credit arrears and in July 2020 Bank NTT issued independent microloans program to improve people's welfare and increase Bank NTT income.

Keywords : Strategy, Credit Service, Covid 19 Pandemic

PENDAHULUAN

Akhir tahun 2019, tepatnya pada bulan Desember, dunia dihebohkan dengan kasus pneumonia yang etiologinya belum jelas, kasus tersebut berasal dari kota Wuhan, China. China membedakan pneumonia pada 7 Januari 2020 sebagai jenis lain yaitu Covid 19. Penegasan pemberitahuan mendesak tentang pengobatan pneumonia dengan alasan yang tidak jelas telah diberikan oleh *Wuhan Municipal Health Committee* (Hanoatubun, 2020). Infeksi ini dapat menyebar ke manusia

dan hewan, yang pada umumnya akan menyerang saluran pernapasan manusia dengan diawali efek samping influenza musiman dan dapat menyebabkan penyakit pernapasan parah (SARS) (Ren dkk., 2020).

Tentunya pandemi covid 19 berdampak pula pada perekonomian dunia terkhususnya Indonesia. Asosiasi di seluruh dunia di bidang moneter, khususnya Aset Keuangan Dunia dan Bank Dunia mengantisipasi bahwa sebelum akhir kuartal pertama tahun 2020, ekonomi dunia akan memasuki penurunan yang direvisi secara signifikan (Liu dkk., 2020).

Pertumbuhan ekonomi global dapat merosot ke negatif 2,8% atau dengan kata lain terseret hingga 6% dari pertumbuhan ekonomi global di periode sebelumnya (Nasution dkk., 2020). Padahal, kedua lembaga tersebut sebelumnya telah memproyeksi ekonomi global di akhir kuartal I tahun 2020 akan tumbuh pada persentase pertumbuhan sebesar 3% (Carrillo-Larco & Castillo-Cara, 2020) dalam (Nasution dkk., 2020). Fenomena horor tersebut terjadi karena munculnya virus baru yang menjangkit dunia saat ini yaitu *covid 19* (Nasution dkk., 2020). Dilansir dari (Worldometer, 14/01/2022), sebanyak 224 negara sudah terpapar *covid 19*. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan tertekan di level 2,1 persen. Penyebab turunnya pertumbuhan ekonomi tersebut karena merebaknya penyebaran *covid 19* baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pertumbuhan ekonomi negara Indonesia diprediksi oleh Bank Indonesia (BI) hanya 2,5 persen, yang biasanya mencapai 5,02 persen.

Menurut (Fahrika & Roy, 2020) pengaruh pandemi virus *covid 19* terhadap kondisi skala besar Indonesia dapat dilihat dari beberapa kesempatan, yaitu: 1) April 2020, sekitar 1,5 juta pekerja diberhentikan atau di PHK (Pemberhentian Hubungan Kerja), yaitu 1,2 juta pekerja berasal dari area resmi, 265.000 dari area tidak resmi; 2) Daerah penerbangan kehilangan sekitar Rp. 207 miliar, di antaranya Rp. 48 miliar kehilangan pendapatan dari pesawat China; 3) Jumlah wisatawan berkurang 6.800 setiap hari, terutama wisatawan dari China; 4) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyatakan telah terjadi penurunan penyewaan hotel hingga 50% di Indonesia. Jadi ada pengurangan lebih dari setengah pendapatan pariwisata dibandingkan dengan tahun lalu; 5) Hotel, restoran maupun pengusaha ritel yang juga merupakan penunjang sektor wisata pun juga akan terpengaruh dengan adanya virus Corona; 6) Penyebaran virus corona juga berdampak pada kawasan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) karena ketika mengunjungi tempat-tempat liburan, para ini akan membuat permintaan atau pembelian oleh-oleh; 7) Inflasi pada Maret 2020 adalah

2,96% tahun-ke-tahun, dengan kenaikan harga perhiasan emas, kenaikan signifikan pada beberapa harga pangan, dan penurunan harga cabai dan tiket pesawat; 8) Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa terjadi penurunan pendapatan retribusi dari daerah pertukaran, kemudian daerah memberikan kontribusi terbesar kedua dalam pendapatan pajak, dan selanjutnya migas dan nonmigas juga mengalami penurunan karena China adalah pembeli minyak mentah terbesar serta produksi China seperti batu bara dan semen mengalami penurunan meskipun faktanya China adalah produsen terbesar; 9) Virus *covid 19* juga berdampak pada investasi, karena adanya jaringan para investor untuk melakukan kegiatan investasi, di sisi lain para investor menunda investasi karena kurangnya permintaan.

Menurut UU No.10 Tahun 1998, kredit adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk mengembalikan pinjaman mereka setelah jangka waktu tertentu dengan bunga (Yasman & Afriyeni, 2019). Penyusunan kredit dapat mendatangkan keuntungan dan kerugian bagi bank. Bahaya kredit yang paling mendasar dan tinggi terkait dengan fondasi moneter (Martini & Sari, 2020). Pandemi *covid 19* menyebabkan beberapa bank harus dipelajari kembali dalam mengelola hal darurat yang akan mempengaruhi perbankan (Husen Sobana dkk., 2021). Pemakaian dana cadangan bank serta risiko kredit bermasalah (NPL) merupakan hal yang harus diperhatikan dalam mencegah risiko perbankan (Martini & Sari, 2020).

Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) mulai melakukan kegiatannya sebagai bank pada tanggal 17 Juli 1962 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Bank Sentral No: BUM 9-13/II tanggal 5 Februari 1962 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, dengan kedudukan tempat usaha di Kupang Ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dilansir dari rri.co.id, Direktur Pemasaran Kredit Alexander Riwu Kaho selaku Plt. Direktur Utama Bank NTT kepada awak media di Kupang, Kamis (14/05/2020)

menegaskan bahwa, terkait likuiditas, Management Bank NTT berani menyampaikan bahwa, kondisi bank saat ini sampai akhir tahun 2020 tetap aman dan sehat.

Tabel 1. PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
Kredit Yang Diberikan (dalam jutaan)

Kredit Diberikan	2016	2017	2018	2019	2020
Modal Kerja	1,573,025	1,807,399	1,897,204	2,318,534	2,324,611
Investasi	452,785	546,897	541,409	633,514	513,084
Konsumsi	5,271,602	5,641,097	6,330,978	7,255,268	7,884,360
JUMLAH	7,297,412	7,995,393	8,769,591	10,207,316	10,722,055
Kredit Produktif	2,025,810	2,354,296	2,438,613	2,952,048	2,837,695
Pendapatan Bunga	1,256,441	1,555,477	1,363,861	1,503,988	1,527,047

Sumber: PT BPD NTT Pusat Kota Kupang

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa jumlah kredit yang diberikan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2016-2017 naik sebesar 9,6%. Tahun 2017-2018 naik sebesar 9,7%. Tahun 2018-2019 naik sebesar 16%. Tahun 2019-2020 naik sebesar 5%. Walaupun pemberian kredit terus meningkat namun pendapatan bunga kredit terjadi fluktuasi. Tahun 2016-2017 naik sebesar 24%. Tahun 2017-2018 turun sebesar 12%. Tahun 2018-2019 naik sebesar 10%. Tahun 2019-2020 naik sebesar 1,5%. Tahun 2019-2020 PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tetap terjadi peningkatan pendapatan kredit pada masa pandemi *covid* 19, tentunya bank NTT mempunyai strategi khusus dalam pelayanan kreditnya.

Berdasarkan berita yang ditulis (Olifia, 2021), diawal tahun 2021, PT. BANK NTT menorehkan prestasi dengan memperoleh predikat *The Big 9 Indonesia GCG Award VI 2021, Category: BPD BUKU II Asset Rp.10 T-Rp.25 T Economic Review*, yakni penghargaan yang dikemas secara Zoominar GCG hari Jumat, 5 Februari 2021 yang mengangkat tema “*Standardization of the implementation of sustainable GCG after the pandemic Covid-19*”. Dikarenakan Bank NTT tetap mampu mengukir prestasi sebagai 9 terbaik pada GCG Award VI 2021 tentunya Bank NTT mempunyai strategi khusus pada

masa pandemi *covid* 19 sehingga tetap mampu mempertahankan perusahaannya.

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa jumlah kredit yang diberikan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2016-2017 naik sebesar 9,6%. Tahun 2017-2018 naik sebesar 9,7%. Tahun 2018-2019 naik sebesar 16%. Tahun 2019-2020 naik sebesar 5%. Walaupun pemberian kredit terus meningkat namun pendapatan bunga kredit terjadi fluktuasi. Tahun 2016-2017 naik sebesar 24%. Tahun 2017-2018 turun sebesar 12%. Tahun 2018-2019 naik sebesar 10%. Tahun 2019-2020 naik sebesar 1,5%. Tahun 2019-2020 PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tetap terjadi peningkatan pendapatan kredit pada masa pandemi *covid* 19, tentunya bank NTT mempunyai strategi khusus dalam pelayanan kreditnya.

Berdasarkan berita yang ditulis (Olifia, 2021), diawal tahun 2021, PT. BANK NTT menorehkan prestasi dengan memperoleh predikat *The Big 9 Indonesia GCG Award VI 2021, Category: BPD BUKU II Asset Rp.10 T-Rp.25 T Economic Review*, yakni penghargaan yang dikemas secara Zoominar GCG hari Jumat, 5 Februari 2021 yang mengangkat tema “*Standardization of the implementation of sustainable GCG after the pandemic Covid-19*”. Dikarenakan Bank NTT tetap mampu mengukir prestasi sebagai 9

terbaik pada GCG Award VI 2021 tentunya Bank NTT mempunyai strategi khusus pada masa pandemi *covid 19* sehingga tetap mampu mempertahankan perusahaannya.

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa jumlah kredit yang diberikan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2016-2017 naik sebesar 9,6%. Tahun 2017-2018 naik sebesar 9,7%. Tahun 2018-2019 naik sebesar 16%. Tahun 2019-2020 naik sebesar 5%. Walaupun pemberian kredit terus meningkat namun pendapatan bunga kredit terjadi fluktuasi. Tahun 2016-2017 naik sebesar 24%. Tahun 2017-2018 turun sebesar 12%. Tahun 2018-2019 naik sebesar 10%. Tahun 2019-2020 naik sebesar 1,5%. Tahun 2019-2020 PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tetap terjadi peningkatan pendapatan kredit pada masa pandemi *covid 19*, tentunya bank NTT mempunyai strategi khusus dalam pelayanan kreditnya.

Berdasarkan berita yang ditulis (Olifia, 2021), diawal tahun 2021, PT. BANK NTT menorehkan prestasi dengan memperoleh predikat *The Big 9 Indonesia GCG Award VI 2021*, Category: BPD BUKU II Asset Rp.10 T–Rp.25 T *Economic Review*, yakni penghargaan yang dikemas secara Zoominar GCG hari Jumat, 5 Februari 2021 yang mengangkat tema “*Standardization of the implementation of sustainable GCG after the pandemic Covid-19*”. Dikarenakan Bank NTT tetap mampu mengukir prestasi sebagai 9 terbaik pada GCG Award VI 2021 tentunya Bank NTT mempunyai strategi khusus pada masa pandemi *covid 19* sehingga tetap mampu mempertahankan perusahaannya.

Menurut beberapa penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Mrp & Dalimunte, 2021) tentang Strategi Bank Dalam Mengatasi *Non Performing Financing* (NPF) Pada Masa Pandemi *Covid 19* (Studi Kasus Bank Sumut Capem Karya) menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) strategi bank dalam mengatasi *Non performing Financing* (NPF) yaitu: penagihan, restrukturisasi, jual aset secara suka rela, lelang dan hapus buku. Sedangkan menurut penelitian terdahulu oleh (Habibah, 2020)

tentang Tantangan Dan Strategi Perbankan Syariah Dalam Menghadapi *Covid-19* juga terdapat 5 (lima) strategi bank dalam masa pandemi *covid-19*. Pertama, perbankan syariah melakukan mitigasi risiko dengan cara restrukturisasi pinjaman dengan memilih secara hati-hati nasabah yang layak pembiayaannya direstrukturisasi. Kedua, memilih sektor usaha yang masih eksis dan berkembang di masa pandemi. Ketiga, fokus mengembangkan *digital banking* dan *online banking*. Keempat, bank melakukan pendampingan kepada nasabahnya terutama UMKM untuk tetap bisa membayar kewajibannya. Kelima, melakukan *digital marketing*.

Berdasarkan uraian di atas PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tetap mengukir prestasi pada masa pandemi sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Bank NTT Melayani Kredit Dalam Masa Pandemi *Covid 19*”.

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah “bagaimana strategi bank NTT melayani kredit pada masa pandemi *covid 19*?”

TINJAUAN PUSTAKA

KAJIAN TEORI

Teori Kontingensi (*Contingency Theory*)

Menurut Ghazali (2020) teori kontingensi adalah teori organisasi yang mengklaim bahwa tidak ada cara terbaik untuk mengatur korporasi, memimpin perusahaan, atau membuat keputusan. Sebaliknya, tindakan optimal adalah bergantung (tergantung) pada situasi internal dan eksternal.

Strategi

Menurut Sumarnas (2010) strategi merupakan tindakan yang bersifat senantiasa meningkat atau *incremental* dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang di harapkan oleh para pelanggan di masa datang. Strategi secara umum adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana

agar tujuan tersebut dapat dicapai. Berdasarkan definisi-definisi tersebut mengenai pengertian strategi, terdapat dua perspektif yang diungkapkan oleh Stoner dan Wankel (2008) dalam (Jumanah, 2019), yaitu: “Strategi dapat disoroti sekarang–kurangnya dari dua perspektif yang berbeda, yaitu dari perspektif mengenai apa yang hendak dilakukan oleh sebuah organisasi dan yang kedua dari apa sesungguhnya dilakukan oleh sebuah organisasi, baik tindakannya sejak semula memang disengaja atau tidak. Dari perspektif pertama, strategi didefinisikan sebagai program yang luas untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan melaksanakan misinya. Dari perspektif yang kedua, strategi adalah pola tanggapan organisasi yang dilakukan terhadap lingkungannya sepanjang waktu”.

Karakteristik Strategi

Hayes dan Wheelwright (2008:162) dalam (Jumanah, 2019) telah mengidentifikasi lima sifat pokok strategi yaitu:

1. Waktu

Pada umumnya kata strategi digunakan untuk melukiskan kegiatan yang meliputi waktu dalam arti yang luas, baik waktu yang dicapai untuk melaksanakan kegiatan tersebut maupun waktu yang digunakan untuk mengamati dampaknya.

2. Dampak

Akibat yang ditimbulkan karena mengikuti strategi tertentu belum terlihat jelas sekalipun dalam jangka waktu yang lama, namun dampak akhirnya akan sangat berarti.

3. Pemusatan upaya

Sebuah strategi yang efektif biasanya memerlukan pemusatan kegiatan sempit, upaya, atau perhatian terhadap rentang sasaran yang sempit.

4. Pola–pola keputusan

Keputusan-keputusan harus saling menunjang, mengikuti suatu pola yang konsisten.

5. Daya meresap

Sebuah strategi mencakup spektrum aktivitas yang luas.

Strategi Pelayanan

Perusahaan yang bergerak di bidang jasa, khususnya jasa perbankan, keunggulan bersaing sering diupayakan dalam bentuk pelayanan yang unggul. Menurut Wahles (1994:230) dalam (Crissanti, 2020), strategi yang tepat dan akurat dalam kualitas layanan merupakan faktor penting yang mempengaruhi keunggulan bersaing bila direncanakan dan diimplementasikan dengan tepat. Dalam jasa bank, kualitas produk yang diukur adalah kualitas layanan (Crissanti, 2020). Parasuraman, dkk (1990) dalam Crissanti (2020), kualitas pelayanan sebagai layanan yang diterima konsumen telah sesuai dengan harapan konsumen akan kualitas. Dalam hal ini, untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan yang diterima konsumen telah sesuai dengan harapan konsumen, didapatkan melalui angket ataupun wawancara mengenai komplain konsumen (Crissanti, 2020). Hal pokok yang mendasari kualitas pelayanan adalah indikator-indikatornya yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan, tanpa memandang jenis layanan. Kualitas jasa dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara harapan atau keinginan dengan persepsi konsumen (Parasuraman, dkk 1990) dalam(Crissanti, 2020).

Berry dan Parasuraman (1991:16) dalam (Crissanti, 2020) menyatakan terdapat lima dimensi atau ukuran kualitas jasa atau pelayanan, yaitu: *tangible* (fisik), *reliability* (keandalan), *responsiveness* (cepat tanggap), *assurance* (kepastian), dan *emphaty* (empati). Lima dimensi dalam kualitas layanan yaitu *tangible* (fisik) yaitu menyangkut lingkungan fisik dan gambaran fisik dari suatu jasa dalam hal ini misalnya, kondisi gedung, peralatan yang disediakan, lahan parkir, serta penampilan dari para karyawan (Crissanti, 2020). *Reliability* (kehandalan) menyangkut konsistensi dari performance dan dapat dipercaya, misalnya kemampuan karyawan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen(Crissanti, 2020). *Responsiveness* (cepat tanggap) menyangkut kemauan atau kesiapan karyawan untuk memberikan pelayanan, hal ini dapat juga menyangkut ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan (Crissanti, 2020). *Assurance* (kesiapan) yaitu pengetahuan, kesopansantunan, kemampuan

para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan dan yang terakhir *emphaty* (empati), yaitu perhatian secara individual yang diberikan perusahaan kepada pelanggan seperti kemudahan untuk menghubungi perusahaan serta kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan pelanggan (Crissanti, 2020).

Strategi Pelayanan Perbankan

Lovelock dalam (Andespa, 2016), kualitas pelayanan sebagai: kualitas adalah derajat keunggulan yang dimaksudkan, dan pengendalian variabilitas dalam mencapai keunggulan itu, dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, sedangkan Musselmen dalam (Andespa, 2016), kualitas pelayanan sebagai: layanan pelanggan dan tingkat kualitas adalah sejauh mana layanan memenuhi spesifikasi manajemen dan harapan pelanggan.

Kredit

Menurut Kent (1990) dalam Abdullah dan Wahjusaputri (2018), kredit adalah hak untuk menerima pembayaran kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang.

Pengertian pinjaman (kredit) menurut undang-undang republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Yasman & Afriyeni, 2019).

Pelayanan Kredit

Penilaian seluruh aspek dikenal dengan nama studi kelayakan usaha yang sering digunakan untuk proyek-proyek yang bernilai besar dan dalam jangka panjang. Aspek-aspek yang dinilai terdiri dari:

- a. Aspek Yuridis/Hukum
- b. Aspek Pemasaran
- c. Aspek Keuangan
- d. Aspek Teknis/Operasi

- e. Aspek Sosial Ekonomi
- f. Aspek Amdal

Menurut Abdullah dan Wahjusaputri (2018:120) perbedaan prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank lainnya terletak pada tujuan bank tersebut serta persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

- a. Berkas-berkas
- b. Penyelidikan Berkas Pinjaman
- c. Wawancara
- d. Di Tempat
- e. Keputusan-Kredit
- f. Penandatanganan Akta Kredit
- g. Realisasi Kredit

Menurut Abdullah dan Wahjusaputri (2018:123) sependai-pandainya menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut mengalami kemacetan masih ada. Hal ini disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:

- a. Pihak Perbankan
- b. Pihak Nasabah

Pihak bank perlu melakukan penyelamatan kredit macet, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan bisa dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pengembalian terutama bagi kredit yang mengalami musibah. Menurut Abdullah dan Wahjusaputri (2018:123) penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. *Rescheduling*
- b. *Reconditioning*
- c. *Restructuring*
- d. Kombinasi
- e. Penyitaan Jaminan

Pandemi Covid 19

Menurut (Radhitya dkk., 2020) pandemi merupakan sebuah epidemi yang menyebar ke beberapa negara atau benua, dan pada umumnya menjangkiti banyak orang. Dunia

mengalami permasalahan penyebaran pandemi *covid 19*. Corona Virus Disease (*COVID-19*) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus versi baru yang ditemukan pada akhir 2019 lalu sebagian besar gangguan yang dialami oleh individu yang terinfeksi virus *COVID-19* akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus (Sampurno dkk., 2020). Persentase penularannya lebih cenderung pada individu usia lanjut dan mereka yang memiliki riwayat masalah medis seperti kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker. di mana lebih cenderung mengembangkan infeksi virus *COVID-19* menjadi penyakit yang lebih serius (Sampurno dkk., 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang berfokus pada strategi bank NTT melayani kredit pada masa pandemi *covid 19*. Jenis data yang di gunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif dengan sumber data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan pada empat divisi kredit Bank NTT.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis data triangulasi dan teknik analisis data interaktif miles dan huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun strategi bank NTT yang dapat dilakukan selama pandemi *covid 19* yaitu: 1) Bank harus mengelola mitigasi risiko dengan tepat. Pada masa pandemi *covid 19* pemberian kredit dilakukan dengan lebih hati-hati dibanding sebelum pandemi *covid 19* dengan cara restrukturisasi kredit dengan memilih secara hati-hati debitur yang pembiayaannya layak direstrukturisasi serta melakukan *mapping* pada debitur. Hal ini sesuai dengan strategi yang disampaikan Habibah (2020) berkaitan strategi bank di masa pandemi *covid 19*. 2) Sektor usaha yang terdampak pandemi

covid 19 (*red line business*) seperti perhotelan dan transportasi dibatasi dulu untuk sementara. Lebih difokuskan/diprioritaskan pada segmen-segmen pasar yang tidak terdampak pandemi *covid 19* atau *low risk* seperti pemberian kredit pada ASN, rumah sakit dan alat medis karena tidak terdampak *covid 19* dalam hal pendapatannya. Sedangkan untuk sektor produktif difokuskan pada kontrak pekerjaan dari pemerintah pada kontraktor yang sudah ada dananya namun belum tersalurkan. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang disampaikan Habibah (2020) menyatakan tentang menghindari sektor usaha yang terdampak dan memberi pada sektor usaha yang masih eksis. 3) *Digital banking*. Strategi yang dilakukan bank NTT juga adalah dengan membuat aplikasi b'pung *mobile* agar pelayanan dapat dilakukan secara *online* ketika realisasi baru *offline*. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Habibah (2020) berkaitan dengan *digital banking* yang menyatakan bahwa proses *digital banking* harus berjalan bertahap dan inisiasinya dilakukan secara terus menerus. Namun, tidak semua produk dan jasa harus menggunakan *digital banking*, terdapat bisnis inti yang masih membutuhkan fungsi oleh unsur manusia. 4) Bank NTT mewajibkan debitur pada masa restrukturisasi untuk tetap melakukan angsuran berapapun jumlahnya sehingga pada saat jatuh tempo debitur tidak diberatkan dengan tunggakan yang menumpuk. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang disampaikan (Habibah, 2020) tentang restrukturisasi. 5) Bulan Juli 2020 bank NTT mengeluarkan skim kredit yang namanya kredit mikro merdeka dengan semboyan cepat, mudah dan murah. Cepat disini adalah pelayanannya 1 hari saja, mudah itu adalah dokumen administrasi tidak banyak persyaratan kepada calon debitur atau debitur itu kemudian tidak ada jaminan, murah itu suku bunganya 0%. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Habibah (2020) tentang bank harus inovatif dan kreatif. 6) Bank NTT melakukan pembentukan ekosistem pada debitur-debitur bank NTT agar memudahkan kegiatan bisnisnya, dengan menggunakan *off taker*. *Off taker* itu misalkan kita punya debitur petani, jadi ketika masa panen *off taker* beli semua langsung bayar saat

itu untuk langsung disalurkan pada jaringan dari *off taker*. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Habibah (2020) yang menyatakan bahwa bank dapat membantu pelaku UMKM (debitur) binaannya untuk terhubung dengan ekosistem.

Dari keenam strategi di atas dapat disimpulkan bahwa strategi *off taker*, wajib melakukan angsuran pada masa restrukturisasi dan kredit mikro merdeka lah yang paling berdampak baik pada masa pandemi *covid 19*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian terdapat enam strategi bank NTT melayani kredit dalam masa pandemi *covid 19*. Pertama, bank NTT melakukan mitigasi risiko dengan tepat serta restrukturisasi serta *mapping* terhadap debitur yang mengajukan permohonan atau sudah dalam masa restrukturisasi. Kedua, bank NTT menghindari *red line business* dan lebih memprioritaskan kredit pada sektor yang tidak terdampak pandemi *covid 19* atau *low risk*. Ketiga, *Digital banking*, dengan membuat aplikasi b'pung *mobile*. Keempat, bank NTT juga mewajibkan debitur pada masa restrukturisasi untuk tetap melakukan angsuran berapapun jumlahnya. Kelima, bank NTT mengeluarkan skim kredit yang namanya kredit mikro merdeka. Keenam, Bank NTT melakukan pembentukan ekosistem pada debitur-debitur bank NTT agar memudahkan kegiatan bisnisnya, dengan menggunakan *off taker*.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi bank NTT, agar ditingkatkan lagi pengelolaan sektor kredit Bank NTT melalui pengembangan strategi-strategi pelayanan kredit Bank NTT dengan meningkatkan lagi pemakaian aplikasi b'pung *mobile* yang masih kurang dipakai pada kantor cabang pada daerah-daerah. Serta dari strategi yang ada dapat dikembangkan lagi menjadi lebih efektif dan efisien serta melakukan promosi agar lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas agar semakin banyak yang tertarik dan dapat menjadi nasabah atau debitur dari bank NTT.

2. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian terhadap strategi pelayanan kredit perbankan dalam masa pandemi *covid 19* pada objek penelitian lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Crissanti, I. D. (2020). Irene Dian Crissanti. *Strategi Membangun Kualitas Pelayanan Perbankan Untuk Menciptakan Kepuasan Nasabah Berorientasi Loyalitas Pada Bri Cabang Semarang Patimura*, 274–282.
- Fahrika, A. I., & Roy, J. (2020). *Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh*. 2, 206–213.
- Habibah, N. F. (2020). Tantangan dan Strategi Perbankan Syariah dalam Menghadapi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah (IQTISHODIAH)*, 2(1), 1–9.
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid – 19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 2(11), 2716–4446.
- Husen Sobana, D., Quraisyn, A., Kusumawadani, A., Hermawati, D., Layusa, N., Nurul Putri, P., Habibah, S., & Nur Agustin, W. (2021). *Analisis Risiko Operasional Bank Bri Kantor Cabang Cianjur Pada Masa Pandemi COVID-19*.
- Jumanah, N. S. dan. (2019). Strategi Peningkatan Pad Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Bmd) Pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Liu, W., Yue, X. G., & Tchounwou, P. B. (2020). Response to the COVID-19 Epidemic: The Chinese Experience and Implications for Other Countries. *International journal of environmental research and public health. International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(07), 2304-undefined.
- Martini, T., & Sari, N. (2020). *Credit Risk Management At Bank Bengkulu Main*

- Branch During Covid-19 Pandemic. 10, 29–42.*
- Mrp, S. R., & Dalimunte, A. A. (2021). Strategi Bank Dalam Mengatasi Non Performing Financing (Npf) Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Bank Sumut Capem Karya). *Al Kharaj Journal Of Islamic Economics and Business, 03 Nomor 0*, 6.
- Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita, 5*(2), 212. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313>
- Olifia. (2021). Bank NTT Juara GCG 2021, Sukses Terapkan GCG Di Manajerial Bank. *EconomicReview*.
- Radhitya, T. V., Nurwati, N., & Irfan, M. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 2*(2), 111. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.29119>
- Ren, L. L., Wang, Y. M., Wu, Z. Q., Xiang, Z. C., Guo, L., Xu, T., Jiang, Y. Z., Xiong, Y., Li, Y. J., Li, X. W., Li, H., Fan, G. H., Gu, X. Y., Xiao, Y., Gao, H., Xu, J. Y., Yang, F., Wang, X. M., Wu, C., ...
- Wang, J. W. (2020). Identification of a novel coronavirus causing severe pneumonia in human: a descriptive study. *Chinese Medical Journal, 133*(9), 1015–1024. <https://doi.org/10.1097/CM9.0000000000000722>
- RONI ANDESPA. (2016). Strategi pelayanan bank konvensional dan syariah: prioritas pelayanan fisik dan empati. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan, 1*(2), 143–159.
- Sampurno, M. B. T., Kusumandyoko, T. C., & Islam, M. A. (2020). Budaya Media Sosial, Edukasi Masyarakat, dan Pandemi COVID-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 7*(5). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15210>
- Worldometer. (2022). *Reported Cases and Deaths by Country or Territory*. Worldometer.
- Yasman, R., & Afriyeni, A. (2019). *Prosedur Pemberian Kredit Pada Pt. Bank Pekreditan Rakyat (Bpr) Jorong Kampung Tengah (Jkt) Pariaman Cabang Padang. 7, 1–9.* <https://doi.org/10.31219/osf.io/c5ufr>

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NIAT
PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKUKAN
TINDAKAN *WHISTLEBLOWING* STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH TIMOR
TENGAH UTARA**

Maria Ursula Tani'i

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana
merrytani25@gmail.com

Minarni Anaci Dethan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana
Minarni.dethan@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Komitmen Organisasi, *Personal Cost*, *Reward*, dan Sikap Berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap niat pegawai pemerintah daerah dalam melakukan tindakan *whistleblowing*. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Kuantitatif. Data yang diperoleh dengan membagikan kuesioner pada 446 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis linear berganda. Hasil analisis menunjukkan (1) Komitmen Organisasi tidak berpengaruh terhadap niat pegawai melakukan tindakan *whistleblowing* (2) *Personal cost* berpengaruh terhadap niat pegawai melakukan tindakan *whistleblowing* (3) *Reward* tidak berpengaruh terhadap niat pegawai melakukan tindakan *whistleblowing* (4) Sikap berpengaruh terhadap niat pegawai melakukan tindakan *whistleblowing* (5) Komitmen Organisasi dan *Reward* tidak berpengaruh signifikan terhadap niat pegawai melakukan tindakan *whistleblowing* dan *Personal Cost* dan Sikap berpengaruh signifikan terhadap niat pegawai melakukan tindakan *whistleblowing*.

Kata Kunci: *Whistleblowing*, Komitmen Organisasi, *Personal Cost*, *Reward*, Sikap

ABSTRACT

This study aims to determine the Organizational Commitment, Personal Cost, Reward, and Attitude of Influence partially and simultaneously on the intentions of local government employees in carrying out whistleblowing actions. This type of research is quantitative descriptive research. Data obtained by distributing questionnaires to 446 respondents. The data analysis technique used is multiple linear analysis. The results of the analysis show (1) Organizational Commitment has no effect on employee intentions to take whistleblowing actions (2) Personal cost affects employee intentions to take whistleblowing actions (3) Rewards do not affect employee intentions to take whistleblowing actions (4) Attitude affects employee intentions to take action whistleblowing (5) Organizational Commitment and Rewards have no significant effect on employees' intentions to take whistleblowing actions and Personal Costs and Attitudes have a significant effect on employees' intentions to take whistleblowing actions.

Keywords: *Whistleblowing*, Organizational Commitment, *Personal Cost*, *Reward*, Attitud

PENDAHULUAN

Perubahan yang terjadi pada masa sekarang merupakan dampak dari kemajuan teknologi yang mempermudah manusia melakukan segala sesuatu. Era tersebut di pandang makin berkembang dalam berbagai sektor, salah satunya pada bidang ekonomi. Bidang ekonomi yang terjadi baik di sektor privat maupun publik dapat dicegah dengan mengungkapkan kecurangan yang terjadi menurut Alberth (2014) ada dua faktor yang bisa mencegah kecurangan. Faktor yang pertama yakni budaya kejujuran harus diciptakan, dan keterbukaan informasi dan dukungan kepada pegawai. Faktor yang kedua yakni meminimalisir celah untuk melakukan kecurangan dana memberikan hukuman bagi setiap pelaku kecurangan dengan. Sedangkan menurut Zimbelman *et al.*, (2017) salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah kecurangan itu adalah dengan menetapkan sistem pengendalian yang baik, menghambat terjadinya kolusi, pengawasan terhadap pegawai dan memberikan saluran telekomunikasi terkait pelaporan kecurangan yang baik, menciptakan gambaran hukum terkait tindakan kecurangan, dan melakukan pemeriksaan secara proaktif.

Maraknya tindakan kecurangan juga sering terjadi, khususnya pada sektor pemerintahan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (2019) mengemukakan bahwa sektor pemerintahan berada pada urutan kedua dengan jenis industri yang dirugikan oleh kecurangan sebesar 31,9%. Presentase yang besar ini terjadi karena masih banyak tindakan yang belum terdeteksi dan diketahui secara saksama.

Kecurangan laporan keuangan juga dapat terjadi karena dipengaruhi oleh kurangnya penerapan *whistleblowing* yang baik. *Whistleblowing* (meniup peluit) adalah suatu tindakan pengungkapan kepada pihak internal (manajemen yang lebih tinggi) atau kepada pihak eksternal yang berwenang dan/atau kepada publik tentang adanya suatu yang dipercaya sebagai perilaku yang tidak etis, tidak bermoral, serta melanggar hukum yang dapat menimbulkan kerugian terhadap pemangku kepentingan maupun organisasi. Pihak yang melakukan pelaporan atas perbuatan tidak etis tersebut dinamakan dengan *whistleblower*

(Dianingsih and Pratolo, 2018). Di Indonesia, Pedoman umum *whistleblowing system* telah resmi diterbitkan pada tahun 2008 oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Dorongan diterbitkannya pedoman ini yaitu dengan adanya penelitian dari *Institute of Business Ethics* pada tahun 2007 yang menyebutkan bahwa setidaknya satu dari empat orang dalam organisasi mengetahui adanya tindak kecurangan, tetapi sebanyak 52% dari orang tersebut lebih memilih untuk diam dan tidak melakukan apapun.

Penerapan sistem *whistleblowing* di Indonesia terbilang cukup baik, skor Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index-CPI*) Indonesia terus membaik dari tahun ke tahun. Tahun 2020, skor CPI Indonesia naik dua poin dari tahun sebelumnya menjadi 40 dan berada di posisi 85 dari 180 negara. Hasil penilaian ini menunjukkan bahwa persepsi korupsi Indonesia mulai cukup membaik bila dibandingkan dengan tahun 2019, Indonesia mendapatkan kenaikan dua poin.

Penerapan *whistleblowing* berhasil mengungkap beberapa kasus korupsi di Indonesia, salah satunya adalah kasus “papa minta saham” yang terjadi pada tahun 2015. Kasus ini berawal dari seorang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bernama Sudirman Said yang melaporkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto ke Majelis Kehormatan DPR atas dugaan terkait permintaan saham PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo. Setya Novanto juga memeras 20% saham perseroan dan meminta jatah sebesar 49% saham dari proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Urumuka, Papua pada PT Freeport Indonesia. Berdasarkan kasus tersebut, Setya Novanto telah melanggar kode etik dan diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPR periode 2014-2019.

Komitmen organisasi, diartikan seorang pekerja mengidentifikasi sebuah organisasi, tujuan serta harapannya untuk tetap menjadi anggota. Kebanyakan riset telah berfokus pada keterlibatan emosi pada organisasi dan kepercayaan terhadap nilai – nilainya sebagai ‘standar emas’ bagi komitmen pekerja. Colquitt, dkk (dalam Wibowo 2016:430) mendefinisikan komitmen organisasional sebagai keinginan

pada sebagian pekerja untuk tetap menjadi anggota organisasi.

Personal cost adalah pandangan pegawai terhadap risiko pembalasan/balas dendam atau sanksi dari anggota organisasi, yang dapat mengurangi minat pegawai untuk melaporkan wrongdoing (Schultz *et al.*, 1993). Risiko pembalasan ini dapat berupa penolakan dari rekan kerja, mutasi ke bagian lain, penolakan kenaikan gaji, penilaian kinerja yang tidak adil (dinilai memiliki kinerja yang rendah), bahkan bentuk yang ekstrim adalah pemberhentian kerja (Curtis, 2006). Tindakan pembalasan dendam dan sejenisnya, atau sanksi yang dijatuhkan atasan atau rekan kerja terhadap whistleblower dianggap menjadi faktor bagi pegawai untuk melakukan tindakan whistleblowing.

Dicky Saputra (2017), Reward merupakan suatu motivasi bagi pegawai dalam melakukan pekerjaannya. Suatu sistem imbalan yang baik adalah sistem yang mampu menjamin kepuasan para pegawai perusahaan yang pada gilirannya memungkinkan perusahaan memperoleh, memelihara, dan mempekerjakan sejumlah orang yang dengan berbagai sikap dan perilaku positif bekerja dengan produktif bagi kepentingan perusahaan.

Sikap sebagai pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara sederhana, sikap adalah respons terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan. Dapat dikatakan bahwa kesiapan yang dimaksudkan merupakan kecenderungan potensial untuk bereaksi dengancara tertentu apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respons.

Suatu organisasi penting untuk dilakukan pemahaman terhadap faktor-faktor yang dapat memengaruhi intensi pegawai dalam melakukan tindakan whistleblowing sehingga dapat dirancang suatu sistem whistleblowing yang lebih efektif. Partisipasi dari whistleblower juga sangatlah penting terhadap efektifitas sistem whistleblowing tersebut. Karena sistem tidak akan berjalan dan bermanfaat untuk kelangsungan kebaikan organisasi jika tidak ada pegawai yang memanfaatkan sistem tersebut untuk melaporkan adanya tindak kecurangan (Dianingsih and Pratolo, 2018).

Ada beberapa faktor yang membuat seseorang itu tidak berminat untuk melakukan whistleblowing. Menurut penelitian Liyanarachchi dan Newdick (2009) bahwa personal cost dapat mempengaruhi orang untuk melaporkan suatu kecurangan atau pelanggaran. Sedangkan menurut Bagustianto dan Nurkholis (2015) menyatakan bahwa bahwa personal cost tidak berpengaruh signifikan terhadap minat pegawai negeri sipil dalam melaporkan tindak kecurangan atau pelanggaran. Komitmen organisasi itu juga dapat mempengaruhi individu untuk melaporkan suatu pelanggaran yang ada di dalam suatu organisasi. Menurut penelitian Bagustianto dan Nurkholis komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap minat PNS melakukan tindakan whistleblowing. Menurut penelitian Givani (2016) pemberian reward akan meningkatkan niat untuk melaporkan kecurangan (whistleblowing) namun juga meningkatkan risiko adanya laporan palsu. Penelitian yang dilakukan oleh Park dan Blenkinsopp (2009) dan Winardi (2013) menggunakan kerangka theory of planned behavior dari Ajzen (1991) untuk menjelaskan faktor-faktor individual yang membentuk minat whistleblowing. Salah satu faktor individual tersebut adalah sikap terhadap whistleblowing (attitude towards whistleblowing) yang menurut dua penelitian tersebut memiliki pengaruh positif terhadap minat whistle-blowing.

Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah tindakan kecurangan yang terbilang cukup banyak, salah satunya Seperti kasus yang diangkat dari Kompas.com pada tahun 2015 yang dimana merupakan kasus yang dilaporkan oleh salah satu ormas di kabupaten TTU karena dianggap sebagai tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pejabat di Dinas PKO. Tindakan kecurangan yang dilaporkan oleh organisasi masyarakat ini adalah penyalahgunaan dana alokasi khusus di bidang pendidikan sebesar 47,5 Miliar yang berdampak jaksa menahan 9 orang sebagai tersangka dari kasus ini. Dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul untuk penelitian ini dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Pegawai Pemerintah Daerah untuk Melakukan Tindakan**

Whistleblowing (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Timor Tengah Utara)".

KAJIAN TEORITIS

1. Theory of Planned Behavior

Teori ini merupakan teori psikologi yang berusaha menjelaskan hubungan antara sikap dengan perilaku. Teori ini membuktikan bahwa niat (*intention*) lebih akurat dalam memprediksi perilaku aktual. Oleh karena itu, berdasarkan *Theory of Planned Behavior* tersebut niat dijadikan sebagai faktor utama dalam memprediksi tindakan *whistleblowing* seseorang.

Menurut Ajzen (1991) Teori Perilaku Terencana (*theory of planned behaviour*) mendefinisikan sikap sebagai jumlah dari perasaan (afeksi) yang dirasakan seseorang untuk mendukung atau menolak suatu objek yang dihadapi dan perasaan yang dirasakan tersebut diukur dengan skala *evaluative* seperti baik atau buruk, setuju atau tidak setuju dan penting atau tidak penting. Terdapat tiga tipe keyakinan dasar yang digunakan oleh Ajzen (1991) untuk mengukur *intention whistleblowing* seseorang.

2. Whistleblowing

Peters dan Branch (1972) mendefinisikan *whistleblowing* sebagai suatu pengungkapan oleh karyawan mengenai suatu informasi yang diyakini mengandung pelanggaran hukum, peraturan, pedoman praktis atau pernyataan profesional, atau berkaitan dengan kesalahan prosedur, korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau membahayakan publik dan keselamatan tempat kerja. Menurut Zimbleman (2017:453), program *whistleblowing* yang baik merupakan salah satu alat pencegahan kecurangan yang paling efektif.

Pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing*) adalah pengungkapan tindakan atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pinn organisasi atau lembaga lainnya dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia (*confidential*) (Tuanakotta and Theodorus, 2018)

3. Pegawai Negeri Sipil

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 1, menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) berkedudukan sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Kesetiaan dan ketaatan yang penuh tersebut mengandung pengertian bahwa PNS berada sepenuhnya di bawah pemerintah. Pegawai Negeri merupakan aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan di Indonesia (Wakerkwa, Falah dan Safkaur, 2018)

Komitmen Organisasi

Menurut Colquitt, Lepine, dan Wesson (Wibowo, 2017) komitmen organisasi adalah sebagai keinginan pada Sebagian pekerja untuk tetap menjadi anggota organisasi. Robbins (2008), mendefinisikan komitmen pada organisasi yaitu sampai ditingkat mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk memelihara keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Berdasarkan definisi tersebut menunjukkan bahwa komitmen organisasi memiliki arti lebih dari sekedar loyalitas yang pasif, tetapi juga melibatkan hubungan aktif dan keinginan karyawan untuk memberikan kontribusi yang berarti pada organisasinya.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Komitmen organisasi adalah persepsi yang mencerminkan sejauhmana seorang individu mengenal dan terikat dengan organisasinya. Seorang individu yang memiliki komitmen tinggi kemungkinan akan melihat dirinya sebagai anggota sejati organisasi. Sebaliknya,

seorang individu yang memiliki komitmen yang rendah lebih cenderung untuk melihat dirinya sebagai orang luar untuk mengekspresikan ketidakpuasan yang lebih besar menyangkut kondisi kerja, dan tidak ingin melihat dirinya sendiri menjadi anggota jangka panjang dari organisasi.

4. Personal Cost (Biaya Personal)

Bagustianto dan Nurkholis (2015) menjelaskan *Personal cost of reporting* merupakan pandangan pegawai terhadap risiko pembalasan atau balas dendam atau sanksi dari anggota organisasi, yang dapat mengurangi minat pegawai pemda untuk melakukan *wrongdoing*. *Personal cost of reporting* adalah pandangan pegawai terhadap risiko pembalasan/balas dendam atau sanksi dari anggota organisasi, yang dapat mengurangi minat pegawai untuk melaporkan *wrongdoing* (Schultz et al., 1993).

Menurut (Sabang, 2013), *Personal Cost* tidak hanya mendapatkan risiko balas dendam dari pelaku kecurangan, melainkan juga tindakan pelapor untuk melaporkan kecurangan akan dianggap sebagai tindakan tidak etis dari anggota organisasi yang dimaksud dapat saja berasal dari manajemen, atasan, atau rekan kerja.

5. Reward

Menurut Fahmi (2016:64) *Reward* merupakan bentuk pemberian balas jasa yang diberikan kepada seseorang karyawan atas prestasi pekerjaan yang dilakukan, baik berbentuk finansial maupun non finansial. Menurut Simamora (2004) *reward* adalah insentif yang mengaitkan bayaran atas dasar untuk dapat meningkatkan produktivitas para karyawan guna mencapai keunggulan yang kompetitif, dengan kata lain *reward* yang diberikan kepada karyawan adalah sebagai wujud dorongan agar karyawan mau bekerja dengan lebih baik sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan serta meningkatkan produktivitas perusahaan. Pemberian *reward* juga digunakan oleh organisasi atau perusahaan sebagai salah satu cara memberikan stimulus loyalitas seseorang terhadap perusahaan itu sendiri, sehingga secara tidak langsung pemberian *reward* kepada seseorang dapat membantu dalam mengungkapkan kecurangan

yang terjadi dalam suatu perusahaan ataupun organisasi.

6. Sikap

Menurut Damiati (2017), sikap merupakan suatu ekspresi perasaan seseorang yang merefleksikan kesukaannya atau ketidaksukaannya terhadap suatu objek. Sikap adalah perasaan positif atau negatif atau keadaan mental yang selalu disiapkan, dipelajari, dan diatur melalui pengalaman, yang memberikan pengaruh khusus pada respon seseorang terhadap orang, objekobjek atau keadaan. Park dan Blenkinsopp (2009) mendefinisikan sikap sebagai penilaian seorang individu atas seberapa setuju atau tidak setujunya individu tersebut terhadap suatu perilaku/tindakan tertentu. Menurut *theory of planned behavior* (TPB), sikap adalah salah satu variabel yang mempengaruhi minat perilaku seseorang.

Menurut Rizky (2014) sikap terdiri dari beberapa indikator yakni:

1. Melindungi organisasi dari dampak yang buruk akibat perilaku fraud atau korupsi.
2. Melawan korupsi.
3. Menjalankan kewajiban sebagai PNS.
4. Menegakkan kewajiban etis dan keyakinan moral

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif yang merupakan pendekatan yang berlandaskan pada filsafat *positifisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016:23) data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan (*scoring*). Data kuantitatif merupakan data yang memiliki kecenderungan dapat dianalisis dengan cara atau teknik statistik.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung pada objek penelitian. dalam penelitian ini diperoleh melalui metode survei menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada pada objek penelitian yaitu jurnal penelitian sebelumnya.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survey yang digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesis. Menurut Sugiyono (2018:4) mengemukakan penelitian survey adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Pemerintah Daerah Timor Tengah Utara. Penelitian ini dimulai sejak Agustus 2021 sampai dengan selesai.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik (Sugiyono, 2016). Berdasarkan pengertian diatas, maka populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara yang terdapat Pada Kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (PKO), Kantor Dinas Keuangan dan Badan Kepegawaian Daerah.

Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini sampel yang digunakan ialah *purposive sampling method* dengan jumlah sampel 132 orang yang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan. *Purposive sampling* merupakan pengambilan sampel berdasarkan kriteria peneliti mengenai siapa saja yang memenuhi

kriteria untuk dijadikan sampel. Alasan menggunakan metode sampel ini karena banyak batasan jika diambil sampel secara random (acak). Kriteria dalam pemilihan responden adalah:

1. Merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2. Tingkat pendidikan Minimal S1/D4
3. Pengalaman Bekerja Minimal 3 Tahun

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara (Sugiyono, 2016). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner (angket). Kuesioner dalam penelitian ini diukur dengan skala *likert* yang terdiri dari lima poin. Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2016).

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan prosentase (Sugiyono, 2016).

Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Validitas suatu instrument penelitian akan ditentukan oleh proses penelitian yang akurat. Menurut Ghazali (2016), mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan atau pernyataan dengan total skor konstruk atau variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$, dalam hal ini n adalah jumlah sampel.

- Hasil r hitung $>$ r tabel = valid
- Hasil r hitung $<$ r tabel = tidak valid
- Jika r hitung (tiap butir dapat dilihat pada *collom corrected item – total correlation*) lebih besar dari r tabel dan nilai r positif maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas bertujuan untuk mengukur kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel. Ghazali (2016:48) menyatakan bahwa suatu kuisisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban dari responden terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam pengujian ini, peneliti mengukur reliabelnya variabel dengan melihat *cronbach's alpha* $>$ 0,60 (Ghozali, 2016:48). Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang.

Uji Regresi Linear Berganda

Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan regresi linier berganda, yaitu untuk mengetahui pengaruh antara beberapa atau lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2018). Analisis regresi berganda akan dilakukan untuk mengetahui hubungan antar variabel independennya minimal 2 variabel.

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel independen apakah masing-masing variabel berhubungan positif dan negatif dan untuk memprediksi nilai serta variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Model analisis regresi linier

berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y : *Whistleblowing*

α : Konstanta, berpotongan garis pada sumbu X

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien Regresi Variabel X

X_1 : *Komitmen Organisasi*

X_2 : *Personal Cost*

X_3 : *Reward*

X_4 : *Sikap*

e : *Standar Error/Residual*

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t , uji F dan uji determinasi (R^2).

1. Uji hipotesis secara parsial atau individu (Uji t)

Menurut Ghazali (2016:171) pengujian hipotesis secara parsial atau individual merupakan pengujian hipotesis koefisien regresi berganda dengan hanya satu B (B_1, B_2, B_3 , atau B_4) yang mempengaruhi Y .

Langkah-langkah dalam uji hipotesis secara parsial atau individu, yaitu:

- Merumuskan hipotesis
- Menentukan taraf nyata

Tingkat signifikan sebesar 5% taraf nyata dari t tabel ditentukan dari derajat bebas (df) = $n-k-1$ (k adalah variabel independen) t tabel statistik pada signifikansi $0,05/2 = 0,025$ tabel (uji 2 sisi).

- Apabila t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak dan apabila t hitung $<$ t tabel maka H_0 diterima. Hal ini dapat dicari berdasarkan probabilitas tingkat signifikan ditolak jika P value $<$ 5% dan tingkat signifikan diterima jika P value $>$ 5%.

d. Kesimpulan

Menarik kesimpulan H_0 ditolak apabila t hitung $>$ t tabel atau H_0 diterima apabila t hitung $<$ t tabel.

2. Uji hipotesis secara simultan atau bersama (Uji F)

Menurut Ghazali (2016:171) pengujian hipotesis secara simultan atau bersamaan merupakan pengujian hipotesis koefisien regresi berganda dengan X_1 dan X_2 secara bersama-sama mempengaruhi Y . Langkah-

langkah dalam uji hipotesis secara simultan atau bersama, yaitu:

- a. Merumuskan hipotesis
 - b. Menentukan taraf nyata dari tabel ditentukan dari derajat bebas (db) = $n - k - 1$. Taraf nyata (α) berarti nilai t tabel, taraf nyata dari f tabel ditentukan dengan derajat bebas (db) = $n - k - 1$. H_0 ditolak apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$. H_a diterima apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$
 - c. Menarik kesimpulan H_0 ditolak apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau H_0 diterima apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$.
3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu, semakin mendekati 0 maka koefisien determinasi semakin kecil pengaruhnya terhadap variabel bebas, sebaliknya semakin mendekati 1 besarnya koefisien determinasi semakin besar pengaruhnya terhadap variabel bebas (Ghozali, 2016:95). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan *adjusted R²* berkisar antara 0 dan 1. Jika nilai *adjusted R²* semakin mendekati 1 maka semakin baik kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel independen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Berdasarkan hasil pengujian validitas data dapat diketahui bahwa pernyataan yang terdapat didalam kuesioner mengenai niat melakukan tindakan *whistleblowing*, komitmen organisasi, *personal cost*, *reward* dan sikap memiliki r-hitung lebih besar dari pada r-tabel yang sebesar 0,171. Pernyataan dalam kuesioner mengenai niat melakukan tindakan *whistleblowing*, komitmen organisasi, *personal cost*, *reward* dan sikap yang terdapat dalam kuesioner dapat dikatakan valid dan dapat dilakukan pengujian pada tahap selanjutnya.

b. Uji Realibilitas

Berdasarkan hasil pengujian realibilitas untuk instrument yang ada dalam kuesioner mengenai niat melakukan tindakan *whistleblowing*, komitmen organisasi, *personal cost*, *reward* dan sikap memiliki nilai Cronbach's Alpha (α) yang lebih besar dari 0,7. Dengan demikian item-item pernyataan dalam kuesioner mengenai niat melakukan tindakan *whistleblowing*, komitmen organisasi, *personal cost*, *reward* dan sikap bisa dikatakan reliabel atau andal. Dengan begitu, data tersebut bisa digunakan untuk pengujian pada tahap selanjutnya.

2. Uji Statistik Deskriptif

Niat melakukan tindakan *Whistleblowing*, menunjukkan bahwa n atau jumlah data setiap variabel yang valid berjumlah 132, dari 132 data sampel sistem informasi akuntansi penggajian (Y), nilai minimum sebesar 21, nilai maksimum sebesar 52, nilai mean sebesar 37,14, serta nilai standar deviasi sebesar 5,724.

Komitmen Organisasi, menunjukkan bahwa n atau jumlah data setiap variabel yang valid berjumlah 132, dari 132 data sampel sistem informasi akuntansi penggajian (X1), nilai minimum sebesar 13, nilai maksimum sebesar 28, nilai mean sebesar 22,77, serta nilai standar deviasi sebesar 3,130.

Personal Cost, menunjukkan bahwa n atau jumlah data setiap variabel yang valid berjumlah 132, dari 132 data sampel sistem informasi akuntansi penggajian (X2), nilai minimum sebesar 14, nilai maksimum sebesar 30, nilai mean sebesar 21,72, serta nilai standar deviasi sebesar 2,463.

Reward, menunjukkan bahwa n atau jumlah data setiap variabel yang valid berjumlah 132, dari 132 data sampel sistem informasi akuntansi penggajian (X3), nilai minimum sebesar 11, nilai maksimum sebesar 35, nilai mean sebesar 24,27, serta nilai standar deviasi sebesar 4,525.

Sikap, menunjukkan bahwa n atau jumlah data setiap variabel yang valid berjumlah 132, dari 132 data sampel sistem informasi akuntansi penggajian (X4), nilai minimum sebesar 12, nilai maksimum sebesar 20, nilai mean sebesar 17,54, serta nilai standar deviasi sebesar 5,724.

3. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Berdasarkan hasil penelitian nilai dari Asymp. Sig (2-tailed) dari penelitian ini sebesar 0,156. Nilai Asymp. Sig yang sebesar 0,156, mempunyai nilai yang lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditentukan dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,05. Maka kita bisa mengatakan bahwa variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini merupakan data yang mempunyai sebaran terdistribusi normal sehingga penelitian ini bisa dilanjutkan pada tahap yang berikutnya.

b. Uji Multikolinieritas

Untuk menentukan apakah terjadi multikolinieritas atau tidak di dalam suatu penelitian kita bisa melihat dari nilai *tolerance value* dan *inflation factor* (VIF). Jika di dalam sebuah penelitian memiliki nilai *tolerance* > dari 0,10 dan memiliki nilai VIF < dari 10, maka bisa kita katakan bahwa model persamaan regresi tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen.

Hasil uji multikolinieritas ketahui bahwa variabel komitmen organisasi, *personal cost*, dan *reward* dan sikap mempunyai nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan juga mempunyai nilai VIF kurang dari 10. Dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa keempat variabel independen tersebut tidak ada unsur terjadinya multikolinieritas.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan uji *coeficients^a*. Uji *coeficients^a* untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Variabel penelitian dikatakan tidak terdapat heterokedastisitas apabila nilai signifikansi antara variabel independen dengan nilai absolute residual lebih besar dari 5% atau 0,05.

4. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linier Berganda Penelitian ini menggunakan model regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

Pada uji model regresi linier berganda diatas, maka kita menentukan persamaan dari

variabel komitmen organisasi, *personal cost*, *reward* dan sikap yang berpengaruh terhadap niat melakukan tindakan *whistleblowing*. Persamaan hasil regresi linier berganda tersebut sebagai berikut:

$$Y = 7,273 + 0,457X_1 + 0,224 X_2 - 0,025X_3 + 0,098X_4 + \epsilon$$

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda yang telah dilakukan, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Konstanta

- Hasil dari uji regresi linier berganda dalam penelitian ini didapat nilai konstanta koefisien α sebesar 7,273. Ini dapat diinterpretasikan jika seluruh variabel independen dalam penelitian ini konstan atau bernilai nol (0). Maka besarnya niat untuk melakukan tindakan *whistleblowing* adalah sebesar 7,273.
- Hasil dari uji regresi linier berganda dalam penelitian ini di dapat nilai koefisien dari variabel komitmen organisasi sebesar 0,457. Ini dapat diinterpretasikan jika variabel komitmen organisasi meningkat satu satuan maka niat untuk melakukan tindakan *whistleblowing* akan meningkat sebesar 0,457, dengan asumsi nilai koefisien variabel independen yang lainnya dalam penelitian ini adalah konstan atau bernilai nol (0).
- Hasil dari uji regresi linier berganda dalam penelitian ini di dapat nilai koefisien dari variabel *personal cost* sebesar 0,224. Ini dapat diinterpretasikan jika variabel *personal cost* meningkat satu satuan maka niat untuk melakukan *whistleblowing* akan meningkat sebesar 0,224, dengan asumsi nilai koefisien variabel independen lainnya dalam penelitian ini konstan atau bernilai 0.
- Hasil dari uji regresi linier berganda dalam penelitian ini di dapat nilai koefisien dari variabel *reward* sebesar 0,025. Ini dapat diinterpretasikan jika variabel *reward* meningkat satu satuan maka niat untuk melakukan tindakan *whistleblowing* akan menurun sebesar 0,025 dengan asumsi nilai koefisien variabel independen lainnya dalam penelitian ini konstan atau bernilai nol (0).
- Hasil dari uji regresi linier berganda dalam penelitian ini di dapat nilai koefisien dari variabel sikap sebesar 0,098. Ini dapat

diinterpretasikan jika variabel sikap meningkat satu satuan maka niat untuk melakukan tindakan *whistleblowing* akan meningkat sebesar 0,098 satu satuan dengan asumsi nilai koefisien dari variabel independen lainnya dalam penelitian ini konstan atau bernilai nol (0).

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil dari uji regresi linier berganda yang ditunjukkan pada tabel 4.11 didapat nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,130. Nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini menunjukkan besarnya kontribusi dari variabel-variabel independen untuk mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini, nilai dari koefisien determinasinya sebesar 0,130. Ini dapat diinterpretasikan bahwa variasi dari variabel-variabel independen yang terdapat dalam penelitian ini hanya bisa menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi niat pegawai PEMDA melakukan tindakan *whistleblowing* sebesar 0,130 atau 13,0%.

3. Uji Statistik F

Hasil uji regresi linier berganda dalam penelitian ini, dapat dilihat bahwa nilai statistik F sebesar 7,509. Dapat dilihat pula nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000^a, nilai ini lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi linier berganda dalam penelitian ini bisa digunakan untuk memprediksi niat melakukan tindakan *whistleblowing* (Y) dan juga dapat dikatakan bahwa komitmen organisasi, *personal cost*, *reward* dan sikap secara bersama-sama berpengaruh terhadap niat untuk melakukan *whistleblowing*.

4. Uji - t

Dalam penelitian ini uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individu mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen secara individu bisa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen jika nilai p value (sig) lebih kecil dari tingkat signifikansi dalam penelitian ini. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 5% atau 0,05.

Hasil uji regresi linier berganda nilai probabilitas uji-t dari variabel komitmen organisasi adalah sebesar 0,433. Nilai probabilitas uji-t yang dimiliki oleh variabel komitmen organisasi ini mempunyai nilai yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang

diterapkan dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,05. Maka bisa kita simpulkan bahwa variabel komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap niat melakukan *whistleblowing*, maka H1 ditolak.

Hasil uji regresi linier berganda nilai probabilitas uji-t dari *personal cost* adalah sebesar 0,000. Nilai probabilitas uji-t yang dimiliki oleh variabel komitmen organisasi mempunyai nilai yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,05. Maka bisa kita simpulkan bahwa variabel *personal cost* tidak berpengaruh signifikan terhadap niat untuk melakukan *whistleblowing*, maka H2 diterima.

Hasil uji regresi linier berganda nilai probabilitas uji-t dari variabel *reward* adalah sebesar 0,572. Nilai probabilitas uji-t yang dimiliki oleh variabel *reward* mempunyai nilai lebih besar dari tingkat signifikansi yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,05. Maka bisa kita simpulkan bahwa variabel *reward* tidak berpengaruh signifikan terhadap niat untuk melakukan *whistleblowing*, maka H3 ditolak.

Hasil uji regresi linier berganda nilai probabilitas uji-t dari variabel sikap adalah sebesar 0,572. Nilai probabilitas uji-t yang dimiliki oleh variabel sikap mempunyai nilai yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,05. Maka bisa kita simpulkan bahwa variabel sikap tidak berpengaruh signifikan terhadap niat untuk melakukan tindakan *whistleblowing*, maka H4 ditolak.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil uji hipotesis diatas, maka dapat diketahui bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap niat melakukan *whistleblowing*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Yaya (2016) bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap niat melakukan tindakan *whistleblowing*.

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh, peneliti menemukan pegawai yang tidak percaya bahwa laporan tentang kecurangan akan ditindak lanjuti oleh organisasinya atau tindak lanjutnya kurang memuaskan. Selain itu alasan yang paling mendasar bahwa pegawai cenderung takut

dikenai sanksi ketika melakukan tindakan *whistleblowing* maka akan dimutasikan hanya karena menyatakan kebenaran. Dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan bahwa selama ini banyak ASN yang dimutasikan hanya karena berusaha untuk melakukan tindakan *whistleblowing* dan melihat bahwa pimpinan melakukan kesalahan maka dikenai sanksi dan dimutasikan.

Berdasarkan hasil uji hipotesis diatas, maka dapat diketahui bahwa *personal cost* (H2) berpengaruh signifikan terhadap niat melakukan *whistleblowing*. Peneliti menemukan bahwa, adanya persepsi pegawai di pemerintah daerah TTU sebagai *whistleblower* bahwa dampak kerugian secara fisik, ekonomi dan psikologis berpengaruh dalam pembuatan keputusan etis. Niat pegawai untuk melaporkan adanya pelanggaran adalah lebih rendah karena tingkat *personal cost* yang tinggi menyebabkan *whistleblower* lebih baik diam karena mempertimbangkan retaliasi dari orang-orang di dalam organisasi yang menentang tindakan pelaporan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Schutlz et al., 1993) yang menyatakan bahwa *Personal cost of reporting* adalah pandangan pegawai terhadap risiko pembalasan atau balas dendam atau sanksi dari anggota organisasi, yang dapat mengurangi minat pegawai untuk melaporkan *wrongdoing*. Anggota organisasi yang dimaksud dapat saja berasal dari manajemen, atasan, atau rekan kerja. Beberapa pembahasan dapat terjadi dalam bentuk tidak berwujud (*intangibile*), misalnya penilaian kinerja yang tidak seimbang, hambatan kenaikan gaji, pemutusan kontrak kerja, atau dipindahkan ke posisi yang tidak diinginkan (Curtis, 2006). Semakin besar persepsi *personal cost* seseorang maka akan semakin berkurang minat orang tersebut untuk melakukan tindakan *whistleblowing*.

Berdasarkan hasil uji hipotesis diatas, maka dapat diketahui bahwa *reward* tidak berpengaruh signifikan terhadap niat pegawai pemerintah Daerah Kabupten Timor Tengah Utara untuk melakukan tindakan *whistleblowing*. Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh, dalam pengisian kuesioner pegawai pemnda TTU cenderung memelih sangat setuju

sehingga dalam uji yang dilakukan *Reward* tidak berpengaruh.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Marantika, Yuniarta dan Anantawikrama (2017) menyatakan bahwa variabel pemberian *reward* berpengaruh positif terhadap minat pegawai negeri sipil untuk melakukan *whistleblowing*. Hasil penelitian yang sama juga terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Yoehanatan Givani (2016) pemberian *reward* akan meningkatkan niat untuk melaporkan kecurangan (*whistleblowing*) namun juga meningkatkan risiko adanya laporan palsu. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Widya Wahyuningsih (2016) menyatakan bahwa *reward* tidak berpengaruh signifikan positif terhadap *whistleblowing*.

Sikap terhadap *whistleblowing* merupakan keyakinan bahwa tindakan yang dilakukan memiliki dampak positif, Hal ini mungkin disebabkan karena iklim *benevolence* tidak eksis dalam lingkungan kerja pegawai pemerintahan daerah kabupaten TTU sehingga dalam melakukan *whistleblowing* internal tidak menitikberatkan pada kepentingan kelompok tertentu (*team interest*).

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya dalam penelitian Ahmad (2011) yang menyatakan bahwa sikap tidak berpengaruh signifikan terhadap niat untuk melakukan *whistleblowing* internal karena iklim tersebut tidak eksis dalam lingkungan internal organisasi, seperti melindungi organisasi, memberantas korupsi, memunculkan efek jera, menumbuhkan budaya anti korupsi serta ingin mendapatkan reputasi dan penghargaan. Selanjutnya keyakinan akan sikap tersebut dievaluasi oleh sistem penilaian individu dan memunculkan tindakan emosional. Winardi (2013) juga menemukan bahwa sikap memiliki pengaruh positif terhadap *whistleblowing internal*.

PENUTUP

Kesimpulan

Berpedoman pada paparan data dan pembahasan terhadap topik permasalahan yang dibahas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa,

1. Komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap niat melakukan tindakan

whistleblowing. Hal ini disebabkan adanya tingkat komitmen organisasi para Pegawai Negeri Sipil yang tergolong rendah. Adanya komitmen yang rendah ini menjadikan para pegawai berperilaku tidak peduli dengan hal-hal yang mungkin terjadi didalam organisasinya. Hal ini yang menyebabkan mereka tidak akan melaporkan kecurangan yang mungkin terjadi dalam organisasi.

2. *Personal cost* berpengaruh terhadap niat melakukan tindakan *whistleblowing*. Hal ini disebabkan adanya *Personal cost* membuat Pegawai Pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara akan merasa aman, karena pelapor tidak menggunakan identitas asli. Sehingga dengan adanya *Personal cost* akan mendorong atau memotivasi Pegawai Pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara untuk melakukan tindakan *whistleblowing*.
3. *Reward* tidak berpengaruh terhadap niat melakukan tindakan *whistleblowing* disebabkan karena sekarang ini sudah ada lembaga yang bernama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang akan melindungi saksi dan korban dari ancaman pelaku kecurangan tersebut.
4. Sikap berpengaruh terhadap niat melakukan *whistleblowing*. Pemberian *reward* ini dapat memotivasi atau mendorong niat pegawai Pegawai Pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara untuk melakukan tindakan *whistleblowing*.
5. Komitmen organisasi dan *reward*, *personal cost* dan sikap berpengaruh signifikan terhadap niat pegawai pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam melakukan tindakan *whistleblowing*. Hal ini dapat dilihat dari pengaruh yang diberikan dalam pengujian ini senilai 13,0%, artinya kelemahan atau kekurangan yang terjadi pada perusahaan dapat diselesaikan apabila keempat variabel dapat bekerja dan berjalan dengan baik.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis merekomendasikan sebagai berikut, penelitian Deskriptif Kuantitatif tersebut bermanfaat bagi Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Timor

Tengah Utara, Para PNSD Kabupaten Timor Tengah Utara, dan peneliti.

1. Bagi Objek Penelitian

Pemerintah Daerah kabupaten Timor Tengah Utara mampu meningkatkan komitmen organisasi, *personal cost*, *reward*, dan sikap pegawai guna menekan tindakan *whistleblowing* yang dilakukan oleh pegawai sehingga pegawai menjadi lebih jujur dan terbuka dalam pengungkapan tindakan *whistleblowing* yang dilakukan oleh pegawai yang lain ataupun atasanya sendiri.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Sampel yang digunakan sebaiknya lebih banyak lagi agar hasil dari kesimpulannya dapat digeneralisasikan dan hasilnya lebih valid lagi dan memberikan pemahaman umum terkait *whistleblowing* saat pembagian kuesioner sehingga responden saat pengisian bisa lebih memahami *whistleblowing*. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan atau menggunakan topik yang sama, sebaiknya disarankan untuk menambah variabel independen lain seperti saluran pelaporan anonim, tingkat keseriusan kecurangan, budaya ewuh-pakewuh, persepsi, norma subjektif, kontrol perilaku, *selfefficacy* yang belum terdapat dalam penelitian ini. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan teknik analisis yang berbeda seperti menggunakan teknik *mixed method* untuk dapat melihat faktor – faktor yang mempengaruhi minat pegawai melakukan tindakan *whistleblowing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Albercth, D. (2014) *Akuntansi Forensik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bagustianto, R. and Nurkholis (2015) 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minta Pegawai Negeri Sipil (PNS) Untuk Melakukan Tindakan Whistle-Blowing', *Ekonomi Dan Keuangan*, 19(2), pp. 276–295.
- Curtis, M. B. (2006) 'Are Audit-Related Ethical Decisions Dependent Upon Mood?', *Journal of Bussiness Ethics*, 68.
- Damiati, D. (2017) *Perilaku Konsumen*. Depok: PT. Rajagrafindo Persad.
- Dianingsih, D. H. and Pratolo, S. (2018)

- ‘Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Intensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Untuk Melakukan Tindakan Whistleblowing: Studi Empiris pada Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Pemerintah Kota serta Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta’, *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 2(1), pp. 51–63. doi: 10.18196/rab.020120.
- Park, H. and Blenkinsopp, J. (2009) ‘Whistleblowing as planned behavior - A survey of south korean police officers’, *Journal of Business Ethics*, 85(4), pp. 545–556. doi: 10.1007/s10551-008-9788-y.
- Schultz, J. J. *et al.* (1993) ‘An Investigation of the Reporting of Questionable Acts in an International Setting’, *Journal of Accounting Research*, 31.
- Sugiyono (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta,cvAS.
- Tuanakotta and Theodorus, M. (2018) *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- ‘Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1. (2014).’ (no date).
- Wakerkwa, R., Falah, S. and Safkaur, O. (2018) ‘Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk Melakukan Tindakan Whistle-Blowing Pada PEMDA Propinsi Papua.’, *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset*, 1(1), pp. 42–57.
- Winardi Ridajh Djatu (2013) ‘The Influence of Individual and Situational Factors on Lower-Level Civil Servants ’ Whistle-Blowing’, *Journal of Indonesian Economy and Business*, 28(3), p. 2013.
- Zimbelman, M. F. *et al.* (2017) *Akuntansi Forensik*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

**SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)
PERSEDIAAN ALAT KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH (RSUD) KOTA BAJAWA**

Erwinda Novelania Meo

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
windameo38@gmail.com

Linda Lomi Ga

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana

Herly M. Oematan

herly.oematan@staf.undana.ac.id
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana

ABSTRAK

Persediaan alat-alat kesehatan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kualitas pelayanan disuatu rumah sakit. Agar dapat terkoordinasi dengan baik, pelaksanaan kegiatan khususnya mengenai persediaan alat-alat kesehatan didalam rumah sakit dibutuhkan suatu sistem pengendalian yang baik dan memadai untuk mengelola persediaan agar tidak terjadi penyelewengan atau kekurangan persediaan serta informasi mengenai persediaan dapat dipercaya. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Persediaan Alat Kesehatan yang dilakukan oleh RSUD Kota Bajawa. Pendekatan penelitian bersifat deskriptif kualitatif, dengan menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif. Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka peneliti menggunakan data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal persediaan khususnya persediaan alat-alat kesehatan pada RSUD Kota Bajawa sudah cukup efektif. Namun, masih dibutuhkan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem pencatatan yang masih dilakukan secara manual dan perlu dilakukan penambahan anggota atau staf yang memiliki kemampuan yang memadai dibagian logistik.

Kata Kunci: *Persediaan Alat-Alat Kesehatan, Sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).*

ABSTRACT

The supply of medical equipment is a factor that greatly effects the quality of service in a hospital. In order to be well coordinated, the implementation of activities, especially regarding the supply of medical devices in the hospital, requires a good and adequate control system to manage inventory so that there is no deviation or shortage of inventory and reliable information about inventory. Therefore, the purpose of this study was to determine the government's internal control system (SPIP) for the supply of medical devices carried out by the Bajawa City Regional General Hospital. The research approach is descriptive qualitative, using qualitative and quantitative data types. To obtain the necessary data, the researchers used primary data and secondary data.

The results of this study indicate that the internal control of inventory, especially the supply of medical equipment at the Bajawa City General Hospital, is quite effective. However, it is still necessary to evaluate and improve the recording system which is still done manually and it is necessary to add members or staffs who has adequate capabilities in the logistics section of the hospital.

Keywords: *Medical Equipment Supply, Government Internal Control System (SPIP).*

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk sektor publik yang diselenggarakan pemerintah dalam sektor kesehatan yaitu pendirian rumah sakit umum. Rumah sakit termasuk dalam perusahaan jasa yang didirikan dan diselenggarakan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk acuan perawatan, pemeriksaan, tindakan medis, dan tindakan diagnostik lain-lain yang dibutuhkan oleh masing-masing pasien dalam batas-batas teknologi dan sarana yang tersedia, namun perawatan terhadap pasien tidak akan maksimal jika persediaan yang dimiliki rumah sakit tidak lengkap (Safitri, 2015)

Menurut Agoes (2011) menjelaskan bahwa persediaan adalah aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan (*supplies*) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Usaha rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, bermutu dan berkesinambungan perlu didukung dengan ketersediaan alat kesehatan yang memenuhi standar. Alat kesehatan merupakan alat, aparat, mesin dan/atau *implant* yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014).

Agar dapat terkoordinasi dengan baik, melaksanakan pekerjaan rutin khususnya mengenai persediaan alat-alat kesehatan didalam rumah sakit dibutuhkan suatu sistem pengendalian internal yang baik dan memadai untuk mengolah data persediaan agar tidak terjadi penyelewengan maupun kekurangan persediaan serta informasi mengenai persediaan dapat dipercaya. Sistem pengendalian tersebut dikenal sebagai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan. Secara konseptual SPIP mengadopsi konsep sistem pengendalian internal yang dikembangkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the*

Treadway Commission (COSO). Menurut *COSO* dikutip dalam Romney, B and Steinbart (2011), hal. 231, lima komponen dalam pengendalian *COSO* yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bajawa adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada yang melayani masyarakat umum dan BPJS. Didirikan pada tahun 1931 pada masa pemerintahan Belanda dan merupakan rumah sakit dengan tipe C yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yaitu, pelayanan IGD 24 jam, pelayanan rawat inap, pelayanan rawat jalan di wilayah kabupaten Ngada.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngada (2019), rumah sakit umum daerah Kota Bajawa merupakan satu-satunya rumah sakit yang ada di Kabupaten Ngada. Hal tersebut dapat dilihat dari data tentang fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Ngada yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Ngada, 2018

No	Kecamatan	Rum ah Sakit	Pus kes mas	Posya ndu	Balai Pengo batan
	(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Aimere	0	1	21	0
2	Jerebuu	0	2	20	0
3	Inerie	0	1	16	0
4	Bajawa	1	3	64	0
5	Golewa	0	2	33	1
6	Golewa Selatan	0	2	23	0
7	Golewa Barat	0	1	25	1
8	Bajawa Utara	0	1	30	0
9	Soa	0	1	22	1
10	Riung	0	2	52	0
11	Riung Barat	0	2	34	0
12	Wolomeze	0	1	17	0
Jumlah/Total		1	19	357	3

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kab. Ngada 2019

Dilihat dari tabel 1.1 di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah fasilitas kesehatan di kabupaten Ngada terdiri dari 1 rumah sakit umum, 19 puskesmas, 357 posyandu, dan 3 balai pengobatan yang tersebar diberbagai daerah di kabupaten Ngada. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan petugas di RSUD Kota Bajawa, peneliti mendapatkan informasi bahwa RSUD Kota Bajawa menerapkan unsur sistem pengendalian internal menurut PP Nomor 60 Tahun 2008. Namun, dalam kegiatan operasionalnya masih terdapat permasalahan yang terjadi yaitu pemesanan alat kesehatan yang menggunakan sistem *E-Catalog* masih terkendala sistem jaringan sehingga pemesanan alat kesehatan tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan pasien.

Sistem pengendalian internal persediaan diperlukan agar proses terselenggaranya persediaan alat-alat kesehatan di rumah sakit berjalan dengan lancar dan teratur serta adanya fungsi-fungsi yang bertanggung jawab sesuai tugasnya masing-masing dan dengan adanya pengawasan yang lebih intensif kecil kemungkinan terjadi penyimpangan dalam sistem pengendalian internal. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul "Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Persediaan Alat Kesehatan pada RSUD Kota Bajawa".

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Theory Agency*)

Teori keagenan (*theory agency*) merupakan teori utama atas pemanfaatan jasa satuan pengawas internal oleh instansi. Salah satu asumsi utama dari teori keagenan bahwa tujuan *principal* dan tujuan agen yang berbeda dapat menimbulkan konflik disebabkan manajer organisasi cenderung untuk mengejar tujuan pribadi, hal ini mengakibatkan kecendrungan manajer untuk memfokuskan pada proyek organisasi yang menghasilkan keuntungan yang tinggi dalam jangka pendek ataupun panjang daripada mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan pelayanannya di rumah sakit (Azizah S, 2016).

Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Mulyadi (2016) mengemukakan bahwa sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data

akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Komponen Pengendalian Internal Pemerintah

Pengendalian internal terdiri dari beberapa unsur-unsur yang saling berhubungan dalam suatu sistem. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 yang diadopsi dari COSO, pengendalian internal terdiri lima komponen yaitu:

- a. Lingkungan Pengendalian
- b. Penilaian Resiko
- c. Aktivitas Pengendalian
- d. Informasi dan Komunikasi
- e. Pemantauan

Pengertian Persediaan

Persediaan merupakan sejumlah barang jadi, bahan baku, dan barang dalam proses yang dimiliki perusahaan atau organisasi dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut (Rudianto, 2012).

Pengendalian Internal atas Persediaan

Pengendalian internal atas persediaan merupakan hal yang penting untuk membentuk keunggulan kompetitif jangka panjang. Tingkat persediaan mempengaruhi harga jual, kualitas, perekrutannya produk, kapasitas menganggur, waktu lembur, kemampuan merespon permintaan pelanggan, waktu tunggu, dan profitabilitas secara keseluruhan (Siregar, 2013).

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Kota Bajawa.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Persediaan Alat Kesehatan di RSUD Kota Bajawa.

Informan Penelitian

Penetapan informan dalam penelitian ini berdasarkan anggapan bahwa informan dapat memberikan informasi yang diinginkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Adapun informan yang masuk dalam kriteria penelitian ini adalah Bidang Pelayanan Penunjang Medik, Bagian Keuangan, dan Bagian Gudang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, wawancara, dan observasi.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data sesuai Miles dan Huberman.

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)
Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.
2. Reduksi Data (*Data Reduction*)
Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.
3. Penyajian Data (*Data Display*)
Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, *network*, atau grafis sehingga data dapat dikuasai.
4. Pengambilan Keputusan (*Verification*)
Berarti bahwa setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk itu diusahakan mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan dan sebagainya. Jadi, dari data tersebut berusaha diambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bajawa merupakan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada yang melayani masyarakat umum dan BPJS. RSUD Kota Bajawa didirikan pada masa pemerintahan Belanda, bertempat di Jalan Gajah Mada (sekarang kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BAPPEDA Kabupaten Ngada).

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008, terdiri dari:

1. Lingkungan Pengendalian
Lingkungan pengendalian yang dilakukan oleh RSUD Kota Bajawa sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Dilihat dari struktur organisasi yang diterapkan oleh RSUD Kota Bajawa terdapat struktur organisasi baik secara keseluruhan maupun setiap bagian sesuai SOP yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bersama ibu Anastasia Ringa, selaku Kasubag Keuangan yang mengatakan bahwa:

“Tentu saja ada. Kalau disini untuk bagian gudang sendiri itu untuk mengelola segala pengelolaan yang berkaitan dengan persediaan dan kalau untuk bagian pelaksana administrasi itu dia hanya mengelola hal-hal yang berkaitan dengan pembayaran atas pembelian alat-alat kesehatan, sehingga dia hanya mengelola faktur”.

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sudah ada pembagian tugas yang jelas pada setiap bidang yang ada di rumah sakit berdasarkan fungsinya masing-masing. Namun, terkait struktur organisasi dibagian logistik rumah sakit pengelolaan gudang masih disatukan. Hal ini didukung oleh pernyataan dari ibu Maria Angelina Bhebhe, selaku Bendahara Barang RSUD Kota Bajawa:

“Untuk di logistik rumah sakit untuk pengelolaan gudang, sekarang itu dia punya struktur organisasinya itu yang terkait dengan permintaan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran barang dan bagian pencatatan itu tuh masih disatukan. Karena kita disana masih satu pintu, jadi semuanya terarah disatu tempat yaitu di gudang logistik.

Jadi mulai dari pencatatan awal, penerimaan barang sampai dengan penyimpanan maupun pendistribusian barang ke unit pemakai dan juga bagian pencatatan itu semua kita masih satu pintu, sehingga alurnya itu tuh masih tetap satu. Jadi semua yang terkait itu tuh adanya di gudang logistik yang dikelola oleh ema sendiri sebagai penanggung jawab logistik umum dengan satu staf yang merupakan tenaga kontrak”.

2. Penilaian Resiko

Penilaian resiko atas pencatatan persediaan khususnya persediaan alat kesehatan di RSUD Kota Bajawa sudah dilakukan secara terus menerus dan dilakukan secara manual. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bersama ibu Anastasia Ringa, selaku Kasubag Keuangan RSUD Kota Bajawa:

“Untuk sistemnya sendiri kita belum ada karena kita masih melakukannya secara manual. Kendalanya kalau untuk pencatatan aset alat kesehatan itu pada saat bendahara menerima pemasukan barang, misalnya ada pengadaan alat kesehatan itu bendahara mencatat jumlah barang yang diterima terus

setelah itu nanti didistribusikan ke ruangan-ruangan untuk dicatat semua di dalam pembukuan bendahara. Itu didistribusikan ke ruangan-ruangan dengan kode barang sudah dikode semua oleh bendahara barang”.

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sistem pencatatan yang dilakukan oleh RSUD Kota Bajawa menggunakan sistem pencatatan secara manual. Kendala dalam melakukan pencatatan secara manual yaitu ketika bendahara menerima barang yang masuk, bendahara harus mencatat jumlah barang yang diterima. Setelah itu didistribusikan kesetiap ruangan dengan kode barang masing-masing dan dicatat dalam pembukuan bendahara. Hal ini didukung oleh pernyataan dari ibu Maria Angelina Bhebhe, selaku Bendahara Barang RSUD Kota Bajawa:

“Kendalanya itu ada misalnya ada kesalahan dalam proses pencatatan untuk pengamanannya itu nanti bendahara mencatat semua catatan atau data yang masuk setelah itu nanti di cross cek lagi dengan istilahnya itu KIR (Kartu Inventaris Ruangan) dan KIB (Kartu Inventaris Barang)”.

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian di RSUD Kota Bajawa yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang ada dibuat sesuai dengan perencanaan rumah sakit. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bersama ibu Maria Angelina Bhebhe, selaku Bendahara Barang RSUD Kota Bajawa:

“Kalau disini ema menjawab tentang dokumen pengadaan itu. Dokumen pengadaan itu dibuat sesuai dengan perencanaan dan juga dokumen itu didalamnya itu mengisi tentang spesifikasi barang, terus jangka waktu pelaksanaan pendistribusian barang, harga barang, dan juga semuanya sudah ada didalam sehingga terhadap suatu barang itu kita sudah bisa mengetahui dia punya nilainya, jumlahnya, dan kualitasnya. Terus didalam itu semua kegiatan itu berdasarkan dokumen-dokumen pengadaan. Jadi, tidak semua barang itu kita belanja langsung, tapi yang semuanya itu terkait dengan pengadaan harus kita gunakan pihak ketiga”.

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dokumen pengadaan dibuat sesuai dengan perencanaan yang berisi tentang

spesifikasi barang, jangka waktu pelaksanaan pendistribusian barang, dan harga barang sehingga terhadap suatu barang sudah bisa diketahui nilai, jumlah, dan kualitasnya. Hal ini didukung oleh pernyataan dari bapak Felix Fonu, Amd selaku Kasi Pelayanan Penunjang Medik RSUD Kota Bajawa:

“Iya. Artinya, terdapat lima faktur yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan arsip dan lainnya juga biasanya kartu persediaan. Faktur dengan kartu persediaan itu tuh biasanya itu dia sudah mencantumkan semua informasi yang dibutuhkan, contohnya itu tuh misalnya untuk tanggal keluar atau masuk, terus tanggal penerimaan, tanda tangan penerima, dan juga harga dari barang-barangnya itu tuh”.

4. Informasi dan Komunikasi

Pada RSUD Kota Bajawa, memastikan terjalannya komunikasi yang efektif, yaitu untuk mengetahui berfungsinya pengendalian internal dan menginformasikan mengenai kode etik yang berlaku dengan menggunakan berbagai bentuk sarana dalam mengkomunikasikan informasi penting. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh ibu Anastasia Ringa, selaku Kasubag Keuangan RSUD Kota Bajawa:

“Ya, kita disini itu melakukannya dengan menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, itu biasanya macam pedoman kebijakan dan prosedur, terus surat edaran rapat staf, ada juga laporan bulanan termasuk juga itu tuh tindakan pimpinan yang mendukung implementasi SPIP informasi dari sumber internal dan eksternal yang relevan dengan tugas dan fungsi itu telah diperoleh terus disampaikan kepada pimpinan”.

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sistem informasi dan komunikasi baik itu informasi fisik berupa dokumen maupun yang berupa informasi lisan antar sesama pegawai cukup baik. Hal ini dikarenakan adanya komunikasi antar bagian-bagian, misalnya komunikasi menggunakan telepon, mengadakan rapat bersama, dan transaksi-transaksi yang terjadi selalu dicatat. Hal ini didukung oleh pernyataan dari bapak Felix Fonu, Amd selaku Kasi Pelayanan Penunjang Medik RSUD Kota Bajawa:

“Ya, artinya itu disini kami melakukan informasi itu misalnya, berkomunikasi lewat telepon apabila ada hal-hal yang mendesak atau mungkin ada kesalahpahaman informasi, dikarenakan ruangan antar bagian yang satu dengan bagian yang lain itu tuh yaa lumayan agak jauh jadi supaya memudahkan itu kami menggunakan telepon. Ada juga dalam bentuk surat, kalo dalam bentuk surat itu tuh misalnya, ada pesanan dari setiap unit untuk kebutuhan alat kesehatan. Kemudian biasanya itu diadakan rapat bersama kepala ruangan dan kepala rumah sakit”

5. Pemantauan

Pengecekan dan evaluasi yang dilakukan di RSUD Kota Bajawa terhadap persediaan sudah dilakukan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bersama ibu Anastasia Ringa, selaku Kasubag Keuangan RSUD Kota Bajawa:

“Iya ada, biasanya dilakukan *crosscheck* setiap bulan dan biasanya itu pengecekannya dilaksanakan oleh bagian gudang. Untuk inspeksi atau evaluasinya biasanya pimpinan kami dalam hal ini Direktur RSUD Kota Bajawa sering melakukan *work round* atau inspeksi keliling terhadap unit-unit yang ada di RSUD Kota Bajawa. Jadi, bukan hanya unit yang mengurus soal peralatan kesehatan saja tetapi terhadap semua unit-unit atau bagian-bagian yang ada di lingkungan rumah sakit”.

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dilakukannya *stock opname* setiap bulan untuk dapat mengetahui jumlah barang yang adadikartu maupun dengan fisik barang sehingga bisa diketahui berapa jumlah barang dan lama penggunaan dari barang tersebut yang dapat memenuhi kebutuhan pasien di RSUD Kota Bajawa. Biasanya juga dilakukan *crosscheck* setiap bulan yang dilaksanakan oleh bagian gudang dan untuk evaluasi atau inspeksinya sendiri dilakukan oleh pimpinan rumah sakit dalam hal ini Direktur RSUD Kota Bajawa. Hal ini didukung oleh pernyataan dari bapak Felix Fonu, Amd selaku Kasi Pelayanan Penunjang Medik RSUD Kota Bajawa:

“Iya kalau pengecekannya itu pasti ada dan itu dilakukan oleh bagian gudang. Pengendalian resiko itu biasanya dilakukan evaluasi terhadap karyawan-

karyawan yang ada di rumah sakit. Nah, dari hasil tersebut maka didapatkan penilaian kinerja terhadap semua karyawan yang ada di RSUD Kota Bajawa”.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang dijalankan di RSUD Kota Bajawa sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Lingkungan pengendalian yang dilakukan di RSUD Kota Bajawa telah menggambarkan keseluruhan sikap yang mempengaruhi kesadaran dan tindakan anggota atau staf organisasi. Namun terkait dengan unsur kelima dari lingkungan pengendalian tentang struktur organisasi, pengelolaan gudang dibagian logistik rumah sakit masih disatukan. Pengelolaan gudang berkaitan dengan kegiatan permintaan, penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran barang serta pencatatan semuanya terarah disatu tempat yaitu gudang logistik yang hanya dikelola oleh satu penanggungjawab logistik umum ditambah dengan satu staf yang merupakan tenaga kontrak.

2. Penilaian Resiko

Penilaian resiko atas pencatatan persediaan khususnya persediaan alat kesehatan di RSUD Kota Bajawa sudah dilakukan dengan baik, karena disetiap pencatatan dilakukan *cross cek* lagi menggunakan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) dan Kartu Inventaris Barang (KIB). Namun, dalam unsur penilaian resiko RSUD Kota Bajawa perlu untuk melakukan evaluasi atas sistem pencatatan yang digunakan. Hal ini dikarenakan RSUD Kota Bajawa masih menggunakan sistem pencatatan secara manual yang dapat menimbulkan resiko seperti, pemalsuan catatan akuntansi, kegagalan tujuan dan sasaran, dan pelanggaran penggunaan dana.

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian yang dijalankan RSUD Kota Bajawa sudah dilaksanakan dengan baik, karena dokumen-dokumen yang ada dibuat sesuai dengan perencanaan dan memuat tentang spesifikasi barang, jangka waktu pelaksanaan pendistribusian, dan harga barang. Pemisahan fungsi tugas

mengenai kegiatan yang dilakukan oleh setiap karyawan sudah dilaksanakan dengan cukup baik, dimana ditempatkannya setiap karyawan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya dimasing-masing unit yang ada untuk meningkatkan pelayanan terhadap pasien. Namun, adapun sedikit persoalan yang terjadi dimana dibagian logistik rumah sakit mengalami kekurangan staf dalam melakukan pengelolaan gudang berkaitan dengan permintaan, penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran barang yang dikelola oleh satu penanggungjawab logistik umum dan satu staf tenaga kontrak. Terhadap persediaan peralatan yang rusak, terdapat bagian elektromedik yang berfungsi sebagai bagian yang melakukan pemeliharaan terhadap alat kesehatan. Terdapat penanggungjawab inventaris disetiap unit dalam pendistribusian alat kesehatan, sehingga jika terdapat kelalaian dari petugas maka unit tersebut harus bertanggungjawab atas kerusakan yang terjadi.

4. Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi dan komunikasi yang dijalankan oleh RSUD Kota Bajawa, baik itu informasi fisik berupa dokumen maupun yang berupa informasi lisan antar sesama pegawai dilaksanakan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya komunikasi antar bagian-bagian, misalnya komunikasi menggunakan telepon, mengadakan rapat bersama, dan transaksi-transaksi yang terjadi selalu dicatat. Adapun pedoman kebijakan dan prosedur, laporan bulanan termasuk tindakan pimpinan yang mendukung implementasi SPIP informasi dari sumber internal dan eksternal yang relevan dengan tugas dan fungsinya.

5. Pemantauan

Pengecekan dan evaluasi yang dilakukan di RSUD Kota Bajawa terhadap persediaan sudah dilakukan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya *stock opname* setiap bulan untuk dapat mengetahui jumlah barang yang adadikartu maupun dengan fisik barang sehingga bisa diketahui berapa jumlah barang dan lama penggunaan dari barang tersebut yang dapat memenuhi kebutuhan pasien di RSUD Kota Bajawa. Biasanya juga dilakukan *crosscheck* setiap bulan yang dilaksanakan

oleh bagian gudang dan untuk evaluasi atau inspeksinya sendiri dilakukan oleh pimpinan rumah sakit dalam hal ini Direktur RSUD Kota Bajawa.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau referensi dalam pencarian informasi yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Persediaan Alat Kesehatan dengan tetap membandingkan atau menyesuaikan dengan referensi yang sama.

2. Bagi Objek Penelitian

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti berusaha memberikan saran kepada RSUD Kota Bajawa yang bermanfaat dalam mengatasi kelemahan yang terdapat dalam sistem pengendalian internal atas persediaan alat kesehatan. Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan yaitu, diharapkan agar melakukan penambahan anggota atau staf yang memiliki kemampuan yang memadai untuk bertugas di bagian logistik agar dapat mencegah terjadinya kesalahan dan mempermudah kegiatan operasionalnya, dalam hal pencatatan yang masih dilakukan secara manual diperlukan alat bantu seperti komputer untuk mencegah kemungkinan terjadinya pemalsuan catatan akuntansi dan membuat pekerjaan menjadi lebih cepat dan mudah, dan kelengkapan alat komunikasi harus terus dijaga.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

1) Setelah dilakukan penelitian ini, diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar menggali lebih dalam lagi terkait Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Persediaan Alat Kesehatan dengan metode penelitian yang bervariasi.

2) Peneliti selanjutnya juga diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data agar penelitian yang dilakukan berjalan dengan baik.

3) Untuk keakuratan data disarankan untuk menggunakan data yang telah tersedia dan terpublikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2011) *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Azizah S (2016) 'Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur', *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(10).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngada (2019) *Kabupaten Ngada dalam Angka*. Edited by Bajawa.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2014) *Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 118/Menkes/SK/IV/2014 tentang Komentarium Alat Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Mulyadi (2016) *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 (2008) 'tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.'
- Romney, B, M. and Steinbart, P. J. (2011) *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rudianto (2012) *Pengantar Akuntansi dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Safitri (2015) 'Analisis Pengendalian Intern Atas Pelaksanaan Prosedur Persediaan Obat-Obatan pada Rumah Sakit PHC Surabaya.', *E-Journal Akuntansi "EQUITY"*, 1(2).
- Siregar, B. (2013) *Akuntansi Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Linus A. Ch Sakan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana

sakanren979@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan periode tahun 2015-2020 berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah dan Rasio Aktivitas Belanja Daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data sekunder berupa data time series Laporan Keuangan. Hasil penelitian dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan Kemandirian Keuangan Daerah memperoleh klasifikasi Kriteria rendah sekali karena berada pada interfal di bawah 25% dan cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun, Rasio Efektifitas PAD menunjukkan Efektifitas PAD memperoleh klasifikasi kriteria sangat efektif karena berada pada interfal di atas 100% dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, Rasio Efisiensi PAD menunjukkan Efisiensi PAD memperoleh klasifikasi kriteria sangat efisien karena berada pada interfal di bawah 60% dan cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun dan Rasio Aktivitas Belanja Daerah menunjukkan Aktivitas Belanja Daerah lebih diprioritaskan pada belanja rutin dari pada belanja modal dan belanja rutin cenderung menurun dari tahun ke tahun sedangkan belanja modal cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Kata kunci : Kinerja Keuangan, Laporan Keuangan, Rasio Keuangan.

ABSTRACT

This research was conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency of South Central Timor Regency. The purpose of this study was to determine the financial performance of the Regional Government of Timor Tengah Selatan Regency for the 2015-2020 period based on the Regional Financial Independence Ratio, Effectiveness Ratio of Regional Original Revenue, Efficiency Ratio of Regional Original Income and Regional Expenditure Activity Ratio. This study uses a quantitative descriptive method with secondary data in the form of time series data on Financial Statements. The results of the study using the Regional Financial Independence Ratio showed that Regional Financial Independence obtained a very low criteria classification because it was in the interval below 25% and tended to decrease from year to year, the PAD Effectiveness Ratio showed the PAD Effectiveness obtained a very effective criteria classification because it was in the interfal in above 100% and tends to increase from year to year, the PAD Efficiency Ratio shows PAD Efficiency obtains a very efficient criteria classification because it is at an interval below 60% and tends to decrease from year to year and the Regional Expenditure Activity Ratio shows that Regional Expenditure Activities are prioritized on routine expenditures rather than capital expenditures and routine expenditures tend to decrease from year to year while capital expenditures tend to increase from year to year.

Keywords: Financial Performance, Financial Statements, Financial Ratios.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu entitas telah melaksanakan tujuan entitas tersebut dengan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012). Pengukuran kinerja yang bersumber dari informasi finansial, seperti laporan keuangan, diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat (Mardiasmo, 2018). Oleh karena itu, Penilaian LKPD merupakan salah satu cara yang dapat dijadikan acuan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan analisis rasio-rasio keuangan. Hal ini berarti analisis rasio atas komponen dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat dimanfaatkan untuk mengetahui bagaimana kinerja pemerintah daerah yang kemudian dapat digunakan sebagai acuan untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang akhirnya diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan daerah (Atmojo, 2017)

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada SAP dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan *good governance* sehingga kinerja dari pemerintahan yang bersangkutan diharapkan akan semakin mudah untuk dinilai baik oleh kalangan tertentu maupun oleh masyarakat luas. Draft SAP yang mengatur mengenai penggunaan basis akrual baru terbit pada tahun 2010. Hal ini menyebabkan penerapan SAP berbasis akrual baru dapat dilaksanakan paling cepat 5 (lima) tahun setelah terbitnya peraturan tersebut yaitu pada tahun anggaran 2015. Hal ini menyebabkan penyusunan Laporan Keuangan tahun anggaran 2014 adalah penyusunan laporan keuangan paling akhir yang disusun dengan menggunakan basis akuntansi kas menuju akrual atau *Cash Toward Accrual* (CTA) (Agus, 2015).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2015, memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Laporan Keuangan tahun 2020 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (ntt.bpk.go.id). disisi lain mengenai struktur APBD pemerintah kabupaten Timor Tengah selatan 6 tahun terakhir periode

2015 – 2020 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada posisi pendapatan menunjukkan bahwa dana perimbangan masih mendominasi penerimaan daerah dibanding dengan pendapatan asli daerah. Dari uraian tersebut mengindikasikan masih tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap pemerintah pusat, kendati hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah selatan tahun 2019 dan tahun 2020 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dengan diperolehnya opini WTP pada tahun 2019 dan 2020 menunjukkan bahwa walaupun tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi dan juga terjadi transisi atau pergeseran basis akuntansi pemerintah di Indonesia dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual tidak membuat pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan menurunkan kinerjanya dalam menyusun laporan keuangan. Hal sebaliknya membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan mengalami peningkatan kualitas laporan keuangan yang dibuktikan dengan opini WTP atas laporannya. Hal ini menjadi alasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian berkaitan dengan analisis kinerja keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah.
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah.

4. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Rasio Aktivitas.

KAJIAN TEORI

Kajian Teoritis

Grand Teori

Grand theory yang mendasari penelitian ini merupakan bagian dari *agency theory* yaitu *stewardship theory*. *Stewardship* menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi Donaldson dan Davis, (1991) dalam (Anton, 2010).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Mahmudi, (2015) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja keuangan daerah adalah mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan, dimana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di dalam daerah. Data pengukuran kinerja keuangan yang

bersumber dari informasi finansial yang diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat, dapat menjadi peningkatan program selanjutnya demi menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas.

Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Laporan Keuangan digunakan untuk menginformasikan kondisi usaha sebuah Perusahaan, untuk dapat mengetahui perkembangan usaha yang sedang dijalankan maka unsur-unsur dalam laporan keuangan perlu diperbandingkan satu dengan yang lain dengan menggunakan alat analisis yang tepat yakni rasio keuangan. Untuk dapat mengukur kinerja keuangan sebuah perusahaan lazimnya menggunakan rasio keuangan yaitu dengan membandingkan pos-pos laporan keuangan. (Kerih, 2019).

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2012).

Bisma (2016:18) menjelaskan analisis kinerja keuangan diukur melalui perhitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur kinerja keuangan. Mahmudi, (2015) menjelaskan bahwa untuk menganalisis kemampuan keuangan yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, maka sekurang-kurangnya rasio keuangan yang dapat digunakan yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio keserasian belanja.

Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis sangat membutuhkan rasio keuangan untuk membantu menganalisis dan interpretasi laporan keuangan.

Rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam menghitung laporan keuangan daerah, antara lain:

Rasio Kemandirian Keuangan

Rasio Kemandirian Keuangan adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber

pendapatan yang telah diperlukan daerah (Mahsun, 2016:152). Secara matematis dapat di simpulkan dengan rumus:

Tabel 1. Rumus Rasio Kemandirian

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat + Pinjaman Daerah}} \times 100\%$$

Maka penilaian tingkat kemampuan keuangan dan kemandirian daerah sebagai berikut:

Tabel 2. Penilaian Kemandirian Keuangan daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)
Rendah sekali	Kurang dari 25%
Rendah	25% – 50%
Sedang	50% – 75%
Tinggi	75% - 100%
Sangat Tinggi	Diatas 100%

Sumber: Badan Litbang Depdagri.

Rasio Efektifitas

Munawar (2016) menjelaskan bahwa analisis efektif pengelolaan anggaran adalah dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi pendapatan yang ditetapkan dalam APBD, guna mengetahui berhasil tidaknya pencapaian anggaran.

Secara sistematis dapat di rumuskan sebagai berikut:

Tabel 3. Rumus Rasio Efektifitas

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Maka untuk menetapkan efektifitas pengelolaan keuangan daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 4. Penilaian Efektivitas

Kriteria Efektifitas	Presentase Efektifitas
Sangat efektif	Diatas 100%
Efektif	90% - 100%
Cukup efektif	80% - 90%

Kurang efektif	60% - 80%
Tidak efektif	Kurang dari 60%

Sumber: Badan Litbang Depdagri

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi bertujuan untuk mengukur tingkat input dari organisasi sektor publik terhadap tingkat outputnya sektor publik (Mahsun, 2016). Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan asli Daerah, indikator rasio efektifitas PAD saja belum cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektifitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka berarti pemungutan PAD tersebut tidak efektif. Oleh karena itu Secara sistematis dapat di rumuskan sebagai berikut:

Tabel 5. Rumus Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Maka penilaian tingkat kemampuan keuangan dan kemandirian daerah sebagai berikut:

Tabel 6. Penilaian Efisiensi

Kriteria Efisiensi	Presentase Efisiensi
Tidak efisien	Diatas 100%
Kurang efisien	90% - 100%
Cukup efisien	80% - 90%
Efisien	60% - 80%
Sangat efisien	Kurang dari 60%

Sumber :Badan Litbang Depdagri

Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2012).

1. Rasio Belanja Rutin / Belanja Tidak Langsung

Rasio Belanja Rutin (Belanja Tidak Langsung) merupakan perbandingan antara total Belanja Rutin (Belanja Tidak Langsung) dengan total Belanja Daerah. Rasio belanja rutin ini memberikan informasi mengenai anggaran belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja rutin (belanja tidak langsung). Rumus yang di gunakan untuk menghitung rasio belanja rutin adalah :

Tabel 7. Rumus Rasio Belanja Rutin/Belanja Tidak Langsung

Rasio Belanja Rutin	$\frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja Daerah}}$	X100%
---------------------	--	-------

2. Rasio Belanja Modal / Belanja Langsung

Rasio belanja modal (belanja langsung) merupakan perbandingan antara total belanja modal (belanja langsung) dengan total Belanja Daerah. Rasio belanja modal ini memberikan informasi mengenai anggaran belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal (belanja langsung) pada tahun anggaran yang bersangkutan. Rumus yang di gunakan untuk mengitung rasio belanja modal adalah :

Tabel 8. Rumus Rasio Belanja Modal/Belanja Langsung

Rasio Belanja Modal	$\frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$	X 100%
---------------------	--	--------

Sampai saat ini belum ada pedoman yang ideal tentang besarnya rasio belanja rutin maupun rasio belanja modal, karena sangat dipengaruhi dinamika pembangunan dan kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan (Halim, 2012).

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yaitu mendeskripsikan, menguraikan dan menjelaskan semua hasil perhitungan analisis rasio dari setiap rasio diantaranya rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas pendapatan asli daerah,

rasio efisiensi pendapatan asli daerah dan rasio evelktifitas belanja daerah yang tentunya berhubungan dengan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan kemudian menarik kesimpulan.

Teknik Analisis Data.

1. Menghitung Menggunakan Rasio

Analisis rasio menggunakan 4 rasio keuangan sektor publik mengacu pada buku Pengukuran Kinerja Sektor Publik oleh Mahsun, (2016:152). Berikut rumus-rumus yang dipakai:

1) Rasio Kemandirian Keuangan

Tabel 9. Rumus Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat + Pinjaman Daerah}}$	X 100%
-------------------	--	--------

Maka penilaian tingkat kemampuan keuangan dan kemandirian daerah sebagai berikut:

2) Rasio Efektifitas

Tabel 10. Rumus Rasio Efektifitas

Rasio Efektifitas	$\frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}}$	X100%
-------------------	--	-------

Maka untuk menetapkan efektifitas pengelolaan keuangan daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 11. Penilaian Efektifitas

Kriteria Efektifitas	Presentase Efektifitas
Sangat efektif	Diatas 100%
Efektif	90% - 100%
Cukup efektif	80% - 90%
Kurang efektif	60% - 80%
Tidak efektif	Kurang dari 60%

Sumber: Badan Litbang Depdagri

3) Rasio Efisiensi

Tabel 12. Rumus Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi	$\frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD Realisasi}}{\text{Penerimaan PAD}}$	X100%
-----------------	--	-------

Maka penilaian tingkat kemampuan keuangan dan kemandirian daerah sebagai berikut:

Tabel 13. Penilaian Efisiensi

Kriteria Efisiensi	Presentase Efisiensi
Tidak efisien	Diatas 100%
Kurang efisien	90% - 100%
Cukup efisien	80% - 90%
Efisien	60% - 80%
Sangat efisien	Kurang dari 60%

Sumber :Badan Litbang Depdagri

4) Rasio Aktivitas

1. Rasio Belanja Rutin / Belanja Tidak Langsung

Tabel 14. Rumus Rasio Belanja Rutin / Belanja Tidak Langsung

Rasio Belanja Rutin	$\frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$
---------------------	---

- 2.
3. Rasio Belanja Modal / Belanja Langsung

Tabel 15. Rumus Rasio Belanja Modal / Belanja Langsung

Rasio Belanja Modal	$\frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$
---------------------	---

2. Analisis Trend Metode Kuadrat Terkecil (least square method)

Melakukan analisis trend dengan metode kuadrat terkecil untuk melihat kecenderungan angka-angka rasio tertentu, sehingga diperoleh gambaran apakah rasio-rasio tersebut cenderung naik atau turun. Persamaan garis trend dirumuskan sebagai berikut (Hasan, 2016:201):

$$\hat{Y} = a + bX$$

Dimana:

$$a = \frac{\sum Y}{n},$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Keterangan:

- \hat{Y} = nilai trend
- a = bilangan konstan
- b = koefisien kecondrongan garis trend
- n = periode waktu
- X = waktu (bulan, kuartal, tahun)
- Y = data berkala

Untuk menentukan garis trend, terlebih dahulu dicari nilai *a* dan *b* artinya jika nilai *a* dan *b* sudah diketahui maka garis trend dapat dibuat. (Hasan, 2016:201):

Dari hasil penghitungan, akan diketahui beberapa keadaan yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Jika *b* bernilai positif, maka rasio keuangan perusahaan dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan.
- Jika *b* bernilai negatif, maka rasio keuangan perusahaan dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan.

Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio dilanjutkan dengan melakukan analisis trend kemudian membuat grafik berdasarkan angka-angka rasio dan nilai *trend* dan pada akhirnya membuat kesimpulan tentang kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian.

Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015-2020.

1. Rasio Kemandirian Keuangan.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan peneliti, diperoleh besarnya rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2015-2020 seperti pada Tabel 16 berikut:

Tabel 16. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Dalam Juta Rupiah)

Tahun	PAD (RP)	Dana Perse Perimbangan (%)	Kriteria
2015	76.086.	999.630. 7,61	Rendah Sekali
2016	71.848.	1.129.700 6,36	Rendah Sekali

2017	189.534	1.220.081	15,53	Rendah sekali
2018	1.487.	1.318.011	5,42	Rendah sekali
2019	77.594.	1.349.485	5,75	Rendah sekali
2020	64.192	1.295.194	4,96	Rendah sekali
Rata-Rata			7,53	Sekali

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah selatan (Data Diolah, 2022)

Jadi persamaan trend untuk rasio kemandirian keuangan adalah:
 $\hat{Y} = 7,61 - 0,36X$

Dari persamaan trend di atas maka dapat dihitung nilai tren rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan periode tahun 2015-2020. Berdasarkan nilai trend maka grafik trend rasio keuangan dapat digambarkan seperti pada gambar 1.

Gambar 1. Grafik Trend Rasio Kemandirian



Berdasarkan persamaan trend rasio kemandirian diperoleh nilai $b = -0,36$ (b negatif) maka dapat dilihat bahwa trend rasio kemandirian dari tahun 2015 sampai tahun 2020 cenderung menurun dari tahun ke tahun.

2. Rasio Efektivitas

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan peneliti, diperoleh besarnya rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2015-2020 seperti pada Tabel 17 berikut:

Tabel 17. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (Dalam Juta Rupiah)

Tahun	Realisasi PAD (RP)	Target PAD (RP)	Persentase (%)	Kriteria
2015	76.086.	65.016.	117,03	Sangat Efektif
2016	71.848.	77.610.	92,58	Efektif
2017	189.534.	157.84.	120,08	Sangat Efektif
2018	111.360	71.487.	155,77	Sangat Efektif
2019	94.936.	77.694.	122,19	Sangat Efektif
2020	96.620.	84.192.	114,76	Sangat Efektif
Rata-Rata			119,61	Efektif

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah selatan (Data Diolah, 2022)

Jadi persamaan trend untuk rasio efektivitas pendapatan asli daerah adalah:
 $\hat{Y} = 7,61 + 1,62X$

Dari persamaan trend di atas maka dapat dihitung nilai tren rasio efektivitas pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan periode tahun 2015-2020. Berdasarkan nilai trend rasio maka grafik trend rasio efektivitas dapat digambarkan seperti pada gambar 2.

Gambar 2. Grafik Trend Rasio Efektivitas



Berdasarkan persamaan trend rasio efektivitas pendapatan asli daerah diperoleh nilai $b = 1,62$ (b positif) aka dapat dilihat bahwa trend rasio efektivitas pendapatan asli daerah dari tahun 2015 sampai tahun

2020 cenderung meningkat dari tahu ke tahun.

3. Rasio Efisiensi

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan peneliti, diperoleh besarnya rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2015-2020 seperti pada Tabel 18 berikut:

Tabel 18. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (Dalam Juta Rupiah)

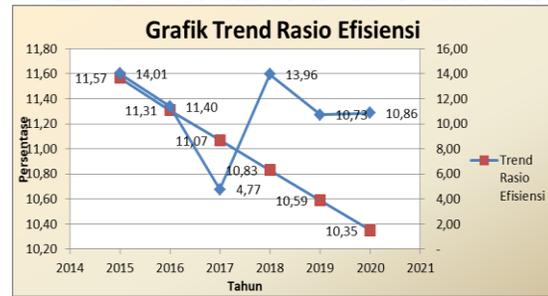
Tahun	Biaya Perolehan PAD (RP)	Realisasi PAD (RP)	Persentase (%)	Kriteria
2015	10.661	76.086.	14,01	Sangat Efisien
2016	8.187	71.848.	11,39	Sangat Efisien
2017	9.037	189.534	4,76	Sangat Efisien
2018	9.977	71.487.	13,96	Sangat Efisien
2019	8.325	77.594.	10,73	Sangat Efisien
2020	6.970.	64.192.	10,86	Sangat Efisien
	Rata-Rata		9,65	Sangat Efisien

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah selatan (Data Diolah, 2022)

Jadi persamaan trend untuk rasio efisiensi pendapatan asli daerah adalah: $\hat{Y} = 10,95 - 0,12X$

Dari persamaan trend di atas maka dapat dihitung nilai tren rasio efisiensi pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan periode tahun 2015-2020. Berdasarkan nilai tren rasio efisiensi maka grafik trend rasio efisiensi dapat digambarkan seperti pada gambar 3.

Gambar 3. Grafik Trend Rasio Efisiensi



Berdasarkan persamaan trend rasio efisiensi pendapatan asli daerah diperoleh nilai $b = -0,12$ (b negatif) maka dapat dilihat bahwa trend rasio efisiensi pendapatan asli daerah dari tahun 2015 sampai tahun 2020 cenderung mengalami penurunan dari tahu ke tahun.

4. Rasio Aktivitas

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan peneliti, diperoleh besarnya rasio Belanja Rutin Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2015-2020 seperti pada Tabel 19 berikut:

Tabel 19. Rasio Belanja Rutin (Dalam Juta Rupiah)

Tahun	Total Belanja Rutin (RP)	Total Belanja Daerah (RP)	Persentase (%)
2015	758.775.	918.703.	82,59
2016	848.463	1.056.107.	80,33
2017	868.117	1.103.505	78,66
2018	906.909	1.189.388.	76,25
2019	882.029.	1.130.429.	78,03
2020	838.793	1.077.308.	77,86
	Rata-Rata		78,81

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah selatan (Data Diolah, 2022)

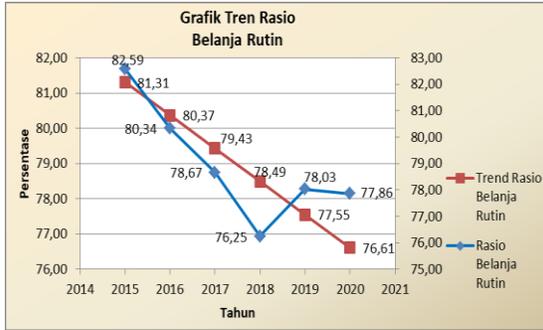
Jadi persamaan trend untuk rasio belanja rutin adalah:

$$\hat{Y} = 78,96 - 0,47X$$

Dari persamaan trend di atas maka dapat dihitung nilai tren rasio belanja rutin Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan periode tahun 2015-2020. Berdasarkan nilai

trend rasio maka grafik trend rasio belanja rutin dapat digambarkan seperti pada gambar 4.

Gambar 4. Grafik Trend Rasio Belanja Rutin



Berdasarkan persamaan trend rasio belanja rutin diperoleh nilai $b = -0,47$ (b negatif) maka dapat dilihat bahwa trend rasio belanja rutin dari tahun 2015 sampai tahun 2020 cenderung mengalami penurunan dari tahu ke tahun.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan peneliti, diperoleh besarnya rasio Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2015-2020 seperti pada Tabel 20 berikut:

Tabel 20. Rasio Belanja Modal (Dalam Juta Rupiah)

Tahun	Total Belanja Modal (RP)	Total Belanja Daerah (RP)	Persentase (%)
2015	159.844.	918.703.	17,39
2016	205.776	1.056.107	19,48
2017	235.387	1.103.505.	21,33
2018	282.478.	1.189.388	23,75
2019	248.312	1.130.429.	21,97
2020	218.800.	1.077.308.	20,31
Rata-Rata			20,86

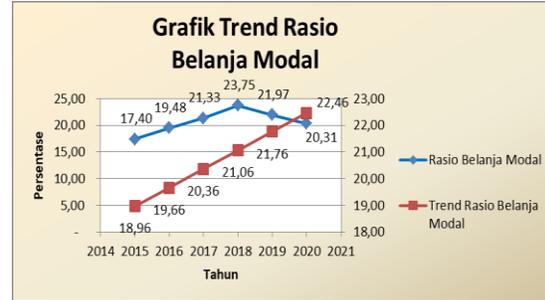
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah selatan (Data Diolah, 2022)

Jadi persamaan trend untuk rasio belanja modal adalah:

$$\hat{Y} = 20,71 + 0,35X$$

Dari persamaan trend di atas maka dapat dihitung nilai tren rasio belanja modal Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan periode tahun 2015-2020. Berdasarkan nilai trend rasio maka grafik trend rasio keuangan dapat digambarkan seperti pada gambar 5.

Gambar 5. Grafik Trend Rasio Belanja Modal



Berdasarkan persamaan trend rasio belanja modal diperoleh nilai $b = 0,35$ (b positif) maka dapat dilihat bahwa trend rasio belanja modal dari tahun 2015 sampai tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan dari tahu ke tahun.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil perhitungan dan analisis dengan menggunakan analisis rasio kemandirian keuangang, yaitu dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer, menunjukkan bahwa rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah periode tahun 2015-2020 berdasarkan tabel 16 adalah sebesar 7,53% dengan klasifikasi kriteria rendah sekali karena masih berada pada skala interval kurang dari 25% ini menggambarkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama periode tersebut masih sangat rendah karena pendapatan transfer dari pemerintah Pusat dan Propinsi masih lebih mendominasi total Pendapatan Daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis dengan menggunakan analisis trend terhadap rasio kemandirian keuangan Kabupaten Timor Tengah Selatan pada

tabel 16 diperoleh persamaan trend rasio dan juga grafik trend rasio kemandirian seperti pada gambar 1 sehingga berdasarkan persamaan dan grafik tersebut dapat diketahui nilai b negatif sebesar $-0,36$ yang berarti bahwa rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan periode 2015-2020 cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Semakin kecil angka yang dihasilkan menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah dari aspek kemandirian semakin berkurang.

2. Rasio Efektifitas Pendapatan Daerah

Hasil perhitungan dan analisis dengan menggunakan analisis rasio efektifitas yaitu, membandingkan realisasi pendapatan asli daerah dibagi target pendapatan asli daerah, menunjukkan bahwa rata-rata Rasio Efektifitas Pendapatan Daerah periode tahun 2015-2020 berdasarkan tabel 17 adalah sebesar $119,96\%$ dengan klasifikasi kriteria sangat efektif karena berada pada skala interval di atas 100% . ini menandakan bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan melampaui target Pendapatan Asli daerah yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis dengan menggunakan analisis trend terhadap rasio efektifitas keuangan Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tabel 17 diperoleh persamaan trend rasio dan juga grafik trend rasio efektifitas seperti pada gambar 2 sehingga berdasarkan persamaan dan grafik tersebut dapat diketahui nilai b positif sebesar $1,62$ yang berarti bahwa rasio efektifitas Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan periode 2015-2020 cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

3. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Hasil perhitungan dan analisis dengan menggunakan analisis rasio efisiensi yaitu, membandingkan biaya pemerolehan PAD dibagi realisasi penerimaan PAD, menunjukkan bahwa rata-rata Rasio Efisiensi Pendapatan Daerah periode tahun 2015-2020 berdasarkan tabel 18 adalah sebesar $9,65\%$ dengan klasifikasi kriteria sangat

efisien karena berada pada skala interval kurang dari 60% . Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan sangat efisien didalam menggunakan dana yang dikeluarkan dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah dengan kata lain Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan mampu meminimalisir anggaran yang dikeluarkan dalam memperoleh pendapatan asli daerahnya

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis dengan menggunakan analisis trend terhadap rasio efisiensi keuangan Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tabel 18 diperoleh persamaan trend rasio dan juga grafik trend rasio efektifitas seperti pada gambar 4 sehingga berdasarkan persamaan dan grafik tersebut dapat diketahui nilai b negatif sebesar $-0,12$ yang berarti bahwa rasio efisiensi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan periode 2015-2020 cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

4. Rasio Aktivitas Belanja

Hasil perhitungan dan analisis dengan menggunakan analisis rasio belanja rutin, yaitu membandingkan total belanja rutin dibagi total belanja daerah menunjukkan bahwa, rata-rata Rasio Belanja Rutin periode tahun 2015-2020 berdasarkan tabel 19 adalah sebesar $78,81\%$ hal ini dapat diartikan bahwa dari total dana yang dimiliki Kabupaten Timor Tengah Selatan periode 2015-2020 sebagian besar dananya diprioritaskan untuk kebutuhan belanja rutin seperti dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji ASN.

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis dengan menggunakan analisis trend terhadap rasio belanja rutin Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tabel 19, diperoleh persamaan trend rasio dan juga grafik trend rasio belanja rutin seperti pada gambar 4 sehingga berdasarkan persamaan dan grafik tersebut dapat diketahui nilai b negatif sebesar $-0,47$ yang berarti bahwa rasio belanja rutin Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan periode 2015-2020 cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini berarti bahwa pemerintah

Kabupaten Timor Tengah Selatan dari tahun ke tahun cenderung menurunkan atau mengurangi prioritas belanja rutin seperti belanja pegawai dan belanja operasional dimana akan berbanding terbalik pada belanja modal.

Hasil perhitungan dan analisis dengan menggunakan rasio belanja modal yaitu, membandingkan total belanja modal dibagi total belanja daerah menunjukkan bahwa rata-rata Rasio Belanja Modal periode tahun 2015-2020 berdasarkan tabel 20 adalah sebesar 20,86% hal ini dapat diartikan bahwa, dari total dana yang dimiliki Kabupaten Timor Tengah Selatan periode 2015-2020 sebesar 20,86% diprioritaskan untuk kebutuhan belanja modal pembangunan daerah atau menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis dengan menggunakan analisis trend terhadap rasio belanja modal Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tabel 20 diperoleh persamaan trend rasio dan juga grafik trend rasio belanja modal seperti pada gambar 5 sehingga berdasarkan persamaan dan grafik tersebut dapat diketahui nilai b positif sebesar 0,35 yang berarti bahwa rasio belanja modal Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan periode 2015-2020 cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dari tahun ke tahun cenderung meningkatkan prioritas belanjanya pada belanja modal guna menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat. Dengan kata lain aktivitas belanja pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan analisis trend cenderung mengalami peningkatan pada belanja modal dari tahun ke tahun atau kinerja aktivitas belanjanya semakin baik.

KESIMPULAN

1. Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan periode tahun 2015-2020 ditinjau dari kemandirian keuangan daerah memperoleh klasifikasi Kriteria rendah sekali karena berada pada interfal di bawah 25%, sedangkan melalui analisis *trend* menunjukkan bahwa rasio ini cenderung selalu mengalami penurunan kemandirian dari tahun ke tahun.
2. Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan periode tahun 2015-2020 ditinjau dari efektifitas pendapatan asli daerah memperoleh klasifikasi kriteria sangat efektif karna berada pada interfal di atas 100%, sedangkan melalui analisis trend menunjukkan bahwa rasio ini cenderung selalu mengalami peningkatan efektifitas dari tahun ke tahun.
3. Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan periode tahun 2015-2020 ditinjau dari efisiensi pendapatan asli daerah memperoleh klasifikasi kriteria sangat efisien karna berada pada interfal di bawah 60%, sedangkan melalui analisis trend menunjukkan bahwa rasio ini cenderung selalu mengalami peningkatan efisien dari tahun ke tahun.
4. Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan periode tahun 2015-2020 berdasarkan aktivitas belanja daerah melalui belanja rutin dan belanja modal menunjukkan bahwa aktivitas belanja pemerintah daerah lebih diprioritaskan pada belanja rutin seperti belanja pegawai dan belanja operasional dari pada belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, S. (2015) *Manajemen Keuangan : Teori dan Aplikasi*. 4th edn. Yogyakarta: BPFE.
- Anton, A. (2010) *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Atmojo, D. T. (2017) 'Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Audit Report Lag (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015)', *Diponegoro Jurnal Of Accaunnting*, 6,

- pp. 1–15.
- Bisma, I. D. G. and Susanto, H. (2016) 'Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007', *Ganec Swara Edisi Khusus Universitas Mataram*, 04(03), pp. 75–86.
- Fahmi, I. (2012) *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Halim, A. (2012) *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasan, I. (2016) *Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kerih, A. S. Y. (2019) 'Analisis Kinerja Keuangan Pada Swalayan Sumber Makmur Kota Kupang', *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana*, 7(1), pp. 75–89.
- Mahmudi (2015) *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. 3rd edn. Yogyakarta: cv. Andi.
- Mahsun, M. (2016) *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Pert. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Mardiasmo (2018) *Akuntansi Sektor Publik*. Terbaru. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Munawar, U. M. (2016) 'Model Akuntansi Berbasis Akrua Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kupang', *Jurnal Akuntansi*, 3(2), pp. 18–34.

ANALISIS NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN SUBSEKTOR TELEKOMUNIKASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) SELAMA PANDEMI COVID-19

Adriana Teu

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana
adrianateu05@gmail.com

Petrus E. De Rozari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana

Sarlin P. Nawa Pau

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana

ABSTRAK

Perusahaan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah nilai wajar perusahaan yang menggambarkan persepsi investor terhadap emiten tertentu, sehingga nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan yang selalu dikaitkan dengan harga saham perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas yang diukur menggunakan *return on asset*, ukuran perusahaan diukur menggunakan *size*, dan struktur modal diukur menggunakan *debt to equity ratio* terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan menggunakan *Tobin's Q*. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan subsektor telekomunikasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia selama pandemi covid-19. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 4 perusahaan yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dengan data sebanyak 40 data observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Data Panel dengan menggunakan program *E-Views 10* dan *Microsoft Excel 2010*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan struktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dan profitabilitas berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.

Kata kunci : Profitabilitas; Ukuran Perusahaan; Struktur Modal; Nilai Perusahaan.

ABSTRACT

Company has the main goal of increasing the prosperity of the owners or shareholders through increasing company value. Firm value is the fair value of the company which describes the investor's perception of a particular issuer, so that the value of the company is the investor's perception of the company which is always associated with the company's stock price. This study aims to determine the effect of profitability which is measured using return on assets, firm size is measured using size, and capital structure is measured using debt to equity ratio on firm value as measured by Tobin's Q. The population in this study are telecommunication sub-sector companies listed in Indonesia's stock market during the covid-19 pandemic. The number of samples used as many as 4 companies selected using the purposive sampling method with a data of 40 observation data. The data analysis technique used is Panel Data Regression Analysis using the E-Views 10 program and Microsoft Excel 2010. The results show that company size and capital structure have a significant effect on firm value and profitability but not significant effect on firm value.

Keywords : Profitability; Company Size; Capital Structure; The value of the company.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pandemi Covid-19 telah mengubah tatanan kehidupan dunia. Virus corona atau biasa disebut dengan Covid-19 telah menyebar hingga ke 215 negara di dunia dengan Indonesia berada pada posisi 145 negara di dunia yang terdampak pandemi Covid-19 dengan jumlah infeksi di Indonesia mencapai 1.547.376 juta kasus dan yang dinyatakan sembuh mencapai 1.391.742 juta orang.

Demi meminimalisir bertambahnya jumlah infeksi, beberapa negara seperti Italia, Spanyol, hingga India memberikan kebijakan *lockdown*, sementara negara lainnya, termasuk Indonesia, lebih memilih kebijakan memberlakukan anjuran *social distancing* atau PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) bagi warganya, kebijakan tersebut tentu berpengaruh besar bagi perekonomian. Tidak hanya di Indonesia, pelemahan ekonomi akibat dari pandemi virus corona terjadi merata hampir di seluruh dunia.

Indonesia mengkonfirmasi kasus pertama infeksi virus corona penyebab covid-19 pada awal Maret 2020. Sejak itu, berbagai upaya penanggulangan dilakukan pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi Covid-19 diberbagai sektor. Hampir seluruh sektor terdampak, tidak hanya Kesehatan, sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Sebuah perusahaan selain ingin mendapatkan laba yang tinggi juga ingin meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Kesejahteraan pemegang saham bisa dilihat dari nilai perusahaan. Jika harga saham tinggi akan terjadi peningkatan nilai perusahaan, maka investor akan semakin meningkatkan kepercayaan bahwa kinerja yang dilakukan perusahaan sangat baik dan efisien bagi masa depan perusahaan.

Perusahaan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan (Yanda, 2018). Nilai perusahaan adalah nilai wajar

perusahaan yang menggambarkan persepsi investor terhadap emiten tertentu, sehingga nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan yang selalu dikaitkan dengan harga saham perusahaan (Sondakh, R., & Morasa, 2019). Meningkatnya nilai perusahaan adalah sebuah prestasi yang diinginkan oleh para pemegang saham perusahaan, sebab dengan meningkatnya nilai perusahaan, maka kesejahteraan para pemilik juga akan meningkat (Ade, 2020). Wahyudi dan Pawestrijuga menyatakan bahwa nilai perusahaan akan tercermin dari harga pasar sahamnya (Lubis,dkk 2017).

Rasio profitabilitas mencerminkan efektifitas dan efisien perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menggunakan seluruh modal yang dimiliki baik aset maupun modal sendiri dalam perolehan laba keberlanjutan hidup perusahaan. Ukuran perusahaan adalah skala besar kecil sebuah perusahaan yang dapat dilihat dari total penjualan, kapitalisasi pasar, dan total aset perusahaan. Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi nilai perusahaan karena semakin besar ukuran perusahaan maka semakin mudah memperoleh sumber pendanaan. Perusahaan dengan struktur modal yang tidak baik dan hutang yang sangat besar akan memberikan beban berat kepada perusahaan sehingga perlu diusahakan satu keseimbangan yang optimal dalam menggunakan kedua sumber tersebut sehingga dapat memaksimalkan nilai perusahaan. *Debt to Equity Ratio* (DER) dapat memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat diketahui tingkat rasio tak terbayarkan suatu hutang.

Industri telekomunikasi bisa dikatakan sebagai industri yang sepertinya tidak akan pernah redup. Bayangkan jika semua koneksi telekomunikasi, baik itu telepon genggam hingga layanan internet tidak aktif selama 24 jam. Sepertinya hal tersebut hampir tidak mungkin dibiarkan terjadi, karena pada zaman sekarang kebutuhan akan komunikasi jarak jauh seperti kebutuhan pokok saja. Sehingga membuat pasar untuk layanan telekomunikasi ini seperti sudah terbentuk dengan sendirinya. Apalagi ditambah dengan jumlah penduduk di

Indonesia yang terus bertumbuh serta perkembangan infrastruktur dikawasan miskin yang sedang diprioritaskan membuat potensi pertumbuhan kebutuhan akan layanan telekomunikasi di Indonesia menjadi semakin prospektif.

Pada subsektor telekomunikasi terdapat enam perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tetapi hanya ada empat yang memenuhi syarat penelitian ini yaitu Bakrei Telkom Tbk., XL Axiata Tbk., Indosat Tbk., dan Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., sebagai perusahaan yang telah *go public*, harga saham yang tercantum pada bursa menjadi sangat penting karena harga saham mencerminkan nilai perusahaan.

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TLKM), mencatatkan pendapatan sebesar 66,9 triliun pada semester I-2020. Turun tipis pada periode yang sama sebelumnya, TLKM membukukan pendapatan Rp 69,34 triliun dengan laba bersih 11,07 triliun. PT XL Axiata Tbk. (EXCL), memperoleh pendapatan di kuartal I-2020 sebesar Rp 6,5 triliun atau naik 9% secara *year on year*. Disisi lain, keuntungan dari penjualan dan sewa balik menara sebesar Rp 1,6 triliun membawa laba bersih EXCL naik signifikan menjadi Rp 1,5 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya Rp 57,2 milyar. Sedangkan PT Indosat Tbk, (ISAT) mencatat pendapatan konsolidasi sebesar Rp 13,45 triliun atau naik 9,4% secara *year on year* dari Rp 12,39 triliun sepanjang semester I-2020. Pendapatan suler ISAT meningkat 11,8% dibandingkan dengan semester I-2019. Pada semester I-2019 ISAT mengalami kerugian sebesar Rp 321,30 miliar namun pada semester I-2020 membaik jadi rugi Rp 317,66 miliar.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Nilai Perusahaan Pada Subsektor Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Selama Covid-19”

Rumusan Masalah

1. Apakah profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan pada subsektor

telekomunikasi yang terdaftar di BEI selama pandemi covid-19?

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan pada subsektor telekomunikasi yang terdaftar di BEI selama pandemi covid-19?
3. Apakah struktur modal berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan pada subsektor telekomunikasi yang terdaftar di BEI selama pandemi covid-19?
4. Apakah profitabilitas, ukuran perusahaan, dan struktur modal berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan pada subsektor telekomunikasi yang terdaftar di BEI selama pandemi covid-19?

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Teoritis

Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori sinyal atau *signalling theory* berawal dari adanya bukti-bukti yang mengatakan bahwa pihak yang berada pada lingkungan internal perusahaan memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan pihak eksternal mengenai keadaan dan prospek masa mendatang pada perusahaan atau dengan kata lain terdapat *assymetric information* yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lainnya (Gumanti, 2017).

Hubungan antara teori sinyal atau *signalling theory* dengan nilai perusahaan yaitu jika sebuah perusahaan memiliki nilai yang baik dan mengalami peningkatan, maka dapat dijadikan sebuah sinyal yang positif untuk para investor sehingga membuat mereka merasa yakin untuk dapat berinvestasi pada perusahaan tersebut (Rajagukguk et al., 2019). Sebaliknya, apabila nilai perusahaan buruk dan tampak mengalami penurunan yang terus menerus maka dapat dijadikan sinyal negatif untuk investor.

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan atau *agency theory* adalah sebuah konsep yang menguraikan

mengenai hubungan pemegang saham (*principal*) dengan manajemen puncak perusahaan (*agent*). Untuk dapat mencapai tujuan perusahaan, pemegang saham memberikan kewenangan pada manajemen untuk dapat membuat keputusan yang baik.

Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan merupakan tingkat keberhasilan perusahaan yang dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan tinggi. Nilai perusahaan yang tinggi menunjukkan semakin tinggi kemakmuran kesejahteraan para investor. Harga saham disebut seoptimal mungkin, tidak boleh terlalu tinggi dan terlalu rendah. Apabila harga saham meningkat maka perusahaan tidak menginginkannya, sehingga membuat saham tidak laku untuk dijual, sedangkan harga saham yang rendah akan berdampak pada citra perusahaan tersebut.

Nilai perusahaan menurut Harmono (2014) merupakan kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh harga saham yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran di pasar modal yang merefleksikan penilaian masyarakat terhadap kinerja perusahaan. Siswoyo, (2012) menyatakan bahwa nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham. Semakin tinggi harga saham semakin tinggi pula nilai perusahaan.

Salah satu alternatif yang digunakan dalam menilai nilai perusahaan adalah dengan menggunakan *Tobin's Q* ini dikembangkan oleh professor James Tobin. Rasio ini merupakan konsep yang sangat berharga karena menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian dari setiap dolar investasi internal. *Tobin's Q* dihitung dengan membandingkan nilai buku ekuitas perusahaan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Q = \frac{(EMV + D)}{(EBV + D)}$$

Profitabilitas

Menurut Sutrisno (2011:16), yang dimaksud dengan profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan semua modal yang bekerja didalamnya. Harahap, (2009:304) mengatakan bahwa profitabilitas adalah menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumberdaya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang perusahaan, dan lain sebagainya.

Return On Assets (ROA) menurut Kasmir, (2015) adalah "rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan". *Return on assets* yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat laba terhadap aset yang digunakan dalam menghasilkan laba tersebut. *Return On Assets* ini dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokan perusahaan kedalam beberapa kelompok, diantaranya perusahaan besar, sedang dan kecil. Ukuran perusahaan adalah skala perusahaan yang dilihat dari total aktiva perusahaan pada akhir tahun. Total penjualan juga dapat digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan. Karena biaya-biaya yang mengikuti penjualan cenderung lebih besar, maka perusahaan dengan tingkat penjualan yang tinggi cenderung memilih kebijakan akuntansi yang mengurangi laba (Suwito & Herawaty, (2012) (Suwito & Herawaty, 2012).

Penelitian ukuran perusahaan dapat menggunakan tolak ukur aset. Karena total aset perusahaan bernilai besar maka hal ini dapat disederhanakan dengan mentransformasikan kedalam logaritma natural (Ghozali, 2013). Sehingga ukuran perusahaan juga dapat dihitung dengan:

$$Size = Ln \times \text{Total Assets}$$

Struktur Modal

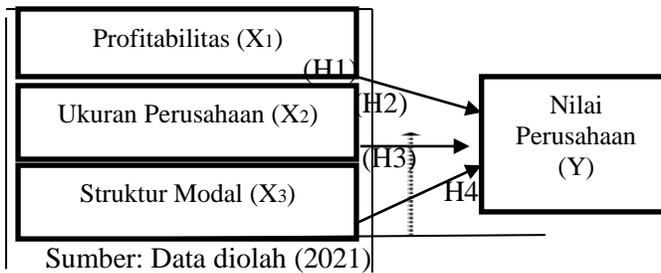
Struktur modal merupakan pembelanjaan parmanen dimana mencerminkan perimbangan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Warsono (2003) mengatakan bahwa struktur modal merupakan bauran dari segenap sumber pembelanjaan jangka panjang (utang jangka panjang, saham preferen, dan ekuitas saham biasa) yang digunakan perusahaan. Menurut Halim, (2012), yang dimaksud struktur modal adalah perimbangan jumlah hutang jangka

pendek yang bersifat tetap, hutang jangka panjang, saham preferen, dan saham biasa.

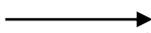
Struktur modal dalam penelitian ini diproksikan dengan DER (*debt to equity ratio*). *Debt to equity ratio* adalah rasio yang menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Secara matematis, DER dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$$

Gambar. 2.1 Kerangka Berpikir



Keterangan:



: Secara Parsial



: Secara Simultan

H1: Profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan

H2: Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan

H3: Struktur Modal memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan

H4: Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Struktur Modal memiliki pengaruh terhadap Nilai Perusahaan secara simultan

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2021 dengan waktu penelitiannya mulai dari bulan Agustus 2021 sampai dengan selesai.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif yang bersifat asosiatif. Penelitian asosiatif menurut Sugiyono, (2013) merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih, yaitu variabel dependen / yang mempengaruhi (Y) dan variabel independent / yang mempengaruhi (X). Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang menggunakan data dalam bentuk angka pada analisis statistik.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah survey, yang akan dilakukan pada perusahaan subsektor Telekomunikasi yang

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Tabel 1. Operasional variabel

Variabel	Proksi	Pengukuran	Skala
Nilai Perusahaan (Y)	Tobin's Q	Tobin's Q = $\frac{MVE + \text{Book Value Of Liabilities}}{\text{Book Value Of Total Assets}}$	Rasio
Profitabilitas (X1)	Return on Assets (ROA)	ROA =	Rasio

Ukuran Perusahaan (X2)	Size	$\frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	Rasio
Struktur Modal (X3)	Debt to Equity Ratio (DER)	$\text{Size} = \text{Ln}(\text{Total Aset})$ $\text{DER} = \frac{\text{Total Debit}}{\text{Total Ekuitas}}$	Rasio

Sumber: Data diolah (2021)

Populasi Dan Sampel

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan Subsektor Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2021 sebanyak 6 perusahaan. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

Adapun kriteria-kriteria yang digunakan sebagai berikut:

1. Perusahaan Subsektor Telekomunikasi yang masih aktif terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode yang diteliti yaitu tahun 2020-2021.
2. Perusahaan Subsektor Telekomunikasi yang telah menerbitkan laporan keuangan secara lengkap selama periode yang diteliti yaitu tahun 2020-2021.
3. Perusahaan Subsektor Telekomunikasi yang memenuhi rasio-rasio keuangan yang digunakan sebagai pengukuran variabel penelitian.

Dari hasil *sampling* yang dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria diatas maka terdapat 4 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini dengan data sebanyak 40 data observasi.

Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Sementara itu sumber data yang digunakan peneliti adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain yang digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut. Sumber datanya akan diperoleh dari data laporan keuangan perusahaan Subsektor Telekomunikasi yang telah

diterbitkan dan terdaftar di BEI yang akan diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis data statistik deskriptif dengan menggunakan data panel yang berfungsi untuk membandingkan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, dan minimum.

Teknik Analisis Regresi Data Panel

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan Subsektor Telekomunikasi yang terdaftar di BEI selama periode 2019-2020. Untuk itu digunakan teknik analisis regresi data panel dengan model sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \hat{\alpha}_1 X_{1it} + \hat{\alpha}_2 X_{2it} + \hat{\alpha}_3 X_{3it} + \hat{\alpha}_{it}$$

Uji Hausman

Uji hausman digunakan untuk memilih apakah model *fixed effect* atau *random effect* yang paling tepat. Statistik uji hausman ini mengikuti distribusi statistik *chi-square* dengan derajat bebas sebanyak jumlah peubah bebas (p). Dalam uji hausman dapat dibuat hipotesisnya sebagai berikut:

Ho: model mengikuti *Random Effect*

Ha: model mengikuti *Fixed Effect*

Kriteria penilaiannya yaitu apabila hasil pengujian menunjukkan p-value > 5% maka Ho ditolak (Rohmana, 2013).

Uji Hipotesis

Uji Parsial (uji t)

Uji t untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak (Ghozali, 2013). Bentuk pengujiannya sebagai berikut:

H0 : Secara parsial profitabilitas, ukuran perusahaan, dan struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan Subsektor Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2020.

H1 : Secara parsial profitabilitas, ukuran perusahaan, dan struktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada Subsektor Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020.

Uji Simultan (F)

Uji F atau koefisien regresi secara serentak yaitu untuk mengetahui variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Bentuk pengujiannya adalah:

H0 : Secara simultan profitabilitas, ukuran perusahaan, dan struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan Subsektor Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020.

H1 : Secara simultan profitabilitas, ukuran perusahaan, dan struktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan Subsektor Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020.

Uji Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2013), koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Tabel 2. Hasil uji statistik deskriptif

	Tobin's Q (Y)	ROA X1	SIZE X2	DER X3
Minimum	77796.79	-33.10992	8.091321	0.740109
Maximum	1.993479	10.65776	26.29913	3.928456
Mean	2.809008	-1.690431	18.10195	1.992275
Std. Dev.	5.256608	6.567003	5.790968	1.114746
Observations	40	40	40	40

Sumber: data diolah 2021 (Eviews-10)

Berdasarkan tabel 2 diatas diketahui bahwa variabel *Tobin's Q* memiliki nilai minimum 77796.79 nilai maximum 1.9934799, nilai rata-rata 2.809008 dan nilai standar devisiasi adalah 5.256608.

Variabel profitabilitas (ROA) memiliki nilai minimum -33.10992 nilai maximum 10.65776, nilai rata-rata -1.690431 dan nilai standar devisiasi adalah 6.567003.

Variabel ukuran perusahaan (*size*) dapat dilihat bahwa nilai minimum sebesar

8.091321 nilai maximum 26.29913, nilai rata-rata 18.10195 dan nilai standar devisiasi adalah 1.114746.

Variabel struktur modal (DER) memiliki nilai minimum 0.740109 dengan nilai maximum sebesar 3.928456, nilai rata-ratanya sebesar 1.992275 dan standar devisiasinya sebesar 1.114746.

Hasil Analisis Regresi Data Panel

1. Hasil Uji Chow

Tabel 3. Hasil uji chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fix'ed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	6.179104	(3,33)	0.0019
Cross-section Chi-square	17.831940	3	0.0005

Sumber: data diolah 2021 (Eviews 10)

Hasil uji chow yang dilihat pada tabel 3 menyatakan bahwa probabilitas *cross-section F* bernilai 0,0019 dan *cross-section chi-square* bernilai 0,0005 atau lebih kecil dari nilai α 0,05, maka H_0 di tolak dan H_1 diterima. Artinya teknik regresi data panel

menggunakan *fixed effect model* lebih baik ketimbang teknik regresi data panel dengan *random effect model*.

2. Hasil Uji Hausman

Tabel 4. Hasil uji hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.	
Cross-section random	18.537313	3	0.0003	
Cross-section random effects test comparisons:				
Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
ROA	987857.641269	-7204033.347671	6062329214380.6136	0.0009
SIZE	-4244718.434707	71760248.223050	1062692996150157.2	0.0197
DER	-8169537.788685	-208947173.701451	28041788598068196	0.2305

Sumber: data diolah2021 (Eviews 10)

Hasil dari uji hausman pada tabel 4 menyatakan bahwa nilai probabilitas *cross-section random* bernilai 0,0003 atau lebih kecil dari α (0,05), sehingga kesimpulan yang diperoleh adalah teknik regresi data panel

menggunakan *fixed effect model* lebih baik ketimbang teknik regresi data panel dengan menggunakan *random effect model*.

3. Model Regresi Data Panel (*Fixed Effect Model*)

Tabel 5. Hasil uji regresi data panel *fixed effect model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.151608	1.743508	-3.528902	0.0012
ROA	-7204033.	6851765.	-1.051413	0.3001
SIZE	71760248	7552088.	9.502041	0.0000
DER	-2.094708	36066556	-5.793377	0.0000
<i>R-squared</i>	0.805003	<i>Mean dependent var</i>	2.80E+08	

<i>Adjusted R-squared</i>	0.788753	<i>S.D. dependent var</i>	5.25E+08
<i>S.E. of regression</i>	2.41E+08	<i>Akaike info criterion</i>	41.53434
<i>Sum squared resid</i>	2.09E+18	<i>Schwarz criterion</i>	41.70323
<i>Log likelihood</i>	-826.6869	<i>Hannan-Quinn criter.</i>	41.59541
<i>F-statistic</i>	49.53930	<i>Durbin-Watson stat</i>	1.828756
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000000		

Sumber: data diolah2021 (Eviews 10)

Berdasarkan tabel 4 hasil uji *fixed effect model* diketahui bahwa nilai *probability* ROA 0,3001 > 0,05, yang berarti profitabilitas (ROA) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan (*Tobin's Q*). Sedangkan nilai *probability* dari *Size* dan DER adalah 0,0000 < 0,05, yang artinya ukuran perusahaan (*Size*) dan struktur modal (DER) memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan (*Tobin's Q*).

Berdasarkan tabel 5 persamaan regresi data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \epsilon_{it}$$

$$Tobin's Q = -6.151608 it - 7204033 it + 71760248 it - 2.094708 it + \epsilon_{it}$$

Pada persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa, koefisien konstanta yang berarti jika nilai dari variabel independen profitabilitas (ROA), ukuran perusahaan (*Size*), dan struktur modal (DER) sebesar nol maka akan terjadi peningkatan pada nilai variabel dependen nilai perusahaan (*Tobin's Q*) sebesar 0,000000615.

Koefisien variabel profitabilitas (ROA) sebesar -7204033 yang berarti jika terjadi peningkatan variabel profitabilitas sebesar satu satuan maka akan menurunkan nilai variabel dependen nilai perusahaan (*Tobin's Q*) sebesar -7204033 dan beranggapan variabel lain dalam bentuk konstan.

Koefisien variabel ukuran perusahaan (*Size*) sebesar 71760248 yang berarti jika terjadi peningkatan ukuran perusahaan (*Size*) sebesar satu satuan, maka nilai variabel dependen nilai perusahaan (*Tobin's Q*) akan mengalami peningkatan sebesar 71760248 dan variabel lain dalam bentuk konstan.

Koefisien variabel struktur modal (DER) sebesar -2.094708 yang berarti jika peningkatan struktur modal (DER) sebesar satu satuan, maka nilai variabel dependen nilai perusahaan (*Tobin's Q*) akan mengalami penurunan sebesar -2,094708 dan variabel lain dalam bentuk konstan.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Tabel 6. Hasil parsial (uji t)

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	-6.15E+08	1.74E+08	-3.528902	0.0012
ROA	-7204033.	6851765.	-1.051413	0.3001
SIZE	71760248	7552088.	9.502041	0.0000
DER	-2.09E+08	36066556	-5.793377	0.0000
<i>R-squared</i>	0.805003	<i>Mean dependent var</i>	2.80E+08	
<i>Adjusted R-squared</i>	0.788753	<i>S.D. dependent var</i>	5.25E+08	
<i>S.E. of regression</i>	2.41E+08	<i>Akaike info criterion</i>	41.53434	
<i>Sum squared resid</i>	2.09E+18	<i>Schwarz criterion</i>	41.70323	
<i>Log likelihood</i>	-826.6869	<i>Hannan-Quinn criter.</i>	41.59541	

<i>F-statistic</i>	49.53930	<i>Durbin-Watson stat</i>	1.828756
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000000		

Sumber: data diolah 2021 (Eviews 10)

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 6 di atas dapat diketahui adanya pengaruh dan tidaknya antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) sebagai berikut:

Variabel profitabilitas memiliki nilai t hitung sebesar -1,051 dengan nilai signifikansi sebesar 0,3001 > 0,05. Berdasarkan ketentuan pengambilan keputusan maka hipotesis H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti profitabilitas berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.

Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai t hitung sebesar 9,502 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Berdasarkan ketentuan pengambilan keputusan maka hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Variabel struktur modal memiliki nilai t hitung sebesar -5,793 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Berdasarkan ketentuan pengambilan keputusan maka hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti struktur modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Hasi Uji Simultan (Uji F)

Tabel 7. Hasil uji simultan (uji f)

<i>F-statistic</i>	49.53930
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000000

Sumber: data diolah 2021 (Eviews 10)

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa nilai F hitung = 49,53930 dengan tingkat signifikansi / probabilitas sebesar 0,000 < 0,05. Hasil ini menyimpulkan bahwa model regresi tersebut secara simultan variabel independen (profitabilitas, ukuran perusahaan, dan struktur modal) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (nilai perusahaan).

Hasil Uji Determinasi (R^2)

Tabel 8. Hasil uji koefisien determinasi

<i>R-squared</i>	0.805003
<i>Adjusted R-</i>	0.788753

squared

sumber: data diolah 2021 (Eviews 10)

Hasil koefisien determinasi pada tabel 8 di atas menunjukkan bahwa nilai korelasi / hubungan (R) adalah sebesar 0,805. Nilai ini menunjukkan bahwa besaran presentase dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sangat besar. Diperoleh pula nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,788. Nilai ini berarti bahwa pengaruh dari variabel independen (profitabilitas, ukuran perusahaan, dan struktur modal) terhadap variabel dependen (nilai perusahaan) adalah sebesar 78,8%.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan

Hasil uji statistik (uji t) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan Subsektor Telekomunikasi yang terdaftar di BEI selama pandemi covid-19. Dimana dengan adanya kebijakan dari pemerintah selama pandemi covid-19 dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dapat mempengaruhi perekonomian dunia. Pelemahan ekonomi akibat pandemi ini juga menjadi salah satu faktor penyebab tidak adanya pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan, karena akibat pelemahan ekonomi dapat menurunkan harga saham pada beberapa perusahaan yang ada di subsektor telekomunikasi, sehingga dapat mempengaruhi minat investor untuk menanam modal pada perusahaan tersebut. ROA yang dihitung dengan perbandingan laba bersih dan total aset tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan memiliki arti bahwa besar kecilnya ROA, tidak terlalu berpengaruh terhadap tinggi rendahnya nilai sebuah

perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap investor tidak memandang peningkatan atau penurunan harga saham yang berasal dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aset. Implikasi mengenai hal ini biasa disebabkan oleh faktor lain seperti kemampuan perusahaan dalam membayar hutang dan kebijakan deviden.

Maka dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, yang berarti bahwa perusahaan belum mampu mengoptimalkan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba perusahaan, hal ini juga akan mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modal pada perusahaan. Sesuai dengan teori sinyal (*Signaling Theory*) apabila nilai perusahaan buruk dan tampak mengalami penurunan yang terus menerus maka dapat dijadikan sinyal negatif untuk investor. Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian dari Arafah (2020), yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. penelitian ini juga tidak sejalan dengan Harahap, (2009) dan Yanda, (2018), Lubis, (2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

2. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan

Hasil uji statistik (uji t) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan Subsektor Telekomunikasi yang terdaftar di BEI periode selama pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mampu mempengaruhi nilai perusahaan selama pandemi Covid-19, karena semakin besar ukuran perusahaan maka semakin mudah perusahaan memperoleh sumber pendanaan. Perusahaan dengan pertumbuhan yang besar akan memperoleh kemudahan untuk memasuki pasar modal karena investor menangkap sinyal yang positif yang mencerminkan nilai perusahaan.

Hasil penelitian ini sekaligus didukung oleh peneliti Arafah (2020) yang menyatakan bahwa hal tersebut dapat terjadi karena perusahaan dengan ukuran yang besar belum tentu mampu memberikan jaminan bahwa nilai perusahaan yang akan diperoleh ikut menjadi tinggi.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Lubis (2017), Octavia (2016) dan Gultom, dkk (2013) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Pada dasarnya ukuran perusahaan menunjukkan total aset perusahaan, yang dimana jika nilai ukuran perusahaan semakin tinggi maka akan semakin besar pula aktiva yang dijadikan jaminan perusahaan untuk memperoleh hutang maka akan ada modal perusahaan untuk menambah kinerja dan laba perusahaan yang akan meningkatkan nilai perusahaan.

3. Pengaruh Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan

Hasil uji statistik (uji t) menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan selama pandemi Covid-19. Hal ini berarti bahwa variabel struktur modal memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan namun tidak signifikan ditahun berikutnya. Struktur modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan harus ditentukan dengan baik penggunaan utang yang akan digunakan karena dapat berpengaruh terhadap perusahaan dan dapat berdampak pada menurunnya nilai perusahaan. Sesuai dengan *Agency Theory* yang menyatakan bahwa jika keputusan pendanaan dilakukan dengan baik, maka struktur modal perusahaan akan semakin optimal sehingga hal tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Gultom, dkk (2013) dan Yanda (2018) yang menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh secara negatif terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian Octavia, dkk

Languju dkk, (2016), Octavia, 2016) dan Lubis, dkk (2017) yang menyatakan bahwa struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Pada dasarnya struktur modal yang meningkat cenderung akan meningkatkan nilai perusahaan karena menunjukkan tingkat modal perusahaan yang tinggi.

4. Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan

Hasil pengujian hipotesis (uji F) menunjukkan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, dan struktur modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan (*Tobin's Q*). Hasil ini ditunjukkan pada tabel 4.7 pada kolom probabilitas (*F-statistic*) sebesar 0,000 dengan nilai standar signifikansinya sebesar 0,05. Artinya pada hasil penelitian ini nilai probabilitas $0,000 < 0,05$ maka secara parsial atau bersamaan terdapat pengaruh dari profitabilitas, ukuran perusahaan, dan struktur modal secara signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan Subsektor Telekomunikasi yang terdaftar di BEI selama pandemi Covid-19.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanda (2018), Octavia, 2016) dan Gultom, dkk (2013) yang menunjukkan bahwa secara simultan profitabilitas, ukuran perusahaan dan struktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Profitabilitas yang diproksi dengan menggunakan *return on asset* (ROA) secara parsial berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan (*Tobin's Q*) pada perusahaan Subsektor Telekomunikasi yang terdaftar di BEI selama pandemi Covid-19.

2. Ukuran perusahaan yang diproksi menggunakan *Size* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan (*Tobin's Q*) pada perusahaan Subsektor Telekomunikasi yang terdaftar di BEI selama pandemi Covid-19.
3. Struktur modal yang diproksi menggunakan *debt to equity ratio* (DER) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan (*Tobin's Q*) pada perusahaan Subsektor Telekomunikasi yang terdaftar di BEI selama pandemi Covid-19.
4. Profitabilitas, ukuran perusahaan dan struktur modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan Subsektor Telekomunikasi yang terdaftar di BEI selama pandemi Covid-19.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran yang baik untuk pengembangan penelitian selanjutnya, sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan menggunakan atau menambah variabel lain seperti likuiditas dan *price earning ratio* (PER) yang mungkin lebih mempengaruhi nilai perusahaan serta menggunakan obyek yang lebih luas yang tidak hanya pada Subsektor Telekomunikasi tetapi pada perusahaan lainnya.
2. Bagi pihak manajemen perusahaan, diharapkan untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan yaitu ukuran perusahaan dan struktur modal. Ukuran perusahaan dan struktur modal terbukti berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade, E. Y. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor

- Industri Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI). *Jurnal Akuntansi Universitas Wahid Hasyim*.
- Arafah, N. Y. & N. (2020). Analisis Nilai Perusahaan Pada Subsektor Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI. *Prosiding Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Volume 2*.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* (7th ed.). Semarang.
- Gultom, R. Agustina, Wijaya, S. W. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Farmasi Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil Volume 3*.
- Gumanti, T. A. (2017). *Laporan Keuangan Korporat: Tinjauan Teori Dan Bukti Empiris Mitra Wacana*.
- Halim, A. (2012). *Manajemen Keuangan Bisnis*. Ghalia Indonesia.
- Harahap, S. S. (2009). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. PT.Raja Garuda Persada.
- Harmono. (2014). *Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard (Pendekatan Teori, Kasus, dan Riset Bisnis)*. Bumi Aksara.
- Kasmir. (2015). *Analisis Laporan Keuangan, Edisi kesatu, cetakan kedelapan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Languju, O., Mangantar, M., & H.D.Tasik, H. (2016). Pengaruh Return on Equity, Ukuran Perusahaan, Price Earning Ratio Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Property and Real Estate Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(2)*.
- Lubis, I. L., Sinaga, B. M., & Sasongko, H. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Sruktur Modal, Dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (JABM), 3(3)*, 458–458.
- Octavia, L. (2016). Pengaruh Return On Equity, Ukuran Perusahaan, Price Earning Ratio Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Property And Real Estate Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(2)*.
- Rajagukguk, L., Ariesta, V., & Pakpahan, Y. (2019). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Keputusan Investasi, dan Kebijakan Utang Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Inspirasi Bisnis Dan Manajemen, 3(1)*. <https://doi.org/10.33603/jibm.v3i1.2079>
- Rohmana, Y. (2013). *Ekonometrika Teori dan Aplikasi Dengan Eviews* (Laboratorium Pendidikan Ekonomi dan Koperasi Universitas Pendidikan Indonesia (ed.)).
- Siswoyo, E., & Oetomo, H. W. (2012). Analisis Rasio Aktivitas Terhadap Nilai Perusahaan Yang Diukur Dengan Metode Tobin's Q Pada Perusahaan Kertas Yang Go Public Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmu & Riset Manajemen, 1(9)*, 1–15.
- Sondakh, R., & Morasa, J. (2019). Ipteks Mengukur Nilai Perusahaan Di Pasar Modal Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat, 3(1)*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Erlangga.
- Sutrisno. (2011). *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*. Erlangga.
- Suwito, E., & Herawaty, A. (2012). *Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tindakan Perataan Laba Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta*.
- Suwito, E., & Herawaty, A. (2012). *Analisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap tindakan perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta*.
- Warsono. (2003). *Keputusan Keuangan Jangka Panjang*. UMM Press.
- Yanda, A. C. (2018). Pengaruh Struktur Modal, Pertumbuhan Perusahaan, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*.